

PRESIDEN IRAN TINGKATKAN KERJASAMA BILATERAL DI BERBAGAI SEKTOR

MEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI KONSTITUSI



MAJELIS

MPR RUMAH KEBANGSAAN



EDISI NO.06/TH.XVII/JUNI 2023

Tindak Pidana Perdagangan Orang
NEGARA HARUS HADIR
Melindungi Warga dari TPPO



ISSN 0854-6371
9 770854 637158

06 **Refleksi**
White Collar Crime di Tubuh
Birokrasi dan Krisis Kepercayaan

20 **Nasional**
Politik Identitas Lahirkan
Pembelahan Masyarakat

39 **Selingan**
Sejarah Panjang DAMRI
Bukan Sekadar Bus AKAP

64 **Sosialisasi**
Keberagaman adalah
Fitrah Kebangsaan

MPR
RUMAH KEBANGSAAN
PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA
DAN KEDAULATAN RAKYAT



Peringatan
Hari Lahir Ke-78 Pancasila 1 Juni 2023

PANCASILA



Buku Digital MPR RI
SETJEN MPR RI

Daftar Isi

EDISI NO.06/TH.XVII/JUNI 2023



08 BERITA UTAMA

Negara Harus Hadir Melindungi Warga dari TPPO

Gambaran tentang tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Indonesia sangat memprihatinkan dan menyedihkan, sekaligus mengerikan. Karena itu, perlu langkah cepat dan tegas dalam menanggulangi masalah TPPO. Negara harus mampu membuktikan hadir dalam melindungi warga negaranya dari TPPO.



16 Nasional Iran Ajak Indonesia Tingkatkan Kerjasama Bilateral di Berbagai Sektor



64 Sosialisasi Keberagaman adalah Fitrah Kebangsaan Harus Dijaga Bersama



39 SELINGAN Sejarah Panjang DAMRI



84 Profil Mardani Ali Sera

Pengantar Redaksi	04
Perspektif	06
Kolom	34
Aspirasi Masyarakat	47
Gema Pancasila	48
Varia MPR	76
Wawancara	78
Figur	80
Ragam	82
Dari Rumah Kebangsaan	88
Rehal	90



COVER

Edisi No.06/TH.XVII/Juni 2023
Kreatif: Jonni Yasrul - Foto: Istimewa

Tindak Pidana Perdagangan Orang

INDONESIA saat ini bisa dikatakan dalam keadaan darurat tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Gambaran tindak pidana perdagangan orang di Indonesia sangat memprihatinkan, menyedihkan, sekaligus mengerikan. Data dari Badan Pelindung Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menyebutkan, dalam satu tahun sebanyak 1.900 jenasah dikirim ke Tanah Air sebagai korban perdagangan orang. Artinya, dalam satu hari, ada dua peti jenasah korban perdagangan orang yang dikirim ke Indonesia.

Bahkan, khusus di Nusa Tenggara Timur (NTT), sejak Januari sampai Mei 2023 sudah ada 55 jenasah WNI yang dipulangkan karena korban perdagangan orang. Para korban TPPO ini dulu berangkat secara tidak resmi atau unprocedural. Sebagian besar diyakini diberangkatkan oleh sebuah sindikat.

Tidak hanya korban meninggal, BP2MI juga mencatat tidak sedikit WNI korban TPPO yang mengalami cacat, depresi, hingga hilang ingatan. Jumlahnya mencapai 3.600 WNI korban TPPO yang mengalami cacat, depresi, hingga hilang ingatan.

Ibarat gunung es, kasus TPPO yang sebenarnya terjadi lebih banyak dari kasus yang terekspos. Kemenlu mencatat jumlah kasus perdagangan manusia yang melibatkan warga negara Indonesia, berturut-turut sebanyak 478 kasus (tahun 2016), 340 kasus (2017), 164 kasus (2018), 259 kasus (2019), 383 kasus (2020).

Sementara untuk kasus perdagangan anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat, pada tahun 2016 sebanyak 340 kasus, kemudian 347 kasus (2017), 329 kasus (2018), 244 kasus (2019), 149 kasus (2020), dan 234 kasus (2021). Pada 2021, Bareskrim Polri telah menginvestigasi 24 kasus perdagangan orang (8 kasus perdagangan seks dan 16 kasus perdatangan tenaga kerja).

Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) mencatat, selama tahun 2017 hingga 2022 terjadi 2.605

kasus TPPO di Indonesia. Dari jumlah tersebut persentase terbesar korban TPPO terjadi pada anak-anak sebesar 50,97%, perempuan 46,14%, dan laki-laki sebesar 2,89%.

Banyak aspek terkait dengan TPPO, di antaranya kemiskinan dan pengangguran. Kemiskinan dan terbatasnya kesempatan kerja menjadi faktor pemicu seseorang menjadi buruh migran. Apalagi diiming-imingi dengan gaji besar di luar negeri. Ini adalah modus untuk menjerat korban TPPO. Ditambah lagi dengan adanya sindikat oknum dan penyalur tenaga kerja. Mereka adalah mafia perdagangan orang yang seringkali mendapat backing dari oknum aparat.

Pemerintah tidak menutup mata atas kondisi darurat perdagangan orang. Satgas TPPO yang diharapkan dapat mencegah sekaligus memberantas perdagangan orang belum bekerja secara optimal. Terbukti perdagangan orang tetap marak. Untuk mencegah secara serius perdagangan orang, pemerintah mulai membenahi atau merestrukturisasi Satgas TPPO. Kini, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjadi ketua pelaksana harian Satgas TPPO. Kapolri diharapkan dapat memperkuat penegakan hukum dan menindak para backing pelaku tindak pidana perdagangan orang.

Restrukturisasi Satgas Tim TPPO merupakan salah satu upaya mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Upaya lainnya adalah koordinasi antara lembaga, pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memberantas TPPO. Terutama pemerintah daerah sangat berperan mencegah TPPO dengan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak mudah tergiur janji dan iming-iming dari pelaku TPPO.

Memang diperlukan langkah yang cepat dan tegas dalam menanggulangi masalah TPPO. Kehadiran pemerintah, aparat kepolisian, TNI, dan lainnya memperlihatkan bahwa negara memang harus hadir untuk melindungi warga negara dari tindak pidana perdagangan orang dan keluar dari kondisi darurat TPPO. □



PENASEHAT

Pimpinan MPR-RI

PENANGGUNG JAWAB

Jenedjri M. Gaffar

PEMIMPIN REDAKSI

Siti Fauziah

DEWAN REDAKSI

Dyastasita, Heri Herawan,
Maifrizal

REDAKTUR PELAKSANA

Indro Gutomo

KOORDINATOR REPORTASE

Euis Karmila

REDAKTUR FOTO

Oni Arief Benyamin,

Slamet Eko Suprayitno

REPORTER

Yenita Revi, Try Syilvani,

Ikhwan Bimo F, Amelia Rubinta,

Alfonso DK Tahapary

FOTOGRAFER

Ahmad Suryana, Frinda,

Restu, Suprianto, Faridz Rizky,

Wira, Subhan

PENANGGUNG JAWAB/ KOORDINATOR DISTRIBUSI

Cucu Riwayati

STAF DISTRIBUSI

Ati Oktafia, Anggun Permana,

Achmad Farobi,

Widya Permataningrum

SEKRETARIS REDAKSI

Djarot Widiarto

TIM AHLI

Syahril Chili, Jonni Yasrul,

Ardi Winangun, Budi Sucahyo,

Derry Irawan, M. Budiono

ALAMAT REDAKSI

Biro Hubungan Masyarakat dan

Sistem Informasi,

Sekretariat Jenderal MPR-RI

Gedung Nusantara III, Lt. 5

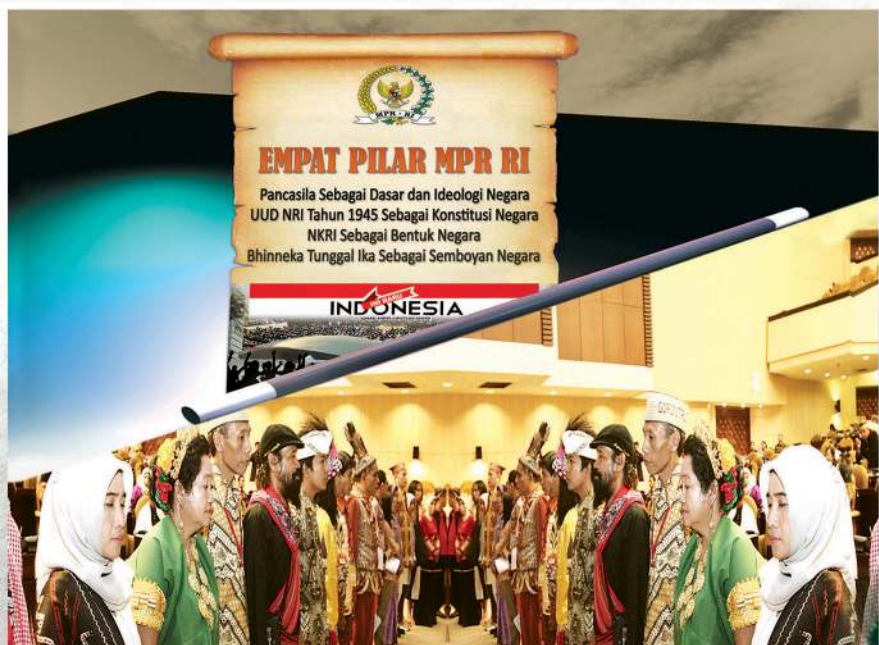
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 6,

Senayan, Jakarta 10270.

Telp. (021) 57895237, 57895238,

57895251 Fax.: (021) 57895237

Email: pemberitaan@setjen.mpr.go.id



White Collar Crime di Tubuh Birokrasi dan Krisis Kepercayaan

KONSEKUENSI logis dari terungkapnya rangkaian fakta tentang perilaku korup sejumlah aparatur negara akhir-akhir ini adalah terbentuknya persepsi publik yang sangat negatif pada sejumlah institusi. Anggapan buruk itu akan berkembang menjadi krisis kepercayaan, jika tidak segera disikapi dengan pendekatan holistik. Maka, memerangi korupsi tak cukup lagi dengan penindakan, namun lebih mengutamakan pencegahan.

Rangkaian fakta tentang perilaku korup sejumlah aparatur negara yang terungkap belakangan ini memaksa siapa saja menyimak serta menyuarakan keprihatinan. Pasti sangat mengecewakan karena korupsi ternyata masih dan semakin marak, dengan potensi kerugian negara yang nilainya terbilang fantastis. Padahal, sudah puluhan tahun negara konsisten memerangi korupsi.

Gambaran dari rangkaian kasus baru itu hanya memberi penjelasan kepada masyarakat bahwa negara belum memenangi apa pun dari perang itu. Memenuhi syarat untuk mengatakan korupsi saat ini demikian merajalela. Kalau di masa lalu, korupsi skala besar dilakukan oleh pusat kekuasaan, kini korupsi bernilai triliunan rupiah sudah bisa dilakukan cabang-cabang kekuasaan level eselon menengah.

Menyikapi kecenderungan itu, masyarakat tak cukup hanya geleng-geleng kepala atau mengelus dada, tetapi juga dipaksa untuk menerima kenyataan yang menyakitkan itu. Pasti menguras emosi. Perang seperti apa lagi yang diperlukan untuk sekadar bisa meminimalisir peluang oknum aparatur negara melakukan korupsi. Mengapa reformasi birokrasi yang sudah dilaksanakan belum juga dapat meminimalisir peluang oknum melakukan korupsi?

Namun, semua komunitas anak bangsa diharapkan tidak pernah lelah dan jenuh untuk ikut memerangi korupsi, sebagaimana sudah ditunjukkan sebagian warganet akhir-akhir ini. Kalau masyarakat demikian peduli, pemerintah bersama institusi penegak hukum pun diharapkan lebih bersungguh-sungguh, terutama pada aspek pencegahan. Sebagai salah satu modus kejahatan terhadap negara

dan rakyat, korupsi mungkin sulit dieliminasi. Namun, strategi pencegahan yang lebih dan semakin efektif seharusnya bisa dirumuskan.

Memang, tema tentang pencegahan tindak pidana korupsi (Tipikor) sama sekali tidak baru, karena sudah begitu sering dibahas dan didiskusikan. Namun, setelah memahami ragam modus korupsi yang dipraktikkan pada kasus-kasus terbaru, tema pencegahan Tipikor menjadi relevan dan perlu disegarkan lagi. Relevansi dan masalahnya sangat jelas. Bayangkan, di tengah konsistensi negara memerangi korupsi, alih-alih semakin bersih wajah institusi dari perilaku korup, potret riil yang terungkap malah sangat menakutkan. Sebab, ada beragam mafia pada sejumlah institusi yang siap memangsa siapa saja yang lemah, termasuk memangsa hak-hak negara.

Pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD tentang maraknya korupsi mempertegas gambaran itu. Belum lama ini, Menko Mahfud berujar, “Gilanya korupsi di negara kita ini. Sekarang, kalau saudara boleh ke mana aja, ada korupsi. Boleh ke hutan ada korupsi di hutan; boleh ke udara ke pesawat udara, ada korupsi di Garuda.”

Keprihatinan bersama akibat korupsi hendaknya tidak semata-mata terfokus pada besar-kecilnya nilai kerugian negara dan rakyat. Tak kalah pentingnya untuk dipahami adalah bagaimana para terduga koruptor itu memperlakukan institusi negara sebagai basis dan sarana mempraktikkan kejahatan mereka. Para oknum itu menjadi ASN bukan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai abdi negara. Mereka masuk institusi negara untuk membangun organisasi kejahatan, dengan cara menyalahgunakan wewenang yang diberikan negara kepada mereka. Sangat wajar jika kemudian publik mengenal ragam mafia pada sejumlah institusi.

Fakta tentang ragam mafia pada sejumlah institusi melahirkan kesimpulan bahwa birokrasi pada beberapa institusi sarat dan dikendalikan pelaku kejahatan kerah putih (white collar crime).

H. Bambang Soesatyo, SE., MBA.

Ketua MPR RI



Jabatan mereka terhormat dengan kewenangan besar yang dipercayakan negara kepadanya. Namun, mental dan orientasi mereka bukan untuk melayani negara dan rakyat, melainkan membangun organisasi kejahatan yang nyaris tanpa bentuk untuk merampok dan merampas hak-hak negara dan rakyat.

Dalam beberapa kasus terbaru, bahkan muncul gambaran jika para oknum aparaturnya negara itu memindahkan kejahatan jalanan (blue collar crime) ke dalam organisasi mereka di institusi. Untuk memperluas jaringan, para oknum itu menggunakan wewenang sebagai tameng untuk 'operasi penindakan atau penertiban'. Padahal target utamanya adalah penguasaan ruang yang lebih dan semakin besar untuk memuluskan kejahatan. Misalnya, para oknum itu akan memburu dan menindas pengedar narkoba yang bukan anggota jaringan.

Peran cukup dominan dari pelaku kejahatan kerah putih pada sejumlah institusi itu hendaknya tidak disederhanakan dengan sekadar menangani perkara Tipikor-nya. Sebaliknya, harus disikapi dengan sangat serius dan holistik. Harus dimunculkan ambisi untuk mengeliminasi ragam mafia pada birokrasi institusi negara. Kalau terpaku pada kasus Tipikor-nya, sama sekali tidak ada jaminan mafia-mafia itu akan tereliminasi. Pada akhirnya, setiap administrasi pemerintahan menjadi tidak nyaman karena tercoreng oleh sepak terjang ragam mafia itu.

Dan, ketika rakyat sampai pada asumsi atau anggapan bahwa negara gagal memerangi mafia di

tubuh birokrasi, persoalan yang akan mengemuka kemudian adalah krisis kepercayaan kepada pemerintah. Semua orang tahu apa yang akan terjadi pada negara jika krisis kepercayaan kepada pemerintah tidak ditangani dengan efektif. Persoalannya bisa melebar menjadi krisis politik.

Hari-hari ini, telah dibentuk dan mulai bekerja Satuan Tugas (Satgas) Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) untuk mengusut dugaan transaksi mencurigakan sebesar Rp 349 triliun itu. Kehadiran Satgas TPPU ini tentu harus dan layak diapresiasi. Publik berharap Satgas mampu menuntaskan kasus ini, termasuk memberi penjelasan kepada masyarakat tentang konstruksi kasus, dan siapa serta bagaimana cara bekerja semua pihak yang terlibat dalam kasus ini.

Setelah puluhan tahun negara konsisten memerangi korupsi, jumlah penindakan, plus jumlah kasus Tipikor yang telah divonis pengadilan sudah begitu banyak, baik kasus Tipikor skala besar maupun kecil. Namun, terungkapnya rangkaian fakta kasus dugaan Tipikor terbaru menjadi bukti bahwa penindakan yang berujung pada sanksi hukum terhadap para koruptor sama sekali tidak menumbuhkan efek jera. Kalau sanksi hukum tidak efektif menumbuhkan efek jera, tentu harus dicari strategi lain yang lebih efektif dalam perang melawan korupsi.

Strategi pencegahan hendaknya lebih diutamakan. Bagaimana rumusan strategi pencegahan yang dinilai efektif, tentu diperlukan inisiatif bersama lintas sektor, melibatkan para pakar, termasuk belajar dari pengalaman negara lain yang mampu meminimalisir korupsi di tubuh birokrasi negara. □

Tindak Pidana Perdagangan Orang

Negara Harus **Hadir** Melindungi Warga dari TPPO



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Gambaran tentang tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Indonesia sangat memprihatinkan dan menyedihkan, sekaligus mengerikan. Karena itu, perlu langkah cepat dan tegas dalam menanggulangi masalah TPPO. Negara harus mampu membuktikan hadir dalam melindungi warga negaranya dari TPPO.

MENTERI Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud Md., mengungkap fakta yang mengerikan. Dalam satu tahun, katanya, sebanyak 1.900 lebih jenazah yang dipulangkan dari luar negeri karena tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Bahkan, khusus di Nusa Tenggara Timur (NTT), Mahfud menyebut, sejak Januari sampai Mei 2023 sudah ada 55 jenazah WNI yang dipulangkan karena perdagangan orang.

Mahfud Md., tidak sembarang bicara. Menkopolhukam ini bicara berdasarkan data dan fakta. Data tersebut berasal dari Badan Pelindung Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). "Tadi Pak Benny Rhamdani melapor kepada Presiden, dalam satu tahun saja, mayat yang pulang karena TPPO itu mencapai 1.900 orang lebih," kata Mahfud Md., kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa, 30 Mei 2023.

Mahfud menyebut, mereka yang menjadi korban TPPO dikirim ke luar negeri dan biasanya menjadi budak-budak. Biasanya para korban TPPO mendapatkan penganiayaan atau terlibat dalam kejahatan-kejahatan. Bukan hanya menyebabkan korban TPPO meninggal, tapi tidak sedikit WNI juga korban TPPO yang cacat, depresi, hingga hilang ingatan.

Sebelumnya, Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengungkapkan, dalam kurun tiga tahun terakhir, ada sekitar 94 ribu WNI dideportasi

dari Timur Tengah dan Asia. Dari jumlah itu, sebanyak 90% adalah mereka yang dulu berangkat tidak resmi atau *unprocedural*. "Sebanyak 90% dari angka itu diyakini diberangkatkan oleh sindikat," katanya saat mendampingi Mahfud Md., memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan.

Begitu pula, lanjut Benny, tercatat 1.900 mayat yang dipulangkan ke Indonesia, mayoritas adalah WNI yang dulu berangkat ke luar negeri secara ilegal. Artinya, setiap hari ada dua peti jenazah yang datang ke Tanah Air. Jumlah itu belum termasuk WNI yang mengalami cacat dan hilang ingatan. Jumlahnya pun tidak sedikit. "Sebanyak 3.600 WNI yang mengalami depresi, hilang ingatan, dan bahkan cacat secara fisik," ujar Benny.

Data yang disebutkan di atas diperkuat dengan kasus-kasus TPPO yang terjadi belakangan ini. Pada Oktober 2022, polisi menangkap seorang pria berinisial PD alias Lipus sebagai tersangka tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Lipus merekrut 15 warga dari Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan dikirim secara ilegal untuk bekerja di sebuah perusahaan kertas di Pekanbaru. Belasan warga itu diselundupkan menggunakan truk ekspedisi.

Tindak perdagangan orang pun terjadi di Batam. Berawal dari aduan Romo Paschalis, tokoh agama Katolik sekaligus aktivis yang menolak perdagangan orang. Jalur perdagangan orang di Batam justru melalui jalur resmi, di tiga pelabuhan besar di Batam. Salah



satunya Batam Center. Banyak calo yang berkeliaran menawarkan cara mudah untuk melintas ke Singapura maupun Malaysia. Dengan bantuan calo tersebut, orang-orang dapat mudah masuk menaiki kapal laut tanpa pemeriksaan dokumen perjalanan. Paschalis mengirim surat ke Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan melaporkan adanya dugaan peran pejabat BIN di daerah Kepulauan Riau dalam kasus TPPO.

Pada pertengahan Mei 2023, Bareskrim Polri mengungkap sebanyak 20 warga negara Indonesia menjadi korban perdagangan orang di Myawaddy, Myanmar. Para pekerja itu diberangkatkan ke negara Myanmar melalui jalur ilegal. Di Myanmar, mereka dipekerjakan secara paksa oleh perusahaan Grup Ding Sheng untuk melakukan pekerjaan scammer/penipuan berbentuk investasi.

Selain jam kerja yang lama, dari pukul 05.30 sampai 21.00, para pekerja WNI digaji dengan tidak layak. Jika melawan atau melanggar perintah kerja dan memberontak, korban akan mendapat hukuman dan siksaan. Kemenlu RI akhirnya bisa

mengevakuasi 20 WNI korban perdagangan manusia itu dari wilayah konflik di Myawaddy, Myanmar.

Kejahatan Luar Biasa

Melihat data-data yang mengerikan soal warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang, Wakil Ketua MPR Arsul Sani berpendapat bahwa tindak pidana perdagangan orang (TPPO) merupakan kejahatan serius. Karena itu, pemerintah harus memberi perhatian besar untuk menangani TPPO. Penanganan TPPO harus menjadi agenda besar pemerintah. Lebih khusus lagi, Arsul Sani meminta perhatian dari kepolisian dalam menangani TPPO.

"Kejahatan ini sudah merupakan kejahatan serius yang penanggulangan dan pemberantasannya perlu mendapat fokus yang lebih besar dalam agenda kerja Polri di masa mendatang," kata Arsul kepada media, Selasa, 30 Mei 2023.

Anggota MPR dari Fraksi Partai Golkar, Christina Aryani, juga menilai, TPPO perlu ditetapkan sebagai kejahatan luar biasa (ex-

traordinary crime). "TPPO sebagai tindak pidana yang sarat dengan malapetaka kemanusiaan juga perlu ditetapkan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime)," katanya dalam keterangan tertulis.

Menurut Christina, pemerintah harus lebih serius menangani pemberangkatan pekerja migran Indonesia (PMI) secara non-prosedural (ilegal) yang kental dengan muatan TPPO. Christina meminta Presiden memberikan perhatian lebih bahkan turun langsung mengatasi masalah ini agar pihak terkait bisa simultan bergerak. "Kita tidak menginginkan praktik-praktik sindikat semacam ini terus terjadi, bahkan dianggap sebagai praktik yang lumrah, sehingga kita dipaksa untuk memakluminya," tuturnya.

Praktik TPPO menjadi awal malapetaka kemanusiaan yang diterima korban, mulai dari rentan eksploitasi, kerja paksa, kecelakaan dalam perjalanan, dan lemahnya perlindungan hukum serta jaminan sosial di negara tujuan. Maraknya TPPO memperlihatkan adanya pembiaran oleh pemerintah yang dapat dimaknai sebagai ketidakseriusan pemerintah memberantas

TPPO.

TPPO terkait dengan beberapa aspek lainnya. Misalnya, faktor kemiskinan dan pengangguran. Satu dari sepuluh orang di Indonesia adalah orang miskin dengan pengeluaran kurang dari Rp 17.000/hari. Orang miskin dianggap potensial untuk menjadi buruh migran guna memperbaiki nasib di tengah keterbatasan kesempatan untuk bekerja di dalam negeri. Kemiskinan dan pengangguran menjadi persoalan mendasar orang-orang menjadi pekerja migran di luar negeri.

Iming-iming gaji besar bekerja di luar negeri menjadi modus operandi sebagai umpan yang menyelubungi kail untuk menjerat korban TPPO. Kebanyakan korban TPPO memang tertarik dengan iming-iming gaji besar di tengah skill atau kesempatan yang tidak ada dan kesulitan mencari pekerjaan.

Faktor lainnya, adalah adanya oknum dan agen penyalur tenaga kerja. Ini terkait dengan sindikat perdagangan orang. Menurut Ketua BP2MI, Benny Rhamdani di Batam, ada lima nama bandar besar sindikat perdagangan orang. Ia mengatakan, kelima bandar ini “tidak tersentuh” karena dilindungi oleh orang-orang yang punya kuasa. Mereka dibekingi oknum-oknum yang memiliki atributif kekuasaan di negeri ini.

Di luar itu masih ada sindikat perdagangan orang oleh jaringan yang luas dan besar. Jaringan ini memesan pesawat khusus untuk memberangkatkan 212 WNI ke Kamboja pada 2022 lalu. Selama ini, pelaku perdagangan orang yang ditangkap kebanyakan adalah pelaku lapangan seperti calo. Sementara aktor intelektualnya tidak tersentuh hukum.

Faktor berikutnya adalah kantong basis dan jalur perdagangan orang. Komnas HAM menyebut, kasus perdagangan orang di Nusa Tenggara Timur sebagai masuk dalam kategori darurat. Sejak Januari – Mei 2023 sebanyak 56 mayat buruh migran korban perdagangan orang dipulangkan dari luar negeri melalui Bandara El Tari, Kupang. Pada tahun 2022, jumlah pemulangan jenazah buruh migran korban perdagangan orang di NTT mencapai 120 orang.

Selain NTT, wilayah lain yang menjadi basis buruh migran adalah Nusa Tenggara Barat, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara. Sementara rute penyalurannya sudah ada polanya.



Bambang Soesatyo

Misalnya, pola migrasi di NTT umumnya melalui wilayah lain (transit), lewat Batam, Entikong, Nunukan, Medan, Jakarta, Natuna, dan Surabaya.

Untuk mencegah terjadinya TPPO, pemerintah telah melakukan berbagai upaya. Salah satunya dengan menerbitkan Perpres No. 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pencegahan

Presiden Joko Widodo telah menerima laporan dari Kepala BP2MI Benny Rhamdani tentang 1.900 mayat korban TPPO yang dikirim ke Indonesia. Presiden pun menggelar rapat kabinet khusus membahas masalah

TPPO. Jokowi langsung mengambil langkah untuk menangani masalah perdagangan orang. Hasil rapat kabinet itu adalah restrukturisasi Satgas TPPO.

“Presiden menyatakan, melakukan restrukturisasi Satgas TPPO dan memerintahkan langkah-langkah cepat dalam sebulan ini untuk menunjukkan kepada publik bahwa negara, kepolisian, TNI, dan aparat pemerintah yang lain itu bertindak cepat dan hadir,” kata Mahfud Md., usai rapat kabinet, Selasa 30 Mei 2023.

Bahkan, dalam rapat kabinet itu, Presiden Jokowi memerintahkan Kapolri untuk menindak para pembeking TPPO. “Tidak ada backing-backing bagi penjahat,” tandas Mahfud.



Christina Aryani

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendukung sikap tegas pemerintah dan meminta aparaturnya untuk bersikap berani terhadap para pelaku TPPO. "Upaya Presiden Joko Widodo melakukan restrukturisasi Satgas Tim TPPO sangatlah tepat. Diperlukan langkah cepat dan tegas dalam menanggulangi masalah TPPO. Negara harus mampu membuktikan hadir dalam melindungi warga negaranya dari TPPO. Tindak tegas semua pelakunya tanpa terkecuali," kata Bamsoet dalam keterangannya, Kamis 1 Juni 2023.

Bamsoet melihat para pelaku TPPO mudah menjerat para korban karena masyarakat di daerah belum dibekali pengetahuan tentang sepak terjang dan modus mafia TPPO. Kecenderungan tersebut menggambarkan masih lemahnya koordinasi lintas sektoral dalam memberikan perlindungan terhadap kelompok-kelompok warga yang rentan menjadi korban TPPO.

"Pemerintah pusat dan daerah serta seluruh instansi yang terkait harus mengidentifikasi daerah di Indonesia yang rawan TPPO. Di daerah rawan itu dibuatkan satuan tugas untuk memantau kegiatan perekrutan tenaga kerja secara ilegal, terutama perekrutan calon pekerja migran. Selain mengintensifkan sosialisasi pencegahan TPPO pada daerah rawan TPPO tersebut," katanya.

Senada dengan Bamsoet, Arsul Sani juga menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian dan lembaga lainnya dalam pencegahan TPPO. Dia juga meminta pemerintah daerah lebih banyak dilibatkan untuk mencegah TPPO. "Koordinasi perlu mencakup dengan pemda-pemda yang warganya teridentifikasi sebagai korban-korban dari TPPO ini," kata Arsul yang juga anggota Komisi III DPR RI ini.

Dia mengatakan, Pemda memiliki peran di level pencegahan. Pemda, katanya, bisa melakukan sosialisasi ke masyarakat agar tak mudah tertipu janji pekerjaan dan gaji besar tanpa melalui prosedur resmi. "Keberhasilan pada level pencegahan terhadap TPPO dipengaruhi bagaimana Pemda setempat bisa mengajak dan menyadarkan masyarakat untuk tidak gampang terbuai dengan janji-janji mendapat pekerjaan dengan gaji besar tanpa melalui jalur yang benar," katanya.



Arsul Sani

Christina Aryani juga mendukung restrukturisasi Satgas TPPO. Apalagi Satgas TPPO dikendalikan langsung Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo. Dengan kata lain, dalam kasus TPPO dilakukan penegakan hukum yang semakin tegas terhadap para pelaku. Keberadaan Kapolri sebagai Ketua Pelaksana Harian di Satgas TPPO dapat mengoptimalkan penegakan hukum kasus TPPO.

"Dengan restrukturisasi Satgas ini membuktikan Indonesia sangat serius memberantas TPPO. Masalah paling menonjol di lapangan adalah menyangkut aspek penegakan hukum yang tidak maksimal," kata anggota Komisi I DPR itu dalam keterangan tertulis.



Sukamta

Christina berharap, melalui restrukturisasi Satgas TPPO, pemerintah dapat memiliki peta jalan untuk memastikan pemberantasan TPPO secara maksimal. "Kita tunggu keseriusan dan sejauhmana langkah penegakan hukum benar-benar dilakukan, termasuk memastikan tidak ada lagi aktor-aktor negara yang ikut terlibat," imbuhnya.

Namun, dia mengingatkan, selain pemberantasan dan pencegahan TPPO, perlu juga memerhatikan aspek lain, yaitu pencegahan melalui edukasi kepada masyarakat agar tidak terjebak dalam kerja sindikat perdagangan orang.

Anggota MPR dari Fraksi PKS, Sukamta, juga sependapat. Ketersediaan lapangan kerja dan iming-iming gaji tinggi jika bekerja di luar negeri menjadi permasalahan di hulu untuk mencegah TPPO. Selain itu, maraknya kasus TPPO juga disebabkan karena lemahnya upaya pencegahan, penegakan hukum, dan longgarnya imigrasi. "Masalah ini kompleks, sehingga tidak bisa hanya diselesaikan oleh satu kementerian atau lembaga, perlu koordinasi dan kerjasama semua pihak," katanya dalam keterangan tertulis.

Sukamta berpesan, agar pemerintah mengatasi lebih dulu masalah di hulu. Jika tidak terselesaikan akar masalahnya, TPPO masih akan terus terjadi. "Jika masalah di hulu tidak terselesaikan, pemerintah atau Kementerian Luar Negeri nanti fokus tugasnya hanya menjadi penyelamat WNI di luar negeri," ujarnya. □

DER/BSC

Perdagangan Orang di Indonesia

Pada masa kini, human trafficking di Indonesia berkedok Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Tapi, tidak sedikit dari mereka justru menjadi korban perdagangan manusia di luar negeri.

SEKADAR mengulas kembali, apa sebenarnya *trafficking* atau *human trafficking* itu? Sebenarnya, *human trafficking* adalah konsep yang dinamis, dengan definisi yang berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan politik. Hingga kini, belum ada definisi tentang human trafficking yang disepakati secara internasional. Karena itu, masih terjadi perdebatan tentang definisi *human trafficking* yang paling tepat untuk menggambarkan fenomena kompleks seperti *human trafficking*.

Namun, Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Sidang Umum pada tahun 1994 mendefinisikan *trafficking* sebagai berikut: "Pemindahan orang melewati batas nasional dan internasional secara gelap dan melanggar hukum, terutama dari negara berkembang dan dari negara dalam transisi ekonomi dengan tujuan memaksa perempuan dan anak perempuan masuk dalam situasi penindasan dan eksploitasi secara seksual dan ekonomi, sebagaimana juga tindakan ilegal lainnya yang berhubungan dengan perdagangan perempuan, seperti pekerja paksa domestik, kawin palsu, pekerja gelap, dan adopsi palsu demi kepentingan perekrut, pedagang, dan sindikasi kejahatan".

Wikipedia (bahasa Indonesia) mendefinisikan, perdagangan manusia atau perdagangan orang, yaitu segala transaksi jual beli terhadap manusia. Menurut lembaga non-pemerintah yang menangani kasus perdagangan manusia di Amerika Serikat, yaitu National Human Trafficking Hotline, menyebutkan: "Perdagangan manusia merupakan salah satu kasus kejahatan yang terjadi di lintas negara ketika pelaku menggunakan kekerasan, penipuan, atau paksaan untuk mengendalikan orang lain dengan tujuan (untuk) melakukan tindakan komersialisasi seks atau meminta tenaga kerja atau layanan yang bertentangan dengan keinginannya. Untuk kasus pekerja seks di bawah umur 18 tahun, tidak diperlukan unsur kekerasan, penipuan, atau



paksaan tetapi tetap dianggap sebagai tindak pidana perdagangan manusia."

Sebagai tambahan, menurut Departemen Keamanan Pemerintah Amerika Serikat, Homeland Security, perdagangan manusia kerap melibatkan kekerasan dan paksaan yang tujuannya adalah eksploitasi, yakni untuk mendapatkan keuntungan ekonomi bagi pelaku. Selain menggunakan kekerasan dan paksaan, pelaku juga bisa menjerat korban dengan manipulasi dan penipuan dengan iming-iming keuntungan.

Perdagangan manusia adalah tindak kriminal lintas negara ketiga terbesar di dunia setelah perdagangan narkoba dan senjata. Selain itu, perdagangan manusia dapat dikatakan sebagai aktivitas kriminal terorganisir paling pesat di dunia. Umumnya, perdagangan manusia berupa penyelundupan manusia melalui perbatasan tidak resmi.

Indonesia

Di Indonesia, *human trafficking* bukanlah hal baru. Perdagangan manusia atau orang di Indonesia sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Salah satu buktinya, Kongres Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia (KPPPI), pada tahun 1932, membahas

tentang *human trafficking*. Forum itu mengeluarkan rekomendasi terkait dengan *human trafficking*, terutama perdagangan perempuan dan anak.

Salah satu rekomendasi itu adalah perdagangan perempuan dan anak sangat berkaitan dengan kemiskinan yang diderita masyarakat. PPPI berkeyakinan bahwa ada hubungan yang signifikan antara persoalan perdagangan perempuan dan pelacuran dengan masalah kemiskinan masyarakat. Pada masa kolonial itu, rakyat terjat dalam belitan utang. Selain itu, kondisi (tempat) kerja sangat buruk bagi buruh perempuan.

Satu hal yang tidak terlupakan terkait dengan perdagangan perempuan dalam sejarah Indonesia pada masa penjajahan kolonial adalah sebutan *Jugun lanfu*. *Jugun lanfu* adalah sebutan bagi perempuan yang menjadi objek seksual oleh tentara Jepang pada Perang Dunia II. *Jugun lanfu* jelas merupakan salah satu bukti terjadinya *human trafficking*. *Jugun lanfu* menunjukkan adanya *trafficking of woman and children* atas nama perbudakan seksual untuk tujuan perang.

Dari fakta-fakta di atas, sebenarnya *human trafficking* sudah ada sejak sebelum berdirinya negara Republik Indonesia. Dari



perspektif sejarah itu, kita bisa melihat bahwa masalah perdagangan perempuan dan anak sudah menjadi pembicaraan publik. Perbincangan dan pembahasan tentang perdagangan perempuan dan anak terus berlangsung seiring sejalan dengan pembentukan bangsa Indonesia. Bahkan, hingga saat ini.

Sampai sekarang pun, praktik *human trafficking* masih terjadi di Indonesia. Namun, berbeda dengan masa penjajahan, *human trafficking* memiliki warna yang berbeda. Pada masa kini, *human trafficking* di Indonesia berkedok Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Tapi, tidak sedikit dari mereka justru menjadi korban perdagangan manusia di luar negeri.

Dalam kasus perdagangan manusia, Indonesia dapat dikatakan sebagai salah satu

negara yang menjadi tujuan sekaligus tempat asal para korban. Kemenlu RI bersama Kedutaan Besar Amerika Serikat menghimpun data berdasarkan laporan kasus-kasus perdagangan manusia di Indonesia yang masuk ke Kemenlu RI.

Data yang dihimpun menyebutkan, pada tahun 2016 Kemenlu menerima 478 kasus perdagangan manusia yang melibatkan warga Indonesia. Pada 2017, jumlah laporan yang diterima Kemenlu turun di angka 340 kasus, kemudian kembali turun pada tahun 2018 menyentuh angka 164 kasus yang dilaporkan. Namun, angka pelaporan kasus perdagangan manusia ini kembali naik pada tahun 2019 menjadi 259 kasus, dan naik kembali pada tahun 2020 menjadi 383 kasus perdagangan manusia yang dilaporkan ke



Kemenlu.

Sementara itu, untuk kasus perdagangan manusia, khusus kategori perdagangan anak, Indonesia juga terbilang cukup tinggi. Ini dapat dilihat dari data perdagangan anak yang telah dihimpun oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), mulai dari tahun 2016 hingga Januari-April 2021.

Pada tahun 2016 ada 340 kasus perdagangan anak yang diterima KPAI. Jumlah ini naik sedikit di tahun 2017 menjadi 347 kasus. Kemudian pada tahun 2018, angka kasus perdagangan anak turun menjadi 329 kasus, dan kemudian turun lagi pada 2019 menjadi 244 kasus, dan terus turun pada tahun 2020 menjadi 149 kasus perdagangan anak. Namun, jumlah kasus perdagangan anak kembali naik menjadi 234 kasus pada pertengahan 2021.

Di sisi lain, Bareskrim Polri melaporkan, telah menginvestasi total 24 kasus perdagangan orang sepanjang 2021. Dari jumlah itu, sebanyak 8 kasus perdagangan seks dan 16 kasus perdagangan tenaga kerja yang melibatkan pekerja migran. Kasus-kasus itu diselidiki berdasarkan UU Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Sebelumnya, pada tahun 2020, Bareskrim melakukan 38 penyidikan.

Di tingkat pengadilan, pemerintah telah menuntut 167 dugaan kasus perdagangan orang berdasarkan UU TPPO dan menghukum 178 pelaku pada 2021. Jumlah ini menurun dibandingkan hukuman terhadap pelaku TPPO sebanyak 259 orang pada tahun 2020.

Untuk mencegah terjadinya TPPO, pemerintah telah melakukan berbagai upaya. Salah satunya dengan menerbitkan Perpres No. 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Untuk memperkuat pencegahan TPPO dan mempertegas hukuman pada pelaku, pemerintah pun menyiapkan beleid pendukung, yakni Rencana Perpres Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (RPerpres RAN PP TPPO). Tujuan penyusunan RPerpres RAN TPPO adalah untuk meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam upaya pencegahan dan penanganan korban, serta penindakan terhadap pelaku TPPO. □

BSC



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Prof. Dr. Sjarifuddin Hasan, MM., MBA., Wakil Ketua MPR RI

Aparat Harus Tegas Menangani Tindak Pidana Perdagangan Orang

TINDAK pidana perdagangan orang (TPPO) di Indonesia sudah cukup mengkhawatirkan. Data dari Badan Pelindung Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menyebutkan, dalam setahun sebanyak 1.900 jenazah warga negara Indonesia korban perdagangan orang dikirim ke Tanah Air. Artinya, dalam satu hari ada dua jenazah korban perdagangan orang tiba di Indonesia.

Angka itu belum termasuk warga negara Indonesia korban perdagangan orang yang mengalami cacat, depresi, bahkan hilang ingatan. Menurut catatan BP2MI, sedikitnya sebanyak 3.600 warga negara Indonesia kembali ke Indonesia dalam keadaan cacat, depresi, hingga hilang ingatan. Artinya, dalam sehari, 8 hingga 9 warga Indonesia korban perdagangan orang mengalami cacat, depresi, atau hilang ingatan.

Dilihat dari kasus-kasus perdagangan orang, data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak

(SIMFONI PPA) mencatat, selama tahun 2017 hingga 2022 terjadi 2.605 kasus TPPO di Indonesia. Dari jumlah tersebut persentase terbesar korban TPPO terjadi pada anak-anak sebesar 50,97%, perempuan 46,14%, dan laki-laki sebesar 2,89%.

Untuk mencegah dan memberantas perdagangan orang, pemerintah sebenarnya sudah memiliki Satuan Tugas (Satgas) Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Namun, selama ini Satgas TPPO dinilai belum bekerja secara maksimal. Dalam rapat kabinet terbatas membahas TPPO, Presiden Joko Widodo merestrukturisasi Satgas TPPO dengan menempatkan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo sebagai Ketua Pelaksana Harian Satgas TPPO.

Berbincang tentang kondisi perdagangan orang, Majelis mewawancarai Wakil Ketua MPR Prof. Dr. Sjarifuddin Hasan, MM, MBA. Berikut petikan wawancara Majelis dengan Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrat ini.

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) masih marak terjadi. Pada awal Mei 2023, Kemenlu RI berhasil membebaskan 20 WNI korban TPPO di Myanmar. Sebelumnya, pada April 2023 juga terjadi kasus TPPO di Batam. Bagaimana Bapak melihat masih maraknya TPPO ini?

Maraknya kasus atau kejadian perdagangan orang atau *human trafficking* itu tak lepas dari awal muasal apa? Ini disebabkan karena pekerjaan atau mencari nafkah sangat sulit, sehingga banyak dari saudara-saudara kita yang mencari pekerjaan atau penghasilan di luar negeri.

Masalahnya adalah jumlah pencari kerja itu sangat banyak dan tidak mudah juga untuk bekerja di luar negeri. Banyak juga oknum yang memanfaatkan kondisi ini untuk mencari keuntungan. Mereka merekrut walaupun calon pekerja itu minim skill. Yang terjadi adalah mereka disalurkan dan ditempatkan dengan sembarang.

Minimnya skill, pengetahuan soal kondisi negara tujuan dan pekerjaan apa yang akan dikerjakan membuat mereka rentan menjadi objek perdagangan orang. Walaupun pemerintah sudah membangun fasilitas dan training untuk calon pekerja, tapi masih banyak oknum yang memanfaatkan karena jumlah orang yang membutuhkan pekerjaan sangat banyak, tidak seimbang.

Sehingga sangat perlu seluruh elemen bangsa, terutama pemerintah, memperhatikan ini. Lapangan pekerjaan harus diperbanyak di dalam negeri atau pendidikan untuk masyarakat harus diperluas hingga menjangkau seluruh lapisan masyarakat sampai ke pelosok, sehingga bisa menaikkan kualitas SDM mereka.

Jadi, faktor utama yang menjadi penyebab masih maraknya TPPO ini karena minimnya lapangan pekerjaan dan skill yang rendah?

Ya, seperti yang saya katakan, karena minimnya lapangan kerja, mereka kesulitan ditambah dengan pendidikan yang minim sehingga mereka hanya mengisi pekerjaan yang rentan untuk dijadikan objek kejahatan.

Pemerintah sudah mempunyai instrumen untuk menangani TPPO, mulai dari UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sampai unsur aparat Polri dan BIN, namun masih sulit membongkar sindikat TPPO.



Apakah benar ada backing di balik sindikat TPPO yang melibatkan aparat pemerintah dan swasta?

Namanya aksi kejahatan, apalagi terorganisir seperti *human trafficking* dan melihat keuntungan yang sangat besar pasti melibatkan banyak pihak yang hanya mementingkan keuntungan pribadi semata. Apalagi kebutuhan akan pekerjaan sangat besar, para sindikat melihat celah untuk dimanfaatkan. Menurut saya, kita atau pemerintah harus lebih pintar dan luwes dibanding para sindikat. Kerjasama antarinstansi harus lebih ditingkatkan dengan satu tujuan besar, menyelamatkan saudara sebangsa kita.

Apakah pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO dan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan TPPO tidak efektif untuk mengurangi terjadinya TPPO?

Bukan tidak efektif, tetapi harus lebih ditingkatkan. Intinya, harus lebih pintarlah dari para sindikat perdagangan orang itu.

Dari sisi masyarakat, bagaimana dengan kesadaran masyarakat sendiri terhadap TPPO agar masyarakat tidak mudah menjadi korban TPPO?

Masyarakat sebenarnya sangat peduli dengan adanya perdagangan orang. Ini bisa dilihat dari banyaknya kasus perdagangan orang yang justru terbongkar karena laporan masyarakat kan. Masalahnya, para sindikat ini menyasar mencari target orang-orang di daerah yang masih polos terus diiming-

imingkan pekerjaan mudah dengan gaji besar untuk mencari nafkah membantu keluarga, sehingga mereka tertarik. Masyarakat di luar desa, bisa juga menjaga atau dengan mengingatkan keluarganya atau saudaranya di desa agar berhati-hati terhadap iming-iming manis yang ternyata sebuah kejahatan.

Apa yang bisa dilakukan MPR untuk membantu pencegahan dan penanganan TPPO?

Kita mengimbau kepada aparat terkait untuk tegas dalam menangani kejahatan ini. Mereka juga harus selangkah ada di depan sindikat. Sebagai Pimpinan MPR kami juga mengimbau agar pemerintah, terutama pemerintah level desa, kecamatan, untuk melakukan atau membuat program edukasi dengan bekerja sama dengan lembaga terkait kepada warganya di desa, di lingkungan masing-masing, agar mereka memahami dan waspada atas rayuan sindikat.

Warga juga harus diedukasi tentang prosedur yang tepat jika menginginkan bekerja di luar negeri sehingga bisa waspada dari rayuan para sindikat perdagangan orang. Masyarakat luas juga kami harap untuk mewaspada di lingkungan masing-masing. Jika ada gelagat mencurigakan tentang kegiatan perdagangan orang segera dilaporkan kepada aparat. Pada intinya, kita semua berpartisipasi sesuai kemampuan kita untuk mencegah kejahatan perdagangan orang ini. □

Terima Presiden Iran, Seyyed Ebrahim Raisi

Iran Ajak Indonesia **Tingkatkan** Kerjasama Bilateral di Berbagai Sektor



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, menyambut baik tawaran peningkatan hubungan kerjasama dengan Iran. Terlebih, Indonesia dan Iran telah membangun hubungan diplomatik sejak 1950

KETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menuturkan, Presiden Iran Seyyed Ebrahim Raisi mengajak Indonesia meningkatkan kerjasama bilateral kedua negara di berbagai sektor. Diantaranya, sektor perdagangan, kesehatan, minyak dan gas, kelapa sawit, pariwisata, iptek, dan energi hijau.

“Presiden Iran menceritakan, Iran banyak mendapatkan tekanan dari negara-negara Barat. Namun, dari tekanan tersebut justru telah membuat Iran mengalami banyak kemajuan. Iran sudah mampu mencapai pemanfaatan teknologi nuklir di berbagai bidang untuk kesehatan, transportasi, pertanian, dan lain-lain,” ujar Bamsoet usai menerima Presiden Iran Seyyed Ebrahim Raisi di Kompleks Parlemen Jakarta, Selasa (23/5/23).

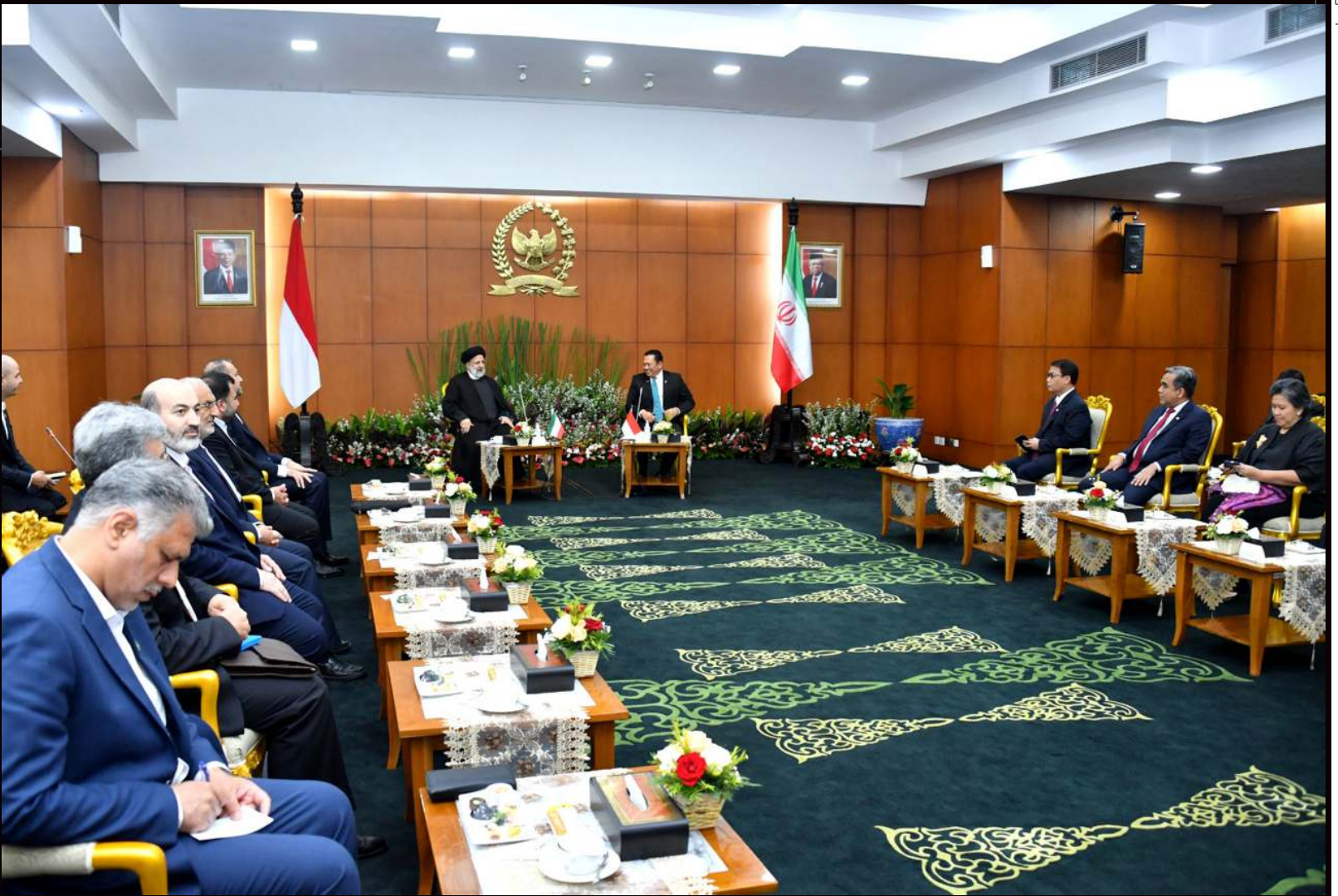
Pimpinan MPR RI yang hadir adalah Ahmad Basarah, Ahmad Muzani, Lestari Moerdijat, Jazilul Fawaid, Syarifuddin Hasan, Arsul Sani, Fadel Muhammad dan Yandri Susanto. Sementara delegasi Iran hadir Menteri Luar Negeri Amir-Abdollahian, Menteri Informasi dan Teknologi Komunikasi Isa Zarehpour, Wakil Menteri Luar Negeri Mahdi Safari, Ketua Kerjasama Parlemen Iran-Indonesia Mahdi Zahedi, Deputi Bidang Politik Kantor Kepresidenan Iran Mohammad Jamshidi, serta CDA ad interim Kedutaan Besar Iran di Jakarta Mahdi Rounadh.

Presiden Iran mengunjungi Indonesia pada 23 hingga 24 Mei untuk



memenuhi undangan Presiden RI Joko Widodo. Sebelum bertemu dengan Pimpinan MPR, Presiden Iran telah bertemu dengan Presiden RI Joko Widodo dan Pimpinan DPR RI.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan menuturkan, Indonesia menyambut baik tawaran peningkatan hubungan kerjasama dengan Iran. Terlebih, Indonesia dan Iran telah membangun hubungan diplomatik sejak 1950. Hubungan yang baik antara Indonesia dan Iran, bahkan tercatat telah dimulai sejak 1.000 tahun lalu oleh Kerajaan Persia dan kerajaan-



kerajaan kuno Indonesia.

"Hubungan people to people contact antara Iran dan Indonesia telah terjalin sejak masa lampau. Sejarah mencatat, para saudagar Iran (Persia) sejak ribuan tahun yang lalu sudah melalui "jalur sutra" atau "jalur rempah" guna menjelajahi Nusantara," kata Bamsuet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan

Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini memaparkan, Presiden Iran sepakat dengan Indonesia untuk terus mendukung perjuangan rakyat Palestina. Termasuk mendukung hak rakyat Palestina untuk menentukan nasibnya sendiri, dan menyerukan kepada masyarakat internasional untuk berkomitmen pada "solusi dua negara,"

berdasarkan parameter yang disepakati secara internasional.

"MPR merasa prihatin sekaligus merasa khawatir atas kekerasan yang terus terjadi di Palestina. Karenanya, MPR mendukung penyelesaian konflik secara damai, dengan menghormati prinsip-prinsip Piagam PBB dan penegakan hukum internasional," urai Bamsuet.

Ketua Dewan Pembina SOKSI dan Wakil Ketua Umum FKPPi ini menambahkan, Presiden Iran mengundang Parlemen Indonesia, yakni MPR RI dan DPR RI untuk berkunjung ke Iran. Kunjungan dimaksudkan agar Pimpinan MPR dan DPR bisa melihat langsung berbagai kemajuan yang telah dicapai Iran selama dalam tekanan negara-negara Barat.

"Pimpinan MPR menyambut baik tawaran tersebut. Namun, karena saat ini tengah disibukkan oleh persiapan Pemilu di tanah air, kita belum dapat memenuhi tawaran itu dalam waktu dekat. Kemungkinan setelah Pemilu baru kita bisa melakukan kunjungan balasan ke Iran untuk lebih meningkatkan kerjasama bilateral antara Indonesia dan Iran," pungkas Bamsuet. □

Rapat Pimpinan MPR RI

Bamsoet Dorong Badan Pengkajian Selesaikan Kajian Utusan Golongan



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, menuturkan, dalam waktu dekat Badan Pengkajian MPR RI diharapkan bisa segera menyelesaikan kajian tentang urgensi menghadirkan kembali Utusan Golongan dalam keanggotaan MPR RI, sebagaimana telah ditugaskan dalam Rapat Pimpinan MPR RI beberapa waktu lalu. Sebagai tindak lanjut atas aspirasi dari berbagai organisasi kemasyarakatan, seperti Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Majelis Tinggi Agama Konghucu (MATAKIN), dan berbagai kelompok masyarakat lainnya, yang mendukung agar Utusan Golongan kembali dihadirkan dalam keanggotaan MPR RI.

Setelah sebelumnya pada Februari 2023, Pimpinan MPR RI telah menerima hasil kajian Badan Pengkajian MPR RI terkait pentingnya MPR RI mengeluarkan Ketetapan MPR RI (TAP MPR RI) tentang Penetapan Pasangan Capres-Cawapres Pemenang Pemilu Sebagai Presiden dan Wakil Presiden

Republik Indonesia untuk periode masa jabatan lima tahun ke depan. Sehingga Presiden dan/atau Wakil Presiden memiliki dasar hukum yang lebih kuat berupa Ketetapan MPR RI, bukan lagi semata berdasarkan Berita Acara Pelantikan.

Pada Rapat Pimpinan MPR RI kali ini, pimpinan MPR RI juga memberikan tambahan penugasan kepada Badan Pengkajian MPR RI untuk melakukan berbagai kajian. Di antaranya, mengkaji urgensi keberadaan TAP MPR RI yang





FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

menetapkan perubahan terhadap konstitusi, mengingat setelah empat kali dilakukan amandemen konstitusi, tidak ada TAP MPR RI yang menetapkan perubahan konstitusi tersebut.

“Badan Pengkajian MPR RI juga akan melakukan kajian tentang sejauh mana kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY) sesuai konstitusi, sebagai tindak lanjut atas Penataan Kekuasaan Kehakiman yang merupakan bagian dari Tujuh Rekomendasi MPR RI 2014-2019 yang diberikan kepada MPR RI periode 2019-2024,” ujar Bamsuet usai memimpin Rapat Pimpinan MPR RI, di Jakarta, Kamis

(11/5/23).

Pimpinan MPR RI yang hadir dalam Rapim MPR RI itu diantaranya, Ahmad Basarah, Jazilul Fawaid, Syarif Hasan, Arsul Sani, dan Fadel Muhammad.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, Badan Pengkajian MPR RI juga akan melakukan berbagai kajian terkait Pemilu. Di antaranya kajian tentang batas umur seseorang diperbolehkan maju sebagai Capres-Cawapres, apakah perlu diatur secara spesifik atau tidak. Serta kajian tentang sistem Pemilu terbuka dan tertutup beserta

plus dan minusnya. Kedua hasil kajian tersebut didasarkan pada konstitusi, sehingga bisa memberikan arah yang jelas bagi perkembangan kehidupan demokrasi kebangsaan di Indonesia.

Wakil Ketua Umum FKPPi dan Pemuda Pancasila serta Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, Rapat Pimpinan MPR RI juga memutuskan pelaksanaan Rapat Gabungan untuk mempersiapkan Sidang Paripurna MPR RI dalam rangka Pembentukan Panitia Ad Hoc untuk menyiapkan rancangan Keputusan MPR RI terkait Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) ditunda pelaksanaannya hingga tahun depan, selesai pelaksanaan Pemilu 2024. Sehingga situasi lebih kondusif dan tenang.

“Keberadaan PPHN sangat penting agar kesinambungan pembangunan di Indonesia bisa berjalan dengan baik dari satu periode pemerintah ke periode pemerintahan penggantinya. Sekaligus mempersiapkan Indonesia dalam menjawab megatrend dunia yang meliputi kemajuan teknologi, dinamika geopolitik dan geoekonomi global, demografi dunia, urbanisasi global, perdagangan internasional, keuangan global, persaingan sumber daya alam dan perubahan iklim, yang semuanya akan berpengaruh pada pembangunan Indonesia,” pungkas Bamsuet. □



Diskusi Publik Universitas Muhammadiyah Jakarta

Ahmad Basarah: Politik Identitas Lahirkan Pembelahan Masyarakat

Politik identitas bisa membelah masyarakat dalam waktu lama. Ini terjadi karena politik identitas adalah bagian dari strategi politik itu sendiri yang fokus mencari perbedaan di tengah masyarakat.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

POLITIK identitas bisa membelah masyarakat dalam waktu lama. Ini terjadi karena politik identitas adalah bagian dari strategi politik itu sendiri yang fokus mencari perbedaan di tengah masyarakat.

Wakil Ketua MPR, Ahmad Basarah, mengingatkan, politik identitas sangat berbahaya jika diterapkan. Sebab, politik ini dapat melahirkan oposisi biner yang memperhadapkan pemerintah dengan masyarakat, atau masyarakat dengan masyarakat lain yang merasa saling berbeda.

“Politik identitas bisa membelah masyarakat dalam waktu yang lama. Ini terjadi karena politik identitas adalah bagian dari strategi politik itu sendiri yang fokus mencari perbedaan di tengah masyarakat, lalu memanfaatkan primordialisme masyarakat untuk menarik simpati politik,” tegas Ahmad Basarah dalam Diskusi Publik “Problematika Politik Identitas Jelang Pemilu 2024” di Universitas Muhammadiyah Jakarta

(UMJ), Rabu (17/5/23).

Sebagai contoh, Ketua Fraksi PDI Perjuangan merujuk pada Pemilu 2019, ketika narasi Partai Allah versus Partai Setan mudah ditemukan, atau Pilpres 2019 disamakan dengan Perang Badar di zaman

Rasulullah SAW. “Ini tentu tidak benar, sebab Perang Badar adalah pertempuran antara umat Islam melawan kaum musyrik penyembah berhala. Padahal masyarakat Indonesia tak ada yang menyembah berhala, malah mayoritas masyarakat adalah Mus-





FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

lim,” tegas Ahmad Basarah dalam diskusi yang digelar oleh FISIP Magister Ilmu Komunikasi UMJ itu.

Ketua DPP PDI Perjuangan itu juga mengingatkan, demi ambisi ingin memenangkan kontestasi pemilu lewat jalur pintas yang tidak elegan, para pelaku politik identitas bahkan rela melakukan kampanye hitam lewat berita-berita bohong, hoaks, fitnah, dan kabar-kabar menyesatkan lainnya asal tujuan mereka tercapai.

“Mereka tidak mementingkan politik kebangsaan, tidak peduli tindakan mereka mengancam persatuan bangsa atau tidak, pokoknya asal menang, segala cara bakal mereka lakukan. Padahal, berita bohong dan fitnah yang mereka sebar membekas di hati masyarakat bertahun-tahun, bahkan sampai

Pemilu telah lama usai,” tegas Ahmad Basarah.

Ketua Dewan Pakar Persatuan Alumni GMNI ini menambahkan, kini penggunaan narasi politik identitas telah sampai pada fase yang sangat sensitif ketika relasi agama dan negara dipersoalkan lagi. Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibenturkan dengan ideologi khilafah, bahkan sangat terasa ada “invisible hand” yang berupaya mengadu domba kaum nasionalis dengan kelompok Islam, Tentara Nasional Indonesia (TNI) versus Polri.

Untuk itu, Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Malang Raya ini mengajak semua aktivis partai politik dari partai apa pun untuk memaksimalkan Undang-undang No. 2 tahun 2011 tentang Partai Politik. “Dalam undang-

undang itu disebutkan bahwa parpol harus melakukan pendidikan politik, menciptakan iklim persatuan dan kesatuan, menyerap dan menyalurkan aspirasi rakyat, mengamalkan Pancasila, serta memelihara keutuhan NKRI,” jelas Ahmad Basarah.

Doktor bidang hukum lulusan Universitas Diponegoro Semarang ini juga mengimbau semua pihak kembali pada UU Pemilu No. 7/2017, khususnya Pasal 280 ayat (1) huruf c, yang menegaskan pelaksana, peserta, dan tim kampanye dilarang menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan atau peserta pemilu yang lain.

“Jika semua undang-undang ini dimaksimalkan, termasuk undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik juga melarang penyebaran informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat, maka dengan sendirinya kita semua sudah melakukan kontra narasi terhadap digunakannya politik identitas itu,” tegas Ahmad Basarah.

Selain Ahmad Basarah, tampil dalam diskusi publik ini Peneliti Ahli Utama BRIN, Siti Zuhroh, Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya, juru bicara PKS Muhammad Iqbal, Rektor UMJ Mamun Murod, serta pengamat politik Rocky Gerung. Dalam orasinya, Siti Zuhroh juga mengingatkan bahaya politik identitas, apalagi jika identitas yang dieksploitasi adalah isu-isu yang berkaitan dengan agama. □



Rapat Pimpinan MPR RI

Janedjri M. Gaffar, Plt. Sesjen MPR RI Menggantikan Ma'ruf Cahyono

Karena memasuki masa pensiun sejak 3 Februari 2023, Ma'ruf Cahyono diberhentikan dengan hormat sebagai Sekretaris Jenderal (Sesjen) MPR, dan Janedjri M. Gaffar ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Sesjen MPR RI.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KARENA memasuki masa pensiun sejak 3 Februari 2023, Ma'ruf Cahyono diberhentikan dengan hormat sebagai Sekretaris Jenderal (Sesjen) MPR, dan Janedjri M. Gaffar ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Sesjen MPR RI.

Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, melakukan serah terima jabatan Sekretaris Jenderal MPR RI dari Maruf Cahyono kepada Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal MPR RI Janedjri M. Gaffar. Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 71/TPA Tahun 2023 tentang Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI, memberhentikan dengan hormat Maruf Cahyono karena telah memasuki masa pensiun, terhitung sejak

tanggal 3 Februari 2023.

"Kami seluruh Pimpinan MPR mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi

yang tinggi kepada Pak Maruf Cahyono atas segala kinerja, prestasi dan dedikasi selama menjabat sebagai Sekretaris Jenderal MPR





dari tahun 2016-2023. Semoga setelah purna tugas dari MPR, Pak Maruf Cahyono dapat terus menyumbangkan tenaga dan pikiran bagi kemajuan bangsa dan negara,” ujar Bamsoet usai memimpin Rapat Pimpinan MPR RI di Jakarta, Selasa (23/5/23).

Hadir, antara lain Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah, Ahmad Muzani, Lestari Moerdijat, Jazilul Fawaid, Syarifuddin Hasan, Arsul Sani, dan Fadel Muhammad.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan menuturkan, Presiden RI telah menerbitkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72/TPA Tahun 2023 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal MPR RI kepada Janedjri M. Gaffar. Saat ini Janedjri M.L Gaffar masih tercatat sebagai Deputy Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Kemenko Polhukam.

“Pimpinan MPR meminta agar Plt. Sekretaris Jenderal MPR agar segera menyelenggarakan pemilihan Sekretaris Jenderal MPR yang baru. Selain, mengisi jabatan-jabatan struktural yang masih kosong atau belum diisi oleh pejabat definitif melalui seleksi terbuka atau open bidding, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” kata Bamsoet.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menambahkan, Pimpinan MPR RI berencana akan mengundang para pimpinan partai politik dalam forum silaturahmi kebangsaan sebelum Pemilu. Dalam forum silaturahmi kebangsaan tersebut akan dibahas tentang mewujudkan Pemilu damai dan bahagia, serta menolak kampanye hitam serta politik identitas.

“Kita berharap, Pemilu 2024 bebas dari politik identitas dan kampanye hitam. Sebab, politik identitas sangat berbahaya bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Kita pernah merasakan itu dan residunya masih ada sampai hari ini. Ke depan kita harus bicara soal persaingan yang sehat. Siap bersaing dan siap bersanding tanpa membawa isu-isu yang berpotensi memecah belah di antara sesama anak bangsa,” pungkaskan Bamsoet. □

Pelantikan Pengurus Wanita Tani Indonesia

Ahmad Muzani: Dukungan Pemerintah dan Seluruh Elemen Bangsa Sangat Dibutuhkan Petani

Pelantikan kepengurusan Wanita Tani diharapkan akan memaksimalkan kontribusi untuk kesejahteraan petani.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

WAKIL Ketua MPR RI, H.Ahmad Muzani, memberikan ucapan selamat dan penghargaan atas dilantikannya kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Wanita Tani Indonesia HKTI periode 2022-2027. Acara pelantikan yang dilaksanakan secara luring dan daring ini digelar di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/5/2023).

Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo,

didaulat membuka secara resmi acara pelantikan. Terlihat hadir beberapa undangan kehormatan, antara lain: Anggota DPR Fraksi Gerindra Jefry Romdonny dan Dr. Endang Setyawati Thohari, DESS, Ketua Umum Kowani Giwo Rubianto Wiyogo, para Pimpinan DPP serta anggota Wanita Tani Indonesia HKTI.

“Saya ucapkan selamat dan penghargaan atas dikukuhkannya kepengurusan wanita tani Indonesia, sebuah organisasi di bawah HKTI,” ujar Muzani. “Acara pelantikan ini

sangat penting untuk konsolidasi kepentingan pertanian kita,” ujar Sekjen Partai Gerindra ini, yang lalu diikuti proses pelantikan secara online.

Kiprah dan peran petani Indonesia, lanjut Ahmad Muzani, sangat penting untuk kemajuan negara. “Para petani adalah penyemangat kita, karena merekalah yang berjuang dan bekerja keras setiap hari, menjaga ketersediaan pangan seluruh rakyat Indonesia agar tercukupi,” ungkap dia.

Untuk itu, tegasnya, dukungan dan support dari semua yang peduli kepada kaum tani menjadi sangat penting. Dukungan dan support dari pemerintah dan seluruh elemen bangsa betul-betul sangat dibutuhkan petani, agar tumbuh kembang bidang pertanian terutama kualitas dan kuantitas produk pertanian semakin bagus dari masa ke masa, sehingga kesejahteraan petani pun akan terangkat.

“Maka dari itulah, saya berharap semoga kiprah kepengurusan organisasi Wanita Tani Indonesia yang baru saja dikukuhkan akan memberi bakti yang makin nyata buat para petani kita,” tandasnya. □



DER

Pimpinan MPR Bertemu Presiden Iran

Syarief Hasan: Perkuat Kerjasama Kedua Negara

“Semoga kehadiran Presiden Iran, Ebrahim Raisi, ke Indonesia semakin memperkuat kerjasama yang saling menguntungkan antarkedua negara,” ujar Wakil Ketua MPR RI, Syarief Hasan.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

WAKIL Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan, menyambut langsung kunjungan Presiden Iran, Ebrahim Raisi, di Kompleks MPR/DPR RI Senayan, Jakarta, pada Selasa (23/5/2023). Pertemuan ini berlangsung antara Presiden Iran dengan Pimpinan MPR RI.

Syarief Hasan menyebut, Iran merupakan salah satu mitra strategis Indonesia. “Kita memahami bersama bahwa Iran menjadi salah satu mitra negara Indonesia, utamanya di bidang perdagangan, ilmu pengetahuan dan teknologi, hingga pengembangan dunia farmasi,” jelas Syarief Hasan.

Syarief Hasan dalam kesempatan tersebut

menyampaikan harapannya untuk kerjasama Indonesia dan Iran. “Data tahun 2022 menunjukkan, nilai kerja sama perdagangan Indonesia dan Iran tercatat mencapai USD 257 Juta, meningkat 23% dari tahun 2021. Saya berharap, kerjasama ini semakin ditingkatkan untuk mendukung perdagangan Indonesia,” ungkap Syarief Hasan.

Lebih lanjut, dia menyampaikan pentingnya kerjasama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. “Kerjasama bidang teknologi ini perlu dilakukan agar terjadi transfer of technology antarkedua negara. Kita mengakui bahwa Iran adalah salah satu negara yang saat ini sangat progresif dan maju dalam bidang teknologi, seperti energi nuklir, perkeretaapian, dan berbagai teknologi lainnya,” ujarnya.

Syarief Hasan juga mendukung komitmen Indonesia dan Iran terkait perjuangan rakyat Palestina. “Saya mengapresiasi komitmen Pemerintah Iran bersama Indonesia yang terus memberikan dukungan terhadap rakyat Palestina. Kita harus menghadirkan perdamaian dunia dan mendukung Palestina yang tengah berjuang melawan penindasan dan penjajahan,” ungkap Syarief Hasan.

Ia juga mengapresiasi dukungan yang sama terhadap krisis Afghanistan. “Saya juga mengapresiasi pertemuan Presiden Iran dan Indonesia yang sepakat membantu penyelesaian masalah krisis yang tengah terjadi di Afghanistan. Ini adalah bentuk komitmen bersama sebagai bangsa dunia untuk menghadirkan perdamaian dan kesejahteraan dunia,” ungkap Syarief Hasan.

Politisi Senior Partai Demokrat ini berharap, kerjasama Indonesia dan Iran semakin terjalin. “Semoga kehadiran Presiden Iran, Ebrahim Raisi, ke Indonesia semakin memperkuat kerjasama yang saling menguntungkan antarkedua negara. Kami akan terus mendorong agar semakin banyak kerjasama yang terjalin,” tegas Syarief Hasan. □



Penetapan Pidato Bung Karno di PBB Sebagai Memory of the World

Ahmad Basarah: Dunia Mengakui Pancasila Sebagai Ideologi Internasional

Berdasarkan penetapan itu, Basarah meminta pemerintah dan bangsa Indonesia untuk menindaklanjutinya dengan menyosialisasikan Pidato Bung Karno di PBB tersebut sebagai bagian dari penguatan Pancasila.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

WAKIL Ketua MPR RI, Dr. Ahmad Basarah, menyambut gembira penetapan Pidato Bung Karno di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 1960 sebagai *Memory of the World* (MoW) oleh UNESCO. Penetapan tersebut dilakukan dalam Sidang Pleno oleh Executive Board UNESCO pada

10-24 Mei 2023.

Pidato Bung Karno di PBB ditetapkan sebagai MoW bersama dengan arsip Gerakan Non-Blok Pertama (GNB I) di Beograd tahun 1961, serta naskah Hikayat Aceh abad ke-17 M.

Basarah menyampaikan ucapan terima kasih kepada UNESCO atas penetapan

tersebut. Menurutnya, hal ini sudah semestinya, sebab pidato Bung Karno yang berjudul *To Build the World A New* (Membangun Dunia Kembali) yang disampaikan di PBB pada 30 September 1960 memang merupakan memori dunia.

“Dalam pidato tersebut, Bung Karno mencetuskan manifesto intelektual, politik dan ideologi yang bersifat internasional, bahwa dunia harus dibangun kembali. Pembangunan dunia kembali disebabkan oleh bangkitnya kemerdekaan di negara Asia-Afrika, sebagai perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme,” demikian penjelasan Basarah.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa ajakan Bung Karno untuk membangun dunia kembali didasarkan pada Pancasila. Menurut Basarah, di forum dunia yang dihadiri para pemimpin dunia itu, Bung Karno mengenalkan dan menawarkan Pancasila sebagai ideologi internasional. “Kalau kita simak pidato tersebut, kita seperti menyaksikan kembali api Pancasila yang Bung Karno pidatikan di 1 Juni 1945 di Sidang BPUPK, di forum internasional,” ungkap Basarah.

Menurut Basarah, di pidato tersebut, Bung Karno menyampaikan argumentasi kenapa setiap negara perlu mengadopsi Pancasila sebagai ideologi kenegaraannya. “Bung Karno membuktikan bahwa nilai-nilai Pancasila tidak hanya bersifat nasional *ke-Indonesiaan*, tetapi universal dan internasional. Ketuhanan Yang Maha Esa adalah nilai universal, kemanusiaan universal, nasionalisme universal, demokrasi universal, dan keadilan sosial universal. Khusus nasionalisme, Bung Karno menjelaskan bahwa nilai ini universal, sebab nasionalisme dianut oleh semua negara modern,” demikian penjelasan Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Hubungan Internasional ini.

“Tidak hanya menjelaskan Pancasila



sebagai ideologi universal dan internasional, Bung Karno bahkan mengusulkan pada Sidang Umum PBB, agar Pancasila dimasukkan ke dalam Piagam PBB. Usulan tersebut mendapatkan sambutan meriah dari para pemimpin dunia. Sambutan itu menunjukkan bahwa Pancasila diakui oleh dunia sebagai nilai-nilai yang bersifat universal,” tambah penulis buku Bung Karno, Islam dan Pancasila (2017) ini.

Berdasarkan penetapan ini maka Basarah meminta pemerintah dan bangsa Indonesia untuk menindaklanjutinya dengan menyosialisasikan Pidato Bung Karno di PBB tersebut sebagai bagian dari penguatan

Pancasila. “Bung Karno sudah lama mengenalkan Pancasila di dunia internasional. Tidak hanya di Sidang Umum PBB tahun 1960, tetapi juga di Kongres Amerika Serikat dan Universitas Heidelberg, Jerman Barat, pada tahun 1956. Upaya Bung Karno ini menjadi bagian dari diplomasi internasional untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang membangun perdamaian dunia. Penetapan UNESCO tersebut juga mencerminkan pengakuan dunia terhadap jasa Bung Karno yang harus kita pahami makna dan signifikansinya,” tegas Basarah.

Lebih lanjut Basarah menyatakan agar

bangsa Indonesia senantiasa memahami dan memperkuat Pancasila sesuai dengan maksud para pendiri bangsa pembentuk Pancasila. “Penggali Pancasila adalah Bung Karno, yang bersama para pendiri bangsa lainnya merumuskan Pancasila. Menjelang momentum peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni nanti, saatnya kita kuatkan Pancasila berdasarkan maksud para perumusannya, sebab ideologi bangsa ini terbukti berkiprah baik secara nasional maupun internasional,” ungkap Basarah, sebagaimana ia sampaikan pula di Talkshow Gebyar Wawasan Kebangsaan di Lemhanas, Jakarta, Rabu (24/5/23). □

Kunjungan Siswa-siswi Sekolah HighScope

Lestari Moerdijat: Generasi Muda Harus Terus Memelihara Persatuan

Keterlibatan kaum muda menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sangat penting untuk mewujudkan pondasi pembangunan yang kuat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

NEGARA kita dibentuk atas dasar kesepakatan dan gagasan dari para pemuda, sehingga melahirkan Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 yang merupakan cikal bakal terbentuknya NKRI,” kata Wakil Ketua MPR

RI, Lestari Moerdijat, saat menerima kunjungan 275 siswa-siswi Sekolah HighScope Indonesia Program Sekolah Menengah Atas (SMA) di gedung DPR/MPR Senayan, Selasa (16/5).

Hadir dalam acara tersebut M Farhan

(Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi NasDem) dan Dr. Dossy Iskandar Prasetyo, S.H., M.H. (Wakil Ketua Kajian Komisi Ketatanegaraan MPR RI) yang ikut menyosialisasikan tugas dan kewenangan Parlemen dan wakil rakyat, sekaligus



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

ketatanegaraan di Indonesia.

Apalagi, ujar Lestari, mengutip UN Youth Report, saat ini terdapat 1,2 miliar anak muda berusia 15 hingga 24 tahun, yang merupakan 16% dari populasi global.

Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2022, tambah Rerie—sapaan akrab Lestari—terdapat 68,82 juta jiwa penduduk Indonesia masuk kategori pemuda dengan besaran persentasi

mencapai 24% dari total penduduk.

Menurut Rerie, yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu, semangat mewujudkan persatuan yang ditunjukkan para pemuda di masa lalu harus terus digelorakan dan diwujudkan oleh generasi muda saat ini. Karena, tegas Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, di tangan para pemudalah nasib bangsa dan negara ini ditentukan di masa datang.

Pada kesempatan itu Rerie juga

mendorong agar para pemuda mau berkiprah di dunia politik, untuk mengubah citra politik yang dinilai rendah oleh masyarakat. Kalau orang baik tidak mau berpolitik, tambahnya, dunia politik akan diisi orang-orang yang tidak bisa mengemban amanah.

“Tetap jaga semangat untuk memperkokoh NKRI,” pesan Rerie di akhir acara, seiring berkumandang lagu Bendera dari Band Coklat di ruang Nusantara IV gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat itu. □



Pimpin Rapim MPR RI

Bamsoet Minta Hormati Putusan PTUN

Berdasarkan salinan putusan Nomor 398/05/2022/PTUN.JKT tertanggal 3 Mei 2023, PTUN Jakarta menolak pemecatan Fadel Muhammad sebagai Wakil Ketua MPR dari unsur DPD RI digantikan oleh Anggota DPD RI Tamsil Linrung.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, menuturkan, Pimpinan MPR RI menghormati putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang mengabulkan gugatan Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad. Majelis Hakim PTUN Jakarta dalam putusan perkara Nomor 398/G/2022/PTUN JKT membatalkan Surat Keputusan DPD Nomor 2/DPDRI/1/2-22-2023 tentang Pergantian Pimpinan MPR dari Unsur DPD Tahun 2022-2024.

“Agar situasi kembali sejuk, kita mendorong agar Pak Fadel bisa segera melakukan silaturahmi kepada Pimpinan Fraksi di MPR RI untuk menyosialisasikan Keputusan PTUN tersebut. Pada prinsipnya, Pimpinan MPR RI menghormati putusan pengadilan, sekaligus menghormati sikap lembaga DPD RI dan tidak akan mencampuri urusan internal DPD RI,” ujar Bamsoet usai memimpin Rapat Pimpinan MPR RI, di Jakarta, Kamis (11/5/23).

Pimpinan MPR RI yang hadir, diantaranya

Ahmad Basarah, Jazilul Fawaid, Syarief Hasan, Arsul Sani, dan Fadel Muhammad.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini, menjelaskan, sebelumnya Sidang Paripurna ke-2 DPD RI Masa Sidang I Tahun Sidang 2022-2023 memutuskan pergantian Wakil Ketua MPR dari unsur DPD RI, yakni Fadel Muhammad diganti oleh Tamsil Linrung. Rapat dipimpin Ketua DPD RI, A.A. LaNyalla Mahmud Mattalitti. Atas putusan tersebut, Fadel Muhammad menempuh perlawanan hukum terhadap Ketua DPD LaNyalla Mahmud Mattalitti.

“Berdasarkan salinan putusan Nomor 398/05/2022/PTUN.JKT tertanggal 3 Mei 2023 yang ditandatangani panitera Muhammad SH, PTUN Jakarta menolak pemecatan Fadel Muhammad sebagai Wakil Ketua MPR dari unsur DPD RI digantikan oleh Anggota DPD RI Tamsil Linrung. Dalam putusan PTUN, tergugat wajib mencabut surat keputusan tergugat berupa Surat Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 2/DPDRI/1/2022-2023 tentang Penggantian Pimpinan MPR dari unsur DPD tahun 2022-2023, tertanggal 18 Agustus 2022,” kata Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menjelaskan, dengan adanya putusan PTUN tersebut, pimpinan MPR lainnya meminta Fadel Muhammad tetap menjadi Pimpinan MPR dari unsur DPD. Selain, meminta Fadel Muhammad tidak terganggu dalam menjalankan tugas sebagai Pimpinan MPR terkait dengan surat pergantian Wakil Ketua MPR dari DPD sebelumnya.

“Rapat Pimpinan MPR juga meminta Fadel Muhammad untuk bertemu dengan para pimpinan MPR satu per satu guna menjelaskan hasil keputusan PTUN Jakarta. Pimpinan MPR tetap solid untuk terus menjalankan tugas-tugas kebangsaan hingga akhir masa jabatan pada Oktober tahun depan,” pungkas Bamsoet. □



Aspirasi Pemulihan Wewenang MPR

Bamsoet Dukung Pernyataan Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri

Agar Indonesia memiliki kembali sistem ketatanegaraan yang benar dengan mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi Negara.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mendukung pernyataan Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri agar Indonesia memiliki kembali sistem ketatanegaraan yang benar sebagaimana para pendiri bangsa ini telah meletakkannya dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 pasca Indonesia merdeka.

Bamsoet mendukung gagasan Megawati agar posisi MPR dikembalikan menjadi lembaga tertinggi negara. Sejak dilakukan amendemen sekali dalam empat tahap UUD 1945, MPR bukan lagi lembaga tertinggi negara yang menjalankan kedaulatan rakyat. MPR menjadi lembaga tinggi negara yang sejajar dengan lembaga tinggi negara lainnya.

“Saya sepakat dengan apa yang disampaikan Presiden ke-5 Republik Indonesia Ibu Megawati Soekarnoputri agar posisi MPR dikembalikan sebagai lembaga tertinggi negara. Ibu Megawati mengaku sempat tidak

terima saat MPR disamakan kedudukannya dengan DPR dan DPD. Menurut Ibu Megawati, seharusnya kedudukan MPR tetap setingkat lebih tinggi dibanding lembaga tinggi lainnya,” ujar Bamsoet usai menghadiri Peluncuran

58 Judul Buku Dalam Rangka Hari Jadi ke-58 Lemhannas di Jakarta, Sabtu (20/5/23).

Hadir, antara lain Megawati Soekarnoputri, Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto,





FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, Menkopolhukam Mahfud MD, Menkumham Yasonna Laoly, MenPAN-RB Abdullah Azwar Anas, Menhub Budi Karya Sumadi, serta Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menuturkan, ketika negara-bangsa dewasa ini terus menghadapi berbagai tantangan dan ancaman ideologi yang coba menggoyahkan fondasi keutuhan NKRI dan Pancasila, gagasan atau pemikiran tentang urgensi penguatan aspek ketatanegaraan menjadi sangat jelas relevansinya.

Sebagai lembaga tinggi negara yang berwenang mengubah UUD NRI Tahun 1945, mengangkat dan memberhentikan presiden/wakil presiden sangat relevan jika MPR

kembali diberi amanat melaksanakan kedaulatan rakyat sepenuhnya seturut UUD 1945. Dan, atas nama kedaulatan rakyat pula, MPR pun kembali berwenang menerbitkan Ketetapan (Tap) MPR yang mengikat (regeling). Terutama kebutuhan akan Tap MPR untuk merespons dan menangani krisis politik atau krisis konstitusi.

“MPR pasca amendemen UUD 1945 tidak bisa lagi membuat ketetapan-ketetapan yang mengikat atau regeling. Bahkan, pada momentum pelantikan presiden dan wakil presiden sekali pun, MPR tidak lagi memiliki kewajiban membuat ketetapan tentang pelantikan itu. Melainkan hanya mengeluarkan berita acara pelantikan,” kata Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Alumni Doktor Ilmu Hukum UNPAD ini menegaskan, faktor

minimnya peran dan fungsi MPR pada aspek hukum ketatanegaraan inilah yang menjadi dasar agar peran dan fungsi MPR RI diperkuat kembali. Penguatan itu hendaknya ditandai dengan memulihkan atau mengembalikan wewenang konstitusional MPR membuat ketetapan yang mengikat atau regeling. Apalagi, hierarki perundang-undangan sudah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yakni UUD, Ketetapan MPR, Undang-Undang, Perpu, hingga Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah (Perda).

“Tidak ada tujuan lain di balik aspirasi pemulihan atau penguatan wewenang MPR. Satu-satunya tujuan strategis di balik aspirasi ini adalah menghadirkan sistem hukum ketatanegaraan yang efektif, solutif dan komprehensif agar negara-bangsa selalu dimampukan mengelola dan mengatasi aneka krisis. Termasuk krisis politik ataupun krisis konstitusi,” tandas Bamsoet.

Dosen Tetap Fakultas Hukum, Ilmu Sosial & Politik (FHISIP) Universitas Terbuka dan Universitas Perwira Purbalingga (UNPERBA) ini menambahkan, sebagai lembaga tinggi negara yang berwenang mengubah UUD NRI Tahun 1945, mengangkat dan memberhentikan presiden/wakil presiden, sangat relevan jika MPR RI kembali diberi kewenangan melaksanakan kedaulatan rakyat sepenuhnya sesuai UUD NRI Tahun 1945. Kewenangan subjektif superlatif itu penting berada di tangan MPR jika negara dihadapkan pada situasi kebuntuan politik antarlembaga negara atau antarcabang kekuasaan. Misalnya, kebuntuan politik antara lembaga kepresidenan (pemerintah/eksekutif) dengan lembaga DPR (legislatif) atau kebuntuan politik pemerintah dan DPR dengan lembaga Mahkamah Konstitusi (yudikatif).

“Siapa yang berhak memutuskan jika terjadi suatu kondisi *force majeure* atau kahar fiscal dalam skala besar, namun terjadi kebuntuan antara Presiden dan DPR? Lalu, jika terjadi perseteruan antara Presiden (pemerintah) dengan DPR, sementara negara masih dalam situasi kedaruratan yang tinggi, siapa yang menengahi? Menurut saya yang paling tepat adalah MPR sebagai representasi pemegang kedaulatan rakyat tertinggi di Indonesia,” pungkask Bamsoet. □



Bertemu Sri Sultan Hamengku Buwono X

Fadel Muhammad: Jaga Stabilitas Politik di Tahun Politik

Sri Sultan Hamengku BuwonoX berpesan, agar kita menjaga stabilitas politik ini untuk kepentingan bangsa.

WAKIL Ketua MPR, Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad, mengadakan pertemuan dengan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X dalam kunjungan kerja ke Provinsi D.I. Yogyakarta, Senin (22/5/2023). Sri Sultan Hamengku Buwono X menerima Fadel Muhammad dan melakukan pertemuan empat mata di kantor Gubernur.

Fadel Muhammad tiba di kantor Gubernur

Muhammad masih menjabat sebagai Gubernur Gorontalo.

“Waktu itu sedang ramai-ramainya calon presiden. Ngarso Dalem disebut-sebut dalam bursa capres dan cawapres,” gurau Fadel Muhammad.

Sri Sultan menimpali gurauan Fadel Muhammad. “Ah..bukan saya,” keduanya pun tersenyum. Sri Sultan kemudian mengajak Fadel Muhammad ke dalam

pembangunan daerah. “Kita juga membicarakan masalah nasional dan pembangunan daerah,” ujar Wakil Ketua MPR dari unsur DPD ini.

Namun, Fadel Muhammad menggarisbawahi bahwa inti penting dari pembicaraan dengan Sri Sultan adalah adanya keinginan dan harapan untuk menjaga stabilitas politik di tahun politik ini.

“Yang paling inti adalah bahwa Ngarso



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

sekitar pukul 13.45. Sri Sultan Hamengku Buwono X kemudian menemui Fadel Muhammad. Sebelum memasuki ruang pertemuan, Fadel Muhammad menyerahkan sebuah bingkai foto besar kepada Sri Sultan Hamengku Buwono X.

Foto itu merupakan foto Sri Sultan Hamengku Buwono X beserta istri, G.K.R. Hemas, yang diapit Fadel Muhammad dan istri Hana Hasanah Shahab. Dalam foto itu, keempatnya mengenakan pakaian adat.

“Ini foto ketika Ngarso Dalem berkunjung ke Gorontalo, sekitar tahun 2007, pada saat menjelang Pemilu tahun 2009,” ujar Fadel Muhammad ketika menyerahkan foto berbingkai besar itu. Saat itu, Fadel

ruangan untuk melakukan pembicaraan tertutup. Selama kurang lebih satu setengah jam keduanya melakukan pertemuan empat mata.

“Kita ngobrol-ngobrol, cerita-cerita masa lalu, waktu saya menjadi Gubernur Gorontalo,” kata Fadel Muhammad usai melakukan pertemuan tertutup. Fadel Muhammad menjadi Gubernur Gorontalo selama dua periode (2001-2006 dan 2006-2011).

Selain bercerita tentang masa lalu ketika menjadi gubernur, Fadel Muhammad juga mengungkapkan, pertemuan dengan Sri Sultan juga membahas tentang masalah-masalah kebangsaan dan masalah-masalah

Dalem ingin agar kita menjaga stabilitas politik ini untuk kepentingan bangsa,” tutur Fadel Muhammad.

Menurut Fadel Muhammad, pesan dan harapan Sri Sultan untuk menjaga stabilitas politik itu agar disampaikan kepada Pimpinan MPR lainnya. “Sebagai Wakil Ketua MPR saya agar menyampaikan pesan itu kepada teman-teman lainnya (pimpinan MPR) di MPR,” ujarnya.

“Ngarso Dalem berpesan untuk menjaga terus stabilitas politik, persatuan dan kesatuan kita karena bangsa kita terlalu besar bukan cuma Yogyakarta saja. Itu pesan yang paling utama kepada Pimpinan MPR lainnya,” pungkasnya. □

Terima Putri Kerajaan Bahrain

Bamsoet Dorong Peningkatan Kerjasama Indonesia - Bahrain

“Saya meminta bantuan Putri Kerajaan Bahrain, Her Highness Shaikha Jawaher Bint Khalifa al Khalifa, untuk mendorong lebih banyak investasi Bahrain di Indonesia.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, menerima kunjungan Putri Kerajaan Bahrain, Her Highness Shaikha Jawaher Bint Khalifa al Khalifa. Kunjungan ini diharapkan mendorong agar kerjasama Indonesia - Bahrain bisa ditingkatkan, khususnya dalam perdagangan, investasi, hingga pengembangan tourism.

“Pada tahun 2021, volume perdagangan bilateral Indonesia - Bahrain mencapai USD 267,24 juta, atau meningkat sekitar 57% dibandingkan volume perdagangan pada tahun 2020 yang hanya mencapai USD 170

juta. Secara akumulatif, trend perdagangan bilateral kedua negara selama kurun waktu 5 tahun (2016-2020) menunjukkan kenaikan rata-rata sebesar 11,9%. Kita perlu mendorong upaya untuk meningkatkan kerjasama ekonomi, terutama di bidang perdagangan minyak dan gas, investasi, hingga tourism,” ujar Bamsoet usai menerima Putri Kerajaan Bahrain, Her Highness Shaikha Jawaher Bint Khalifa al Khalifa, di Jakarta, Jumat (12/5/23).

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, menurut Badan

Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI, total realisasi investasi Bahrain di Indonesia periode 2014-2019 mencapai US\$ 1,59 juta dengan jumlah 13 proyek. Di antaranya terdiri dari 8 proyek sektor industri, kimia dan farmasi, dan 5 proyek sektor perdagangan dan reparasi. Sebaliknya, belum terdapat investasi Indonesia di Bahrain.

“Melihat masih banyaknya peluang investasi di Indonesia, saya meminta bantuan Putri Kerajaan Bahrain, Her Highness Shaikha Jawaher Bint Khalifa al Khalifa untuk mendorong lebih banyak investasi Bahrain di Indonesia, memanfaatkan momentum Omnibus Law Cipta Kerja dan pertumbuhan berkelanjutan dari potensi kawasan. Sehingga berbagai perusahaan Bahrain juga dapat menempatkan Indonesia sebagai basis industri mereka untuk memanfaatkan pasar regional yang sedang berkembang,” jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini juga mengapresiasi jumlah wisatawan dari Bahrain ke Indonesia selalu mengalami peningkatan dari 2.151 wisatawan pada tahun 2016, menjadi 2.571 pada tahun 2019. Sebagaimana diketahui, Indonesia memiliki begitu banyak potensi dan destinasi wisata yang sangat diminati wisatawan asal Bahrain, misalnya wisata alam (ecotourism) seperti pemandangan alam atau pegunungan dengan vegetasi hijau dan wisata air misalnya pantai, diving, snorkling atau parasailing serta wisata belanja.

“Indonesia telah, dan akan terus mendorong iklim kondusif untuk menyambut kedatangan wisatawan Bahrain. Seperti pemberlakuan kebijakan bebas visa bagi wisatawan Bahrain serta berbagai langkah promosi Indonesia, baik di berbagai media maupun melalui berbagai event festival dan pertunjukan budaya,” pungkas Bamsoet. □





H. Bambang Soesatyo, SE., MBA.

Ketua MPR RI

Dana Pemda Terus Mengendap Saat Banyak Jalan Daerah Rusak

KETIKA warganet dari berbagai wilayah ramai-ramai melapor kepada Presiden Joko Widodo melalui media sosial tentang jalan rusak di daerahnya, itulah ironi yang nyaris tak berkesudahan akibat minimnya kepedulian aparat daerah. Padahal, ada ratusan triliun dana pemerintah daerah (Pemda) masih mengendap di perbankan yang mestinya bisa digunakan untuk merawat dan memperbaiki semua ruas jalan yang rusak itu.

Sebagai pengguna, wajar jika masyarakat sangat peduli. Sebab, ruas jalan berkait langsung dengan aktivitas produksi dan distribusi serta kelancaran mobilitas warga. Sebaliknya, entah apa yang menjadi kepedulian sejumlah Pemda terhadap kerusakan infrastruktur dasar itu. Karena, kepedulian warga nyaris tak pernah ditanggapi otoritas setempat, keluhan-kesah mereka akhirnya disuarakan di ruang publik, bahkan melaporkannya langsung kepada Kepala Negara.

Banyak Pemda tak mau belajar tentang akibatnya jika masyarakat sudah bersuara. Padahal, sudah ada fakta untuk dijadikan pelajaran. Masih ingat dengan peristiwa perjalanan panjang utusan petani jeruk dari desa Liang Melas Datas, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, menuju Istana Merdeka, Jakarta? Peristiwa itu terjadi pada pekan pertama Desember 2021. Setelah menempuh perjalanan sangat jauh dengan menumpang truk yang membawa jeruk, enam petani utusan masyarakat desa Liang Melas Datas itu diterima Presiden Joko Widodo.

Kepada Presiden, mereka melapor dan meminta

perhatian Presiden untuk kondisi jalan yang rusak di daerahnya, meliputi enam desa dan tiga dusun di Liang Melas Datas. Selain menyampaikan aspirasi, mereka juga membawa tiga ton buah jeruk sebagai oleh-oleh untuk Presiden. Pemerintah pusat pun turun tangan langsung. Jalan di desa itu sudah diperbaiki, dan baru-baru ini warga setempat mengungkapkan rasa syukur mereka dengan berkonvoi di ruas jalan desa yang sudah mulus.

Sangat disayangkan karena fakta itu ternyata diabaikan begitu saja oleh banyak Pemda. Untuk memahami kondisi terkini jalan di semua wilayah, Badan Pusat Statistik (BPS) sudah menyiapkan data tentang Statistik Transportasi Darat 2021 yang dirilis pada November 2022. Statistik yang cukup rinci itu mencatat bahwa panjang jalan Indonesia pada 2021 mencapai 546.116 kilometer, di luar jalan tol. Dari akumulasi itu, proporsi jalan kabupaten atau kota menjadi yang terbesar dengan panjang 444.548 kilometer atau 81,4%; jalan negara 8,61% atau 47.017 kilometer; jalan nasional 9,99% atau sepanjang 54.551 kilometer. Dilaporkan juga bahwa saat itu 42,6% atau 232.644 kilometer jalan dalam kondisi baik.

Statistik yang sama juga menampilkan catatan tentang kondisi jalan rusak, baik kerusakan pada jalan negara, provinsi maupun jalan kabupaten. Rinciannya, 139.174 kilometer (25,49%) dalam kondisi sedang, 87.454 kilometer (16,01%) rusak, dan 86.844 kilometer (15,9%) dalam kondisi rusak berat. Jalan rusak berat sebagian besar terlihat pada jalan kabupaten atau kota, yakni sepanjang 79.256 kilometer.

Jika saja statistik yang dipersembahkan BPS ini

disimak semua Pemda pasti akan muncul kepedulian. Sebab, dari kepedulian, akan lahir semangat melakukan perbaikan untuk kemudian dimasukkan dalam radar perencanaan pembangunan dan belanja daerah. Namun, kepedulian itu terkesan demikian minimnya, sehingga mendorong masyarakat menyuarkan kecewa dan keluh kesah mereka di ruang publik.

Ketika Presiden memberi kesempatan bagi warga untuk melaporkan persoalan jalan rusak, responsnya termasuk luar biasa. Laporan warga tentang lokasi jalan rusak itu masuk ke akun media sosial Presiden seperti Instagram, Twitter, hingga Facebook. Hingga beberapa hari lalu, total laporan yang masuk sudah mencapai 7.400 aduan lokasi jalan rusak.

Semua aduan itu langsung ditanggapi, terutama karena sangat memengaruhi produktivitas masyarakat dan kelancaran distribusi barang serta jasa. Presiden pun memastikan pemerintah pusat akan membantu perbaikan jalan rusak di beberapa provinsi, dan menugaskan Kementerian PUPR mengeksekusi perbaikan itu mulai Juli 2023.

Dan, berpijak pada Instruksi Presiden (Inpres) No 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah, pemerintah pusat mengalokasikan anggaran Rp 32,7 triliun untuk perbaikan jalan rusak sepanjang tahun ini. Kementerian PUPR akan menggunakan anggaran Rp 14,9 triliun untuk perbaikan jalan rusak di beberapa daerah, termasuk di Lampung hingga Sumatera Utara.

Dengan inisiatif dari Presiden itu, semua daerah boleh berharap jalan rusak di wilayahnya akan diperbaiki. Kalau Pemda setempat tidak peduli, masyarakat hendaknya pro aktif melapor kepada presiden.

Di beberapa pelosok daerah, kondisi jembatan yang digunakan warga untuk menyeberangi sungai juga harus mendapat perhatian. Beberapa waktu lalu, pers melaporkan bahwa para pelajar yang pergi-pulang sekolah di beberapa pelosok daerah nyaris bertarung nyawa saat menyeberang sungai, karena jembatan yang digunakan

sudah rusak parah. Sekali lagi, ketika aparat daerah tidak peduli dengan situasi seperti itu, warga hendaknya tidak ragu untuk melapor kepada Presiden.

Inisiatif pusat memperbaiki jalan rusak di banyak daerah belum menyelesaikan semua persoalan. Masih ada catatan yang tetap harus digarisbawahi. Paling utama adalah perlunya terus menyoal profesionalitas Pemda dengan semua satuan kerjanya. Orientasi Pemda harus fokus pada pengabdian membangun daerah dan masyarakatnya. Pemiaraan jalan rusak sebagai infrastruktur dasar itu hanya menjadi bukti betapa banyak Pemda tidak profesional karena orientasinya tidak pada membangun daerah dan melayani masyarakatnya.

Rendahnya profesionalitas Pemda juga terlihat dari penggunaan sumber daya yang sudah tersedia. Saat Pemerintah pusat berkeputusan mengalokasikan anggaran Rp 32,7 triliun untuk perbaikan jalan rusak di banyak daerah tahun ini, ada ratusan triliun dana milik banyak Pemda yang masih mengendap di bank. Pada akhir November 2022, Presiden sudah meminta Pemda segera merealisasikan anggaran belanja dan pendapatan daerah (APBD), mengingat saat itu masih ada Rp 278 triliun dana Pemda mengendap di bank.

Kalau peduli, fokus mengabdikan dan kreatif dalam berkebijakan, Pemda bisa saja menggunakan dana itu untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan infrastruktur dasar di daerahnya. Kalau endapan dana di bank itu sudah ditetapkan peruntukannya, alasan ini bisa diterima, tetapi tetap saja dibutuhkan penjelasan. Misalnya, untuk apa saja peruntukannya? Kapan akan dieksekusi? Dan, apakah peruntukan itu masuk skala prioritas?

Kalau eksekusi belum ditetapkan dan peruntukannya tidak masuk skala prioritas daerah, bukanlah kebijakan haram untuk menggeser pemanfaatan dana-dana itu untuk merespons atau menyelesaikan masalah lain yang lebih urgen, seperti memperbaiki jalan kabupaten yang rusak parah. □

Bagaimana **Seharusnya** Posisi Presiden dalam Pilpres

Terlalu aktifnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam masalah urusan Pemilu Presiden (Pilpres) mendapat banyak sorotan dari berbagai pihak. Ada yang menyebut sah, ada pula yang mengatakan tidak etis. Bagaimana seharusnya jalan ia ambil? Berikut pendapat para politisi Senayan.

Fauzi H. Amro, Anggota MPR Fraksi Nasdem

Presiden Seharusnya Jadi Wasit Yang Netral

SAYA kira ikut campur yang oleh publik disebut “cawe-cawe” Presiden Joko Widodo dalam urusan Pilpres itu tidak etis, karena sebagai Presiden harusnya bersikap netral dan memberi kesempatan yang sama bagi semua anak bangsa yang memiliki kapasitas untuk maju pada Pilpres 2024 mendatang.

Menurut saya, cawe-cawe Jokowi itu tak hanya tidak etis, tapi juga berbahaya bagi kelangsungan dan jalannya demokrasi kita. Karena dengan kekuasaan yang dimiliki, Pak Jokowi bisa memanfaatkan fasilitas negara untuk mengusung sosok yang dia usung. Ini sungguh tidak etis dan tidak baik buat jalannya demokrasi kita.

Ada tidak aturan dalam UU Pemilu ketika Presiden ikut campur dalam urusan Pilpres? Merespon pertanyaan ini, saya akan mengutip pendapat Guru Besar Tata Negara, Denny Indrayana, yang menegaskan bahwa Presiden Jokowi wajib netral dalam Pilpres 2024. Dengan memahami bedanya politik Jokowi sebagai presiden dan politik Joko Widodo sebagai pribadi, maka harus tegas disampaikan bahwa: Jokowi sebagai Presiden harus menjadi wasit yang netral dalam Pilpres 2024. Presiden Jokowi tidak boleh partisan, ikut mendiskusikan koalisi, apalagi mengambil peran dalam penentuan pasangan capres-cawapres.

Ketika Presiden Jokowi menggunakan pengaruh dan kewenangannya untuk memengaruhi kontestasi Pilpres 2024 maka jelas Presiden telah melanggar konstitusi. Karena salah satu tugas dan mandat setiap Presiden adalah melaksanakan konstitusi



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

dengan selurus-lurusnya, termasuk menjalankan Pilpres 2024 yang LUBER, Jujur dan Adil.

Jadi, seharusnya Presiden yang masih aktif menjabat harus bersikap netral dan tidak menyalahgunakan istana untuk kepentingan politik praktis terkait Pilpres 2024 mendatang.

Pak Jokowi ini sudah terlalu jauh terlibat dalam urusan pencapresan. Dia sudah bertindak di luar kewenangannya sebagai Kepala Pemerintah dan Kepala Negara. Ini sudah tidak sehat dan bisa menghilangkan kepercayaan publik terhadap Pemerintah, serta menghilangkan marwah istana, berpotensi menimbulkan gesekan di publik, bisa mengganggu serta membahayakan

jalanya dan kelanjutan demokrasi kita.

Sebagai Presiden harusnya lebih mengedepankan sikap kenegarawanannya sebagai seorang penyelenggara pemerintah dan kepala negara ketimbang sebagai politisi sebagaimana presiden-presiden sebelumnya. Seperti sikap yang ditunjukkan Ibu Megawati, Pak SBY diakhir pemerintahannya, beliau tidak memperlihatkan keberpihakannya pada salah satu calon presiden ketika, serta bisa memasang jarak yang sama baik di dua kubu yang berkompetisi ketika itu.

Namun, sangat disesalkan saat ini Pak Jokowi lebih memosisikan diri sebagai politisi ketimbang sebagai Presiden. Bahkan, bukan tidak mungkin Pak Jokowi seperti dikuatirkan

banyak pengamat, akan menggunakan atau menyalahgunakan kekuasaan untuk mengondisikan penyelenggara pemilu guna memenangkan orang yang diinginkan Jokowi, sehingga bisa menghilangkan kepercayaan publik atas pemilu yang jujur adil.

Presiden Jokowi sosok yang kita harapkan bisa memberikan contoh dalam sikap kenegarawanan, namun ternyata diakhir masa jabatannya di periode kedua ini, beliau

lebih mempertontonkan atau menampilkan diri sebagai sebagai seorang politisi partai atau petugas partai, sudah terlalu jauh masuk dalam urusan endorse capres yang diinginkannya. Bahkan, ada kesan upaya menghalangi-halangi munculnya calon lainnya di luar keinginan istana.

Dan, seharusnya Pak Jokowi tidak berpikir seperti memimpin sebuah kerajaan, yang selalu memikirkan siapa pewarisnya. Biarkan rakyat memilih pemimpinnya. Rakyat kita

makin dewasa dan mantang dalam memilih, tidak perlu negara mengintervensi pilihan rakyat.

Demokrasi kita membutuhkan keadilan serta memberi ruang yang sama untuk seluruh anak bangsa guna maju dalam perhelatan pesta demokrasi. Jadi, Presiden seharusnya bersikap netral demi menghadirkan pemilu demokratis dan demi kebaikan bangsa kita di masa depan. □

AWG

Andreas Hugo Pareira, Anggota MPR Fraksi PDIP

Presiden Punya Tanggungjawab Moral



JOKO Widodo merupakan presiden, kepala negara, kepala pemerintahan, dan seorang politisi. Sebagai Presiden ia memimpin kabinet di mana di dalamnya ada para Menteri. Dalam setiap pertemuan dengan menteri yang sekaligus

para ketua umum partai ada hal-hal besar yang ingin disampaikan oleh Joko Widodo.

Dalam koalisi atau kerja sama partai perlu dibangun gagasan besar. Dalam konteks ini, gagasan besarnya adalah bagaimana melanjutkan pemerintahan yang berbeda

dengan mereka yang memiliki gagasan perubahan. Jadi, mengisi gagasan besar dengan melanjutkan apa-apa yang sudah dilakukan oleh pemerintahan Joko Widodo.

Saya kira dalam konteks itu Joko Widodo sebagai Presiden, kepala negara, kepala pemerintahan, dan politisi, berbicara dengan calon-calon yang sejalan dengan pemikirannya untuk melanjutkan apa yang sudah dilakukan selama ini. Joko Widodo mempunyai tanggung jawab moral untuk menyampaikan gagasan besar tersebut, bagaimana mengisi dan mewujudkan gagasan besar dalam implementasi ke depan. Di sinilah wilayah partai-partai politik untuk bagaimana memimpin strategi ke depan. Ketua partai penting menjaga kerukunan untuk bisa mengisi gagasan besar dalam pembangunan selanjutnya.

Dalam masalah ini, Joko Widodo sangat fair. Nasdem tidak diundang dalam pertemuan sebab ia sudah memiliki gagasan tersendiri. □

AWG

MPR Raih Peringkat I

Lembaga yang Memiliki Kinerja Anggaran Terbaik

Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani, dan diterima oleh Sesjen MPR RI, Prof. Dr. Ma'ruf Cahyono, SH., MH.



KEMENTERIAN Keuangan RI memberikan piagam penghargaan atas keberhasilan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI meraih Peringkat Pertama Kinerja Anggaran Tahun Anggaran 2022 Kategori Kementerian Negara/Lembaga (K/L) dengan Pagu Kecil dengan perolehan nilai 96,94 (sangat baik).

Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani, kepada Sekretaris Jenderal MPR RI, Prof. Dr. Ma'ruf Cahyono, SH., MH., dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Pelaksanaan Anggaran (Rakornas PA) Tahun 2023 dengan tema: 'Belanja Berkualitas untuk Transformasi Ekonomi Indonesia', di Jakarta, Rabu (17/5/2023).

Menteri Keuangan menyerahkan penghargaan berdasarkan kategori besaran nilai pagu anggaran, yaitu besar, sedang, dan kecil. Dalam kategori kecil, MPR menempati peringkat satu, disusul Lembaga Administrasi Negara di peringkat dua, Sekretariat Kabinet di peringkat tiga, Dewan Perwakilan Daerah di peringkat empat, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di peringkat lima.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Dalam paparan usai memberikan penghargaan, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengucapkan selamat kepada seluruh K/L yang menerima penghargaan. Bendahara negara ini juga mengimbau agar selalu semakin hati-hati dalam menggunakan anggaran negara, sebab situasi dunia saat ini dengan inflasi di negara-negara maju yang sangat tinggi, maka naiknya suku bunga bisa mencapai 500 Basis Points atau naik lima persen.

"Mari bersama-sama terus memperbaiki pengelolaan penggunaan anggaran

negara. Karena pengelolaan keuangan negara adalah tanggung jawab kita semua. Kami, tentu akan siap sedia untuk bekerja sama dengan seluruh Kementerian dan Lembaga Negara, serta pemerintah daerah, di dalam mengoptimalkan amanat rakyat melalui pengelolaan belanja negara yang baik. Mari terus belajar dan gunakan tahun 2023 yang masih separuh jalan ini, untuk mengoptimalkan pelaksanaan agar APBN 2023 betul-betul bisa untuk membangun dan memperkuat ekonomi," tandasnya. □



Sejarah Panjang DAMRI Bukan Sekadar Bus AKAP

Berawal dari usaha yang dibentuk Jepang, DAMRI sekarang berkembang menjadi beragam jenis angkutan. Dulu hanya melayani jurusan antarkota, antarprovinsi. Sekarang bisa ditumpangi hingga Brunei Darussalam. Salah satu usaha milik pemerintah ini struktur organisasinya terus disempurnakan.



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

HADIRNYA bangsa-bangsa asing ke Indonesia membawa banyak jejak, yang mana jejak tersebut banyak yang dirawat, diteruskan, dan dilanjutkan hingga detik ini. Ketika Jepang melakukan invasi di Indonesia, negara produsen otomotif yang terkenal tersebut tidak hanya menjadikan Indonesia sebagai wilayah jajahan, tetapi juga menjadikannya sebagai koloni. Tak heran seperti Belanda yang lebih dahulu menduduki Indonesia, dan Jepang juga melakukan aktivitas dan pembangunan di sini.

Untuk memutar roda ekonomi, di samping sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan mereka, pada tahun 1943 pemerintahan Jepang di Indonesia membentuk usaha angkutan (transportasi) massa. Ada dua usaha yang dibentuk, yakni *Jawa Unyu Zigyosha* dan *Jidousha Sokyoku*.

Dua badan usaha tersebut memiliki peruntukan yang tak sama meski bergerak pada bidang yang sama. Disebut dalam banyak sumber, *Jawa Unyu Zigyosha* diperuntukkan sebagai angkutan barang dengan menggunakan truk, gerobak, cikar. Sedang, *Jidousha Sokyoku* diperuntukkan sebagai pelayan angkutan penumpang dengan menggunakan kendaraan bermotor atau bus.

Selama negara yang menyebut dirinya "Saudara Tua" itu menduduki Indonesia, aktivitas angkutan tersebut berjalan normal. Setiap hari ada barang dan orang yang diantar dan dikirim ke berbagai tempat tujuan.

Saat Perang Dunia II berakhir, dengan kekalahan Jepang pada Sekutu, membuat negara tersebut harus angkat kaki dari Indonesia. Dua usaha yang dibentuk juga terkena dampak, yakni tutup karena seluruh manajemen diatur dan dikelola oleh orang-orang Nippon.

Saat Indonesia merdeka pada tahun 1945 dan mulai mengisi pembangunan, sektor angkutan pun juga dipikirkan oleh pemerintah. Dua usaha yang dirintis Jepang, yakni *Jawa*



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Unyu Jidousha dan *Jidousha Sokyoku* diambil alih oleh pemerintah. Semua fasilitas yang ada, seperti kantor dan perlengkapannya, serta kendaraan yang ada dinyatakan milik Indonesia.

Lebih penting dari itu, nama usaha pun diubah dengan nama Indonesia. *Jawa Unyu Jidousha* diganti menjadi *Djawatan Pengangkutan Untuk Angkutan Barang*, dan *Jidousha Sokyoku* menjadi *Djawatan Angkutan Darat untuk Angkutan Penumpang*. Sebagai jawatan transportasi maka dua perusahaan itu dinaungkan pada Kementerian Perhubungan.

Seiring perjalanan waktu dan semakin tertatanya fungsi pemerintahan, yang

efisien, membuat dua jawatan itu dimerges atau digabung menjadi *Djawatan Angkutan Motor Repoeblik Indonesia* (DAMRI). Penggabungan itu tertanda pada 25 November 1946 dengan dasar hukum Maklumat Menteri Perhubungan RI No.01/DAM/46. DAMRI sesuai dengan maklumatnya diperuntukkan sebagai penyelenggara pengangkutan darat dengan bus, truk, dan angkutan bermotor lainnya.

Meski sudah merdeka, namun Belanda tetap ingin agar Indonesia menjadi koloninya. Usaha tersebut mendapat perlawanan dari bangsa Indonesia sehingga dalam masa tahun 1945 hingga akhir 1949 terjadi banyak konfrontasi bersenjata di mana-mana.





DAMRI pun mempunyai peran yang penting ketika bangsa ini berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan.

Dari koleksi Museum Transportasi yang ada di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) ada jejak sejarah yang menceritakan, cikar, gerobak yang ditarik sapi, milik DAMRI digunakan untuk mengangkut senjata milik tentara Indonesia. Peristiwa itu terjadi di Banyumas, Jawa Tengah.

Oleh *Wikipedia*, hal demikian disebut sebagai tugas yang menjadikan semangat kesejarahan DAMRI yang telah memainkan peranan aktif dalam kiprah perjuangan mempertahankan kemerdekaan melawan

usaha ditingkatkan menjadi Badan Pimpinan Umum Perusahaan Negara (BPUPN). Status ini berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 233 Tahun 1961.

Dua tahun kemudian, DAMRI yang sebelumnya tidak memiliki logo akhirnya menggunakan logo. Logo yang dirilis tahun 1963 berbentuk dua roda, dua sayap, serta padi dan kapas.

Restrukturisasi organisasi pemerintahan yang dari tahun ke tahun dijalankan oleh pemerintah, hal demikian juga membawa dampak pada DAMRI. Restrukturisasi yang dijalankan pada tahun 1965 membuat BPUPN dihapus dan selanjutnya dibentuk

kaca model geser. Bagian pintu menggunakan pintu lipat. Bagian belakang menggunakan desain mengkotak. Dimensi bus ini cukup besar, tinggi 2,9 m, panjang 9,5 m, dan lebar 2,4 m. Ia memiliki daya angkut 40 orang.

Bus produk Tata ini awalnya dioperasikan di Bandung, selanjutnya Semarang hingga Surabaya. Di Bandung, bus yang ada, salah satunya mengambil trayek Cicaheum – Cibereum. Disebut ongkos atau tarif yang dikenakan pada penumpang sebesar Rp 50 untuk jarak jauh dekat. Ini ongkos pada tahun 1970-an.

Keberadaan DAMRI masih bertahan di tengah semakin banyaknya kendaraan



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

agresi Belanda di Jawa.

Selepas pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda, pada tahun 1949, tak ada lagi gangguan bangsa asing yang mencoba menduduki kembali Indonesia. Hal demikian membuat seluruh proses kehidupan bangsa Indonesia berjalan normal. DAMRI pun melayani masyarakat seperti yang ditugaskannya.

Apa yang dijalankan oleh DAMRI rupanya membawa keuntungan bagi pemerintah. Roda usaha yang dijalankan mampu dijadikan sumber pendapatan negara. Hal yang demikian membuat pemerintah semakin melirik kiprah usaha DAMRI. Agar lebih memaksimalkan usaha dan memperbesar sumber pemasukan negara maka status

Perusahaan Negara (sekarang BUMN). DAMRI pun ditempatkan di bawah Perusahaan Negara.

Dalam masa-masa ini, bus-bus yang dikelola oleh DAMRI sudah melayani masyarakat ke berbagai tempat tujuan, terutama di Pulau Jawa. Bus DAMRI hadir di terminal-terminal di banyak kota. Ia hadir di antara perusahaan otobus (PO) lainnya.

Diungkap oleh *demokratis.co.id*, Juli 4, 2021, pada tahun 1977, DAMRI menggunakan bus buatan dari India, pabrikan Tata. Bus ini memiliki bentuk kotak, model bus yang trend pada masanya sehingga mulai dari bagian lampu hingga kaca jendela berdesain kotak. Diungkap secara detail, bagian samping menggunakan

bersliweran di jalan. Untuk lebih menguatkan badan usahanya, pada tahun 1984, perusahaan ini berubah menjadi Perusahaan Umum (Perum). Pengubahan status ini berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1984.

Pada masa itu, jarak trayek DAMRI pun semakin melambung. Ia sudah melayani trayek Jawa – Sumatera. Bisa jadi ini dilakukan untuk mengangkut para transmigran dan keluarganya yang masih hilir mudik Jawa – Sumatera. Bus ini pun semakin populer di tengah masyarakat.

Sebagai salah satu asset milik pemerintah dan keberadaannya sangat vital maka DAMRI selalu mendapat perhatian serius. Buktinya, pada tahun 2002, lewat Peraturan



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Pemerintah No. 31 Tahun 2002 status Perumnya disempurnakan dan ia diberi tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan jasa angkutan umum untuk penumpang dan atau barang di atas jalan dengan kendaraan bermotor.

Dalam laman resmi DAMRI, pada tahun 2018, perusahaan ini melakukan *re-branding*. Salah satu yang dilakukan dalam upaya ini adalah mengganti logo. Dalam laman resminya, ia menegaskan setelah 55 tahun, DAMRI hadir dengan transformasi baru yang menjadi momentum *re-branding* dalam memajukan perusahaan menuju era yang serba cepat. Modernisasi dan digitalisasi menuntut DAMRI untuk berpikiran lebih maju dan mengembangkan unit bisnis, di saat yang bersamaan terus melakukan kegiatan *branding*.

Upaya tersebut dilakukan lewat Surat Keputusan Menteri BUMN. *Launching* logo Damri yang baru telah dilaksanakan pada saat kegiatan Raker DAMRI pada tanggal 27 Februari (2019), di Darmawan Park Sentul. Logo baru diharapkan dapat beriringan dengan perubahan pola lama yang mendasar, seperti: *Corporate Management, Visi & Misi baru, Repositoning & Rebranding dan Business Inovation*.

Saat ini DAMRI tidak hanya sebagai angkutan antarkota antarprovinsi (AKAP), namun juga merambah ke banyak jenis angkutan lainnya. Dalam *Wikipedia* disebut

berbagai layanan yang diberikan. Layanan itu seperti sebagai *angkutan perkotaan, angkutan pepadu moda, angkutan antarkota, angkutan antarnegara, angkutan perintis, dan angkutan logistik*.

Dari berbagai macam jenis layanan angkutan tersebut, menarik disimak adalah *angkutan pepadu moda* dan *angkutan antarnegara*. Dijelaskan, *angkutan pepadu moda* yang dikenal dengan angkutan bandar udara (angkutan bandara), yang merupakan salah satu segmen pelayanan yang beroperasi dari dan ke bandar udara.

Segmen angkutan bandar udara ini tidak hanya melayani wilayah Jakarta, namun juga sudah hampir menjangkau bandar udara-bandar udara yang ada di wilayah Indonesia. Pelayanan yang berorientasi pada kepuasan pelanggan ini akan terus

memberikan pelayanan terbaiknya dengan tarif relatif terjangkau, aman, dan nyaman.

Sedang *angkutan antarnegara* adalah angkutan yang dikenal dengan Antarlintas Batas Negara, disingkat ALBN, adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melewati lintas batas negara dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek. DAMRI memelopori transportasi lintas-batas antarnegara Indonesia dan Malaysia, dengan melayani trayek dari Pontianak (Indonesia) tujuan Kuching (Malaysia). Selain itu, DAMRI juga telah membuka layanan baru dari Pontianak menuju Bandar Seri Begawan (Brunei). DAMRI sedang merintis rute antarnegara, seperti ke Timor Leste dan Papua Nugini. □

AWG/dari berbagai sumber





ALS, Angkutan Umum Tertua di Sumatra Naik Sebagai Penumpang, Turun Sebagai Saudara

Perjalanan sehari-hari memunculkan rasa senasib sepenanggungan bagi penumpang ALS. Dari sinilah muncul istilah ‘Naik Sebagai Penumpang, Turun Sebagai Saudara.’ PO ini melayani masyarakat dari Aceh hingga Jember. Disebut sebagai angkutan umum tertua di Sumatra. Mampu memberi inspirasi seni dan pencipta budaya.

TRUCK itu setiap hari mondar-mandir di Kotanopan, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Ia membawa hasil sayur-mayur, beras, serta hasil bumi lainnya untuk didistribusikan ke berbagai pasar dan rumah di Mandailing Natal bahkan hingga Medan. Usaha yang dilakukan itu mampu memberikan pendapatan bagi pemiliknya, Haji Sati Lubis.

Perasaan ingin mengembangkan usaha atau memperbesar pendapatan, muncul dari benak Sati Lubis. Ia berpikir bila tetap berbisnis mengangkut hasil bumi maka usaha yang dijalankan itu tak bisa berkembang atau hanya pada area terbatas, sebab hasil bumi bila diangkat terlalu lama beresiko membusuk. Untuk itu, dirinya bersama keluarga lainnya, seperti Haji Rasyad Nasution, Japarkayo Hasibuan, Haji M. Arief Lubis, Haji Abdul Wahab Lubis, Haji Hasbullah Lubis, Nursewan Lubis, dan Rangkuti, berembung atau bermusyawarah.

Mereka berdiskusi, bertukar pikiran, bahkan berdebat tentang usaha apa yang perlu dibuat untuk mengembangkan usaha



Haji Sati Lubis

yang sudah ada. Setelah beberapa jam, mereka bersepakat untuk mendirikan perusahaan otobus (PO). Sebab, mereka berada di Pulau Sumatra dan ingin menjangkau wilayah yang ada di seujur daratan pulau itu maka PO yang didirikan itu dinamakan Antarlintas Sumatera atau yang lebih popular disebut ALS.

Kesepakatan yang terjadi di Kotanopan, pada 29 September 1966 itu, mengharuskan

mereka urunan atau patungan untuk membeli bus. Tentu bus yang dibeli tidak serta merta sebanyak saat ini, yang mencapai 400 bus. Mereka membeli bus sesuai kebutuhan pasar untuk melayani penumpang dengan rute Kotanopan – Medan. Bus pertama yang dimiliki adalah merk Chevrolet C50.

Sebagai kota terbesar di Sumatera, Medan sangat ramai dan segala macam bisnis ada di sana. Kota ini dianggap oleh Sati Lubis sebagai peluang tambahan untuk mengembangkan ALS. Untuk itu, Kantor ALS dan tempat penjualan tiket yang awalnya dipusatkan di Kotanopan dipindah ke Medan.

Strategi dengan memindahkan kantor pusat ke Medan merupakan langkah yang tepat. Buktinya, setelah ada trayek Kotanopan – Medan, selanjutnya dibuka trayek Medan – Bukit Tinggi. Hadirnya ALS rupanya disambut antusias oleh masyarakat. Sebagai satu-satunya angkutan yang ongkosnya terjangkau oleh masyarakat, serta terbilang nyaman dan cepat pada masanya, membuat orang berduyun-duyun antri untuk bisa naik bus ke tempat-tempat



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

yang jauh. Mobilisasi massa terjadi saat ALS hadir di tengah masyarakat.

Dari sinilah, selanjutnya trayek ALS menjangkau ke seluruh kota besar di Sumatra. Dari Medan melayani ke Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Palembang, dan Bandar Lampung. Bagi *crew* ALS, bepergian ke tempat-tempat yang jauh pada masa itu merupakan suatu keberanian tersendiri, sebab mereka harus melintasi hutan-hutan yang lebat, jalan yang belum semulus saat ini, serta belum ada rest area seperti yang ada di pinggir kanan – kiri jalan

yang ada saat itu tertahan di Merak, Cilegon, Banten; atau Bakauheni, Lampung. Mereka yang ingin bepergian ke Jawa bisa menggunakan tiket ALS, namun selanjutnya dioper ke angkutan yang lain.

Perasaan Sati Lubis gembira ketika ASDP (Angkutan Sungai, Danau, dan Pelabuhan) menggunakan Feri Ro-Ro untuk melayani masyarakat bagi yang ingin menyeberang dari dan ke Merak – Bakauheni. Bagi ASDP langkah itu, selain untuk meningkatkan pelayanan, juga untuk memperbesar pemasukan bagi perusahaan.

membuat penumpang harus bersabar di dalam bus selama satu hari hingga satu minggu agar sampai di tempat tujuan.

Perjalanan yang jauh dan sebagai bus yang melegenda, terutama di Sumatra, membuat ALS menjadi sumber inspirasi dan pencipta budaya di tengah masyarakat. Dalam *Wikipedia* disebut ada dua hal yang menjadikan ALS sebagai inspirasi dan pencipta budaya. Diungkap dalam sumber berita itu, sebagai perusahaan otobus tertua dan terkemuka di Indonesia, ALS dikenal oleh banyak kalangan. Mereka yang pernah merasakan jauhnya trayek mendapat inspirasi dan selanjutnya mengekspresikan atau menumpahkan perasaan seninya dengan tema Bus ALS. Disebut salah satu personil trio dari Tapanuli Utara bernama Bonardo Trio mempopulerkan lagu dengan judul *Di Loket Ni ALS (di Loket ALS)*. Tak hanya Bonardo yang menceritakan pengalaman naik ALS lewat lagu. Seniman asal Mandailing Natal, Maryati br Lubis, juga pernah membawakan lagu yang bertemakan *Bus ALS*.

Bagi mereka yang bukan seniman, bila sudah naik ALS akan mendapat saudara baru. Ini diungkap dalam berbagai sumber yang mengatakan, Naik (ALS) Sebagai Penumpang, Turun Sebagai Saudara. Hal demikian bisa terjadi, sebab jarak tempuh yang jauh dan waktu tempuh sehari-hari membuat *crew* selama berjam-jam berada dalam satu bus yang sama. Mereka menjalani kebersamaan dalam perjalanan dan saat istirahat dalam suasana suka serta duka. Dari sinilah para penumpang dan *crew* saling mengenal bahkan berkenalan. Naik turun dari dan ke bus sehari-hari inilah yang membuat dari waktu ke waktu membuat hati mereka terpaut sehingga timbullah rasa senasib, sepenanggungan, hingga muncul rasa persaudaraan. Ada rasa sedih ketika mereka harus berpisah. Ada yang hilang saat mereka pulang. □

AWGI dari berbagai sumber



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

tol Jawa. SPBU pun pastinya juga masih sangat terbatas. Jadi *crew* bus yang ada, sebelum mereka meninggalkan *pool* pemberangkatan, mereka sudah berpikir di mana harus berhenti untuk istirahat dan mengisi BBM.

Sati Lubis dan keluarga adalah orang yang berpikiran maju. Sebenarnya, dirinya ingin memperluas jangkauan trayek hingga ke Pulau Jawa, sampai di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Malang, dan kota besar lainnya. Keinginan tersebut terhambat, sebab fasilitas penyeberangan yang ada di Selat Sunda. Sebelum tahun 1980, disebut feri yang ada belum cukup untuk dimasuki kendaraan seukuran bus sehingga bus-bus

Bagi ALS sendiri adanya Feri Ro-Ro yang bersandar di pelabuhan merupakan peluang untuk memperluas trayek. Mulai tahun 1980 inilah selanjutnya ALS menjangkau kota-kota yang ada di Jawa. Dari sinilah ALS hadir di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Malang, Surabaya, bahkan Ponorogo. Trayek ke kota-kota di Jawa terus berkembang hingga Jember, bahkan hingga Bali.

Trayek yang ditempuh oleh ALS merupakan trayek yang jauh-jauh. Perjalanan terpanjang adalah trayek Medan (Sumatera Utara) – Jember (Jawa Timur). Jarak yang ditempuh bisa mencapai 3.000 km sehingga bisa memakan waktu hingga satu minggu perjalanan. Jauhnya trayek ini



Berpacu Menjadi Raja Jalanan

Puluhan perusahaan otobus (PO) hadir di tengah masyarakat. Mereka hadir tak sekadar sebagai angkutan bus, namun juga memberikan pelayanan super eksekutif dan mewah sehingga penumpang merasa nyaman dan kerasan dalam perjalanan. Berikut beberapa PO bus super eksekutif yang kerap terlihat melenggang di jalan tol seujur Pulau Jawa. Disarikan dari Wikipedia.

Lorena

PT. Eka Sari Lorena Transport, Tbk. dan PT. Ryanta Mitra Karina adalah perusahaan bus yang melayani angkutan bus antarkota dengan trayek jarak jauh di Indonesia. Dalam *Wikipedia* diceritakan, Lorena didirikan oleh GT Soerbakti pada tahun 1970 dengan nama CV. Lorena. Diawal pendiriannya CV. Lorena hanya memiliki 2 armada bus dengan rute jarak pendek, yaitu Bogor-Jakarta. Trayek jarak jauh mulai dibuka oleh Lorena pada tahun 1984 dimulai dengan rute Jakarta-Surabaya, diikuti dengan kota-kota lainya di Pulau Jawa, Madura, Bali, dan Sumatra.

Menurut pihak dari Mercedes-Benz (selaku merk bus langganannya Lorena), perusahaan transportasi tersebut kali pertama menggunakan 2 unit bus Mercedes-Benz di tahun 1970 dengan trayek Bogor-Jakarta. Lebih lanjut dalam *Wikipedia* disebut, sebagai angkutan bus antarkota antarprovinsi saat ini PO Lorena mempunyai trayek jarak jauh yang membentang dari pulau Bali, Jawa, Madura hingga Sumatra yang dilayani dengan 500 armada bus kelas eksekutif dan bisnis, bus tunggal maupun bus tingkat. Untuk bus tingkat saat ini hanya melayani trayek dari Bogor, Jakarta, Cikampek dengan tujuan akhir ke Surabaya, Malang, Madura PP.

Rosalia Indah

PT. Rosalia Indah Transport (menjalankan bisnisnya sebagai Rosalia Indah) adalah sebuah operator bus asal Indonesia yang berkantor pusat di wilayah Palur (Jateng), Karanganyar (Jawa Tengah). Perusahaan ini merupakan bagian dari Rosalia Indah Group (*Wikipedia*).

Lebih lanjut dalam website itu diungkap, dalam kegiatan usahanya, Rosalia Indah



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

menyelenggarakan pelayanan angkutan antarkota berupa bus antarkota yang melayani berbagai kota di Pulau Jawa dan Pulau Sumatra, serta melayani jasa angkutan pariwisata berupa bus pariwisata.

PO ini pertama kali didirikan oleh pasangan suami-istri Yustinus Soeroso dan Yustina Rahyuni Soeroso pada tahun 1983. Pada

awalnya, mereka mengoperasikan dan mengelola sendiri layanan travel dengan armada berupa Mitsubishi Colt "Bibit Kawit" untuk melayani trayek Surakarta (Solo)–Blitar, kemudian melakukan pengembangan trayek sehingga melayani trayek Yogyakarta–Surabaya, dan Yogyakarta–Blitar/Malang.



Disebut dalam *Wikipedia*, tahun 1987, Rosalia Indah mulai mengembangkan usahanya; di antaranya melakukan penambahan layanan angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP) dengan mengoperasikan armada bus. Namun, layanan ini tidak bertahan lama karena persaingan usaha transportasi AKDP di Jawa Tengah yang semakin ketat.

Dari sinilah disebut Rosalia Indah mulai mengubah orientasi layanan bus yang pada awalnya berorientasi pada layanan AKDP menjadi AKAP; oleh karena itu, Rosalia Indah juga melakukan pengembangan trayek supaya dapat melayani dari Blitar/Solo hingga Jakarta.

Pada 10 April 2015, status Rosalia Indah berubah menjadi perusahaan Perseroan Terbatas berbadan hukum dengan nama PT. Rosalia Indah Transport.

Haryanto

PT. Haryanto Motor Indonesia (menjalankan bisnis sebagai PO Haryanto) adalah sebuah perusahaan bus antarkota dan pariwisata yang berasal dari Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Dalam *Wikipedia* diceritakan, PO. Haryanto didirikan pada tahun 2002 oleh H. Haryanto asal Kudus, Jawa Tengah, setelah purna bertugas di Batalyon Artileri Pertahanan Udara Ringan 1/Kostrad TNI Angkatan Darat di Tangerang. Sebelumnya, ia adalah seorang tentara yang memiliki berbagai pekerjaan sampingan, salah satunya adalah agen tiket bus. Dengan mendapatkan pinjaman dari bank, ia membeli enam buah bus dan menggunakan armadanya tersebut untuk trayek perkotaan dengan rute Cikarang-Cimone.

Lebih lanjut dalam website itu diungkap, setelah beberapa waktu, rute tersebut dianggap kurang menguntungkan dikarenakan sepi penumpang. Akhirnya, ia mengubah armada tersebut menjadi kelas eksekutif dan mengalihkan trayeknya ke trayek antarkota dengan rute Jakarta-Kudus, Jakarta-Pati, dan Jakarta-Jepara.

Mulai saat itulah perusahaan busnya mulai berkembang. Pada tahun 2009, PO.

Haryanto melakukan ekspansi bisnis pertamanya di luar Muria Raya dan juga di luar Pulau Jawa, yakni di Pulau Madura dengan trayek Jakarta-Pamekasan-Sumenep.

Di tahun 2012, PO. Haryanto kembali melakukan ekspansi bisnisnya, kali ini berada di jalur selatan Jawa dengan trayek pertama, yakni Jakarta-Solo-Ponorogo, serta kota-kota lain di sekitar Solo Raya, seperti Klaten dan Gemolong. Di tahun yang sama, PO. Haryanto juga merintis trayek menuju Bojonegoro dan Purwodadi dengan bantuan adiknya, H. Annas. Saat ini, PO. Haryanto telah melayani lebih dari 20 kota di Pulau Jawa dengan beberapa divisi.

Harapan Jaya

PT. Harapan Jaya Prima (menjalankan bisnis sebagai Harapan Jaya) adalah salah

trayek menuju ke pulau Sumatra, yakni Kota Palembang dan Kota Baturaja. Kemudian di tahun 2018 Harapan Jaya meluncurkan layanan kelas Sleeper dan kelas Luxury dengan armada bus tingkat (“double decker”), serta membuka trayek Blitar–Yogyakarta–Magelang. Pada tahun 2019 juga membuka trayek Blitar–Solo–Bandung, Jakarta–Surabaya via Jalan Tol Trans Jawa dan Jakarta–Klaten–Yogyakarta.

Pahala Kencana

Pahala Kencana (atau yang disebut PKT) adalah sebuah perusahaan jasa transportasi angkutan penumpang darat yang berpusat di Jakarta Utara. Dipaparkan dalam *Wikipedia*, Pahala Kencana merupakan pemimpin pasar untuk angkutan kota antarprovinsi kelas eksekutif di Indonesia. Saat ini melayani lebih dari 93 kota



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

satu perusahaan jasa angkutan penumpang darat yang berasal dari Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Diceritakan dalam *Wikipedia*, Harapan Jaya didirikan oleh Harjaya Tjahjana pada tahun 1972 di Tulungagung, Jawa Timur. Pada awal berdirinya hanya memiliki tiga buah bus yang digunakan untuk pengoperasian rute Tulungagung–Surabaya. Pada tahun 1993, Harapan Jaya merintis rute Tulungagung–Solo–Jakarta, serta kota-kota lainnya di wilayah Jawa Timur.

Pada tahun 2017, Harapan Jaya membuka

tersebar di pulau Jawa, Bali, dan Sumatra, dengan jumlah rute utama pulang pergi sebanyak 86, dilayani dengan lebih dari 300 Armada Bus Mercedes dan Hino. Pelayanan kepada pelanggan didukung oleh 1.700 lebih pegawai dan kru Bus. Penjualan tiket dilayani oleh 42 kantor penjualan dan hampir 392 agen penjualan yang tersebar disemua titik rute yang dilayani.

Pahala Kencana memulai usahanya pada tahun 1976 dengan rute Kudus-Jakarta PP dan Solo-Jakarta PP. □

AWGI dari berbagai sumber

Suparno

Warga Desa Sidomulyo Selatan, Boliyohuto

Tradisi Desa Perlu Diangkat dan Diperhatikan

SELURUH kabupaten, termasuk desa kami, memiliki tradisi tahunan pasca Hari Raya Idul Fitri. Namanya Lebaran Ketupat atau Gebyar Ketupat. Tradisi ini sudah berjalan sejak nenek buyut kami dahulu. Dalam tradisi itu kami saling silaturahmi antarkeluarga atau antartetangga yang dekat dan yang jauh.

Uniknya, lebaran ketupat ini walaupun awalnya budaya Islam, namun saat acara puncaknya, isinya banyak sekali budaya lain, seperti Jawa dan budaya asli Gorontalo. Hal inilah yang membuat tradisi ini menjadi sangat menarik.

Penyelenggaraan tradisi ini, terutama puncak acara Gebyar Ketupat, biasanya semua dukungan hasil urun rembuk masyarakat sendiri. Ke depan, kami harap tradisi ini didukung pemerintah daerah. Saya setuju dengan ucapan Bapak Fadel Muhammad, kalau acara ini diseriusi maka bisa menjadi destinasi wisata yang bagus untuk menarik turis lokal ataupun mancanegara. □

DER



Abdul Fikri Katil

Ketua Komunitas Literasi Kampung Prov. Gorontalo

Apresiasi Sosialisasi Empat Pilar Tanpa Pandang Bulu



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

SEBAGAI komunitas masyarakat sederhana saja, kami sangat bahagia dan terkejut juga diajak untuk berkolaborasi, bekerjasama melaksanakan kegiatan yang digelar sebuah lembaga negara tinggi MPR RI, yakni Sosialisasi Empat Pilar.

Ini tidak kami sangka-sangka, bagaimana mungkin seorang pimpinan lembaga tinggi mau bekerjasama dengan kami. Tapi, begitu kita bertemu terus membicarakan materi yang akan dibahas, kami jadi yakin bahwa MPR benar-benar ingin Empat Pilar ini dipahami dan dipegang teguh oleh seluruh rakyat tanpa pandang bulu.

Begitu kami diminta untuk berkolaborasi soal itu, kami langsung pelajari apa itu Empat Pilar. Ternyata, isinya adalah nilai-nilai luhur bangsa yang memang harus kita pelajari dan implementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Dan, kami melihat memang ya soal Empat Pilar ini harus didukung rakyat, tidak hanya di lakukan MPR saja. Kasihan MPR kalau harus melakukan sosialisasi di seluruh Indonesia. Saya berpendapat, kita harus dukung MPR dalam menyuarakan Empat Pilar itu.

Setidaknya dengan berpartisipasi aktif, ikut sebagai peserta jika kebetulan MPR menyelenggarakan sosialisasi di daerah kita. Atau bisa mencari tahu soal Empat Pilar di kanal-kanal media sosial MPR. □

DER

Nini Yunita Sulastrri, S.Pd.

Berharap **Diterima** Menjadi Guru **P3K**



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

SEJAK lama Nini Yunita Sulastrri, S.Pd., (54), staf pengajar mata pelajaran PPKn di MAN I Kota Bengkulu tertarik menjadi guru. Bahkan ketertarikan itu muncul sejak ia masih remaja. Saat itu ia sudah mantap menentukan cita-citanya untuk menjadi pengajar. Karena itu, saat kuliah di UMB (Universitas Muhammadiyah Bengkulu), Nini Yunita Sulastrri mengambil jurusan pendidikan.

Di mata Bunda Nini, begitu ia biasa disapa, guru adalah profesi mulia. Guru berperan mengentaskan generasi muda dari kebodohan. Guru mengajarkan ilmu pengetahuan kepada anak didik agar lebih pandai dari sebelumnya. Dan, membukakan pintu kesempatan kepada para siswa, berprestasi seluas-luasnya.

Hingga kini sudah ada ratusan siswa yang telah merasakan didikan dan tempaan Bunda Nini selama 29 tahun menjadi guru. Di antara mereka sudah ada yang berprofesi menjadi dokter, polisi, politisi, dan juga guru. Semua itu akan menjadi catatan tersendiri dari sejarah perjalanannya sebagai seorang pendidik.

"Mereka sering mencari dan menemui saya, kemudian bercerita tentang perjuangan yang dilakukan hingga mencapai kesuksesan. Kisah-kisah itu selalu membuat saya merasa bahagia sekaligus terharu, apalagi bila mengingat ketika pertama bertemu saat

diterima di sekolah dan juga ketika berpisah, karena mereka sudah tamat belajar. Semua itu bisa membuat perasaan saya terasa diaduk-aduk, dan tak bisa dibayangkan, senang bercampur sedih, penuh haru, juga bangga," cerita Nini Yunita Sulastrri kepada Majalah *Majelis* beberapa waktu lalu.

Perjalanan panjang sebagai guru, menurut perempuan kelahiran Kepahiang, 4 September 1969, ini sebagian besar dilalui dengan penuh bahagia. Meski terkadang ada masalah yang rumit, dan tidak mudah diselesaikan, tetapi ia tetap ikhlas melaksanakan segala tugas sebagai

pengajar, meski diakuinya insentif yang diterima perlu dievaluasi. Pasal, gaji yang didapat para guru honorer seperti dirinya terbilang sangat kecil, jika dibandingkan dengan profesi lain, seperti petani.

Namun, tekad dan semangatnya untuk ikut mengentaskan generasi muda dari kebodohan sangat besar, sehingga ia tidak memikirkan berapapun gaji yang diterima. Bahkan, ia merasa sangat bahagia bisa diterima menjadi guru. Padahal, pada saat pertama mengajar pada tahun 1994, menurut Bunda Nini, gaji yang diperolehnya hanya sebesar Rp.127.000. Tetapi, saat itu





diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (Pemda). Dari situ dia berharap bisa memperoleh tambahan tunjangan agar bisa mengantar anak bungsunya kuliah. Apalagi, selama ini dia sudah menyandang predikat guru K2, lulus sertifikasi, infasing dan memiliki pengalaman mengajar hampir 30 tahun lamanya

Namun sayang, perjuangannya untuk menjadi bagian dari tenaga P3K tak semudah yang dia kira. Ia gagal lulus ujian seleksi menjadi guru P3K. Pada saat yang sama tersiar kabar bahwa pemerintah akan menutup penerimaan guru jalur P3K. Itu artinya, kesempatan Bunda Nini mendapat tambahan tunjangan mengajar, akan tertutup.

“Saya sangat sedih, tidak lulus ujian guru P3K. Saya sadar tidak mudah untuk bersaing dengan guru-guru yang sebagian di antaranya adalah murid yang dulu pernah saya ajar. Muda, cekatan dan memiliki kemampuan banyak. Mestinya, ada kebijakan lain, tidak mengadu kami dengan mereka, atau bukan melulu ujian serta persyaratan administrasi saja. Lamanya waktu mengajar seharusnya juga perlu dipertimbangkan. Juga pengorbanan yang sudah diberikan oleh guru-guru honorer seperti saya,” ungkap Bunda Nini lagi.

Anak ketiga dari tujuh bersaudara pasangan H. Yahya As dan Hj Nurbaiti, ini benar-benar berharap bisa menjadi bagian dari guru P3K. Ia ingin mengantar anak bungsunya tiga bersaudara hasil pernikahannya dengan Drs Muhamad Murni, M.Pd., hingga tamat sarjana.

“Diusia bunda saat ini, semua terasa sulit. Mau memulai usaha kami tidak memiliki pengalaman. Suami yang sebentar lagi purna tugas juga belum memiliki rencana apapun. Karena itu, jalan satu-satunya agar kami punya cukup biaya mengantar anak ketiga kami kuliah adalah menjadi P3K,” pungkasnya. □

MBO



kebutuhannya relatif kecil, sehingga penghasilan yang didapat cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Apalagi, saat awal-awal mengajar, dia juga bisa mengisi kantin sekolah dengan berbagai makanan, dan itu memberi pemasukan tersendiri.

“Diusia saya sekarang, berbagai keterbatasan mulai muncul. Dari soal daya tahan tubuh dan tenaga yang makin berkurang, hingga beberapa penyakit yang mulai menggerogoti badan. Belum lagi, dalam

waktu dekat suami saya juga akan segera pensiun. Padahal, anak bungsunya baru akan masuk bangku kuliah, dan itu memerlukan biaya yang tidak sedikit,” tutur Bunda Nini.

Guru P3K.

Sebenarnya dia berharap bisa diterima sebagai salah satu tenaga P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) atau individu yang ditugaskan sebagai guru bukan ASN di satuan pendidikan yang

Kuliah Umum di Universitas Udayana Bali

Fadel Muhammad: Pemimpin Harus Punya Pola Pikir Entrepreneur

Kewirausahaan di sektor swasta adalah untuk mencari uang untuk dirinya. Sedangkan kewirausahaan di sektor publik (pemerintahan) kita berpikir untuk rakyat.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

WAKIL Ketua MPR, Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad, menyampaikan kuliah umum di depan mahasiswa program pascasarjana (S2 dan S3) tentang peningkatan kinerja pemerintahan daerah. Fadel Muhammad menyebutkan, seorang pemimpin harus punya spirit atau pola pikir entrepreneur.

"Kalau pemimpin mempunyai pola pikir entrepreneur maka dia berbuat sesuatu yang *distinguish* di setiap jabatannya," kata Fadel Muhammad ketika menyampaikan materi dengan tema: "Peran Kewirausahaan Sektor Publik 'Model Fadel' Untuk Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintah Daerah," di Kampus Universitas Udayana, Denpasar, Bali, Senin (15/5/2023).

Menurut Fadel Muhammad, manajer publik/ kepala daerah berperan penting dalam menyebarkan nilai-nilai kewirausahaan di lingkungan pemerintahan melalui serangkaian inovasi dan terobosan. "Karakteristik daerah, visi kepala daerah, dan gaya kepemimpinan daerah adalah faktor yang cukup penting menentukan keberhasilan kewirausahaan sektor publik model Fadel," katanya.

Fadel menjelaskan, kinerja pemerintahan yang baik adalah adanya peningkatan kualitas pelayanan publik yang dapat dilihat

dari indeks kepuasan masyarakat. Kedua, tidak ada korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang diukur dari Indeks Persepsi Korupsi. Ketiga, akuntabilitas kinerja yang berkualitas. Ini dilihat dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Fadel menambahkan, di sektor publik perlu ada upaya memfasilitasi proses perubahan di lingkungan birokrasi pemerintahan agar perilakunya berubah. "Kewirausahaan di sektor publik adalah instrumen yang dibutuhkan untuk membangkitkan kreativitas dan inovasi agar perubahan di sektor publik dapat dilakukan," terang Wakil Ketua MPR dari Kelompok DPD ini.

Perubahan yang diinginkan, lanjut Fadel, adalah terciptanya kinerja pemerintah daerah dalam pelayanan publik yang berkualitas. Sedangkan variabel yang memengaruhi kinerja pemerintah daerah adalah kapasitas manajemen kewirausahaan, faktor lingkungan makro, faktor *endowment* daerah, dan budaya organisasi.

"Kapasitas manajemen kewirausahaan memegang peranan kunci dalam membentuk peningkatan kualitas kinerja pemerintahan daerah," kata Fadel Muhammad yang pernah menjabat dua periode Gubernur Gorontalo.

Implementasi kewirausahaan sektor publik

model Fadel di Gorontalo direpresentasikan melalui *state limited intervention policy*. Fungsi pemerintahan berdasarkan manajemen modern yang lazim dianut sektor swasta.

"Gubernur bertindak sebagai *Chief Executive Officer* (CEO), Wagub sebagai Deputy CEO, Sekda sebagai *Chief Operating Officer* (COO), Kepala Badan Keuangan Daerah sebagai *Chief Financial Officer* (CFO), Kepala Dinas sebagai *Division Head*. Di bawah kendali CEO tercipta sinergi yang mampu meningkatkan kinerja birokrasi dengan memangkas *red tape* birokrasi," papar Fadel.

Selain itu, lanjutnya, membuat tata kelola anggaran dengan mengedepankan kaidah *efficient, effective, economy, dan relevant*. Serta membuat program *quick winning* untuk menenangkan hati rakyat dengan melakukan percepatan laju lokomotif pertumbuhan ekonomi Gorontalo, yaitu pertanian dengan fokus peningkatan produksi jagung melalui 9 pilar agropolitan.

"Kewirausahaan di sektor swasta adalah untuk mencari uang untuk dirinya. Sedangkan kewirausahaan di sektor publik (pemerintahan) kita berpikir untuk rakyat," pungkas Fadel Muhammad. □

Maekyung Korea Selatan-Indonesia Forum

Bamsoet Tegaskan Pembangunan IKN Nusantara Tetap Berjalan

Saat ini, pembangunan IKN Nusantara sudah mencapai sekitar 27%, di mana sekitar 30% dari perkiraan total anggaran sebesar Rp 466 triliun akan ditanggung dari APBN. Sisanya 70% atau sekitar Rp 300 triliun lebih akan diperoleh melalui investor, baik dari dalam maupun luar negeri.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Kepala Bidang Polhukam KADIN Indonesia, Bambang Soesatyo, menegaskan, pemindahan dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur akan tetap dilaksanakan, sekalipun Presiden Joko Widodo sudah tidak lagi menjabat sebagai Presiden RI.

Saat ini, menurut Bamsoet, pembangunan IKN Nusantara sudah mencapai sekitar 27%, di mana sekitar 30% dari perkiraan total anggaran sebesar Rp 466 triliun akan ditanggung dari APBN. Sisanya 70% atau sekitar Rp 300 triliun lebih akan diperoleh melalui investor, baik dari dalam maupun luar negeri.

“Pemindahan dan pembangunan IKN Nusantara saat ini telah ditetapkan dalam UU No. 3 tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara. MPR RI akan memperkuat dasar hukum tersebut guna memastikan pemindahan IKN Nusantara tetap dilaksanakan oleh presiden yang menjabat setelah Presiden Jokowi. Salah

satunya melalui Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) yang saat ini sedang disiapkan oleh MPR RI,” ujar Bamsoet dalam acara Maekyung Korea Selatan Indonesia Forum di Jakarta, Selasa (16/5/23).

Hadir, antara lain Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahil Lahadalia, Menteri Pertanian, Pangan dan



Urusan Pedesaan Korea Selatan Chung Hwang-keun, Wakil Pertama Menteri Perdagangan, Industri dan Energi Korea Selatan Jang Young-jin, Ketua Komisi Urusan Luar Negeri dan Unifikasi Majelis Nasional Korea Kim Tae-ho, Pimpinan Maekyung Media Group Chang DaeWhan, serta Presiden KOTRA (The Korea Trade Investment Promotion Agency) Yu Jeoung Yeol.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini, mengapresiasi hubungan diplomatik Indonesia dengan Korea Selatan yang telah terjalin selama 50 tahun. Telah banyak yang dicapai dari kerjasama kedua negara. Namun, masih ada lebih banyak lagi, prospek kerjasama yang dapat ditingkatkan pada berbagai bidang.

Misalnya, pada sektor otomotif. Di mana pengembangan kendaraan listrik dan ekosistemnya dewasa ini telah menjadi tren global. Indonesia sebagai produsen nikel

terbesar di dunia yang merupakan komponen utama pembuatan baterai, memiliki peran penting dalam pembangunan industri baterai kendaraan listrik di Indonesia.

“Sektor pertanian juga menyimpan potensi untuk dikembangkan. Sebagai negara agraris, sektor pertanian telah menyumbang 12,91% dari jumlah PDB Nasional, serta menyerap lebih dari 27% tenaga kerja. Demikian pula pada sektor kemaritiman. Sebagai negara kepulauan, Indonesia tidak hanya kaya akan sumberdaya bahari dan keanekaragaman hayati, melainkan juga memiliki posisi geostrategis sebagai jalur laut utama perdagangan internasional,” kata Bamsoet.

Wakil Ketua Umum FKPPi dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menuturkan, tema penyelenggaraan Maekyung Indonesia Forum: “Stronger Partnership for the Epicentrum of Growth,”

menyiratkan optimisme yang sangat selaras dengan arah kebijakan Presidensi Indonesia di ASEAN pada tahun ini. Yaitu, menjadikan ASEAN sebagai pusat (episentrum) pertumbuhan.

Optimisme ini tidak berlebihan, mengingat dalam kurun waktu satu dekade terakhir, rata-rata pertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN mencapai 3,98%. Atau 1,38% lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi global.

“Harapan kita, tren positif pertumbuhan ekonomi ASEAN juga berimbang dan berdampak positif bagi peningkatan kerjasama negara-negara ASEAN dengan berbagai negara lainnya, termasuk Korea Selatan. Kita mensyukuri bahwa sejak 1 Januari 2023 Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia - Korea atau Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement secara resmi telah diberlakukan,” pungkas Bamsoet. □

Penghargaan BKN Award Tahun 2023

Setjen MPR RI Raih untuk Tiga Kategori

Plt. Deputi Bidang Administrasi Setjen MPR RI, Siti Fauziah, SE., MM., menyatakan, keberhasilan ini merupakan wujud dari capaian prestasi dalam penyelenggaraan manajemen ASN di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR.

SEKRETARIAT Jenderal Majelis Pemusyawaratan Rakyat (Setjen MPR) RI meraih penghargaan dalam BKN Award Tahun 2023. Penghargaan yang diraih MPR untuk tiga kategori non kementerian tipe kecil. Setjen MPR RI meraih peringkat ke-2 dalam kategori Implementasi Penerapan Kinerja Non Kementerian Tipe Kecil, kemudian peringkat ke-5 pada kategori Penerapan Pemanfaatan Data Sistem Informasi dan CAT Non Kementerian Tipe Kecil, dan peringkat ke 5 pada kategori Pengembangan Kompetensi Non Kementerian Tipe Kecil. Setjen MPR juga meraih penghargaan atas Kategori Utama Implementasi NSPK Manajemen ASN Terbaik.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyampaikan penghargaan itu bersamaan dengan penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian BKN Tahun 2023 di Bandung, Jawa Barat, Selasa



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

(30/5/2023). Kegiatan bertema: “Talent Management 2023: Smart, Agile, and Empathy” ini dilaksanakan secara luring dan daring. Agenda utama kegiatan ini adalah

penyampaian implementasi manajemen talenta ASN menuju World Class ASN 2024 dan pengumuman penerima BKN Award Tahun 2023.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Plt. Deputi Bidang Administrasi Setjen MPR RI, Siti Fauziah, SE, MM, merasa bangga Setjen MPR RI memperoleh apresiasi dari BKN dalam bentuk BKN Award 2023. Keberhasilan merupakan wujud dari capaian prestasi dalam penyelenggaraan manajemen ASN di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR.

“Ke depan, penyelenggaraan manajemen ASN di lingkungan Setjen MPR diharapkan akan semakin berkualitas dengan melahirkan ASN yang semakin profesional dan mampu

menerapkan dan memanfaatkan sistem informasi yang berbasis elektronik melalui teknologi informasi,” katanya.

Siti Fauziah menambahkan, penghargaan BKN Award 2023 ini mendorong Setjen MPR untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan ASN.

BKN yang diberikan kewenangan melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan manajemen ASN secara nasional kembali memberikan penghargaan bagi

instansi pusat dan instansi daerah melalui BKN Award 2023. Penghargaan diberikan kepada instansi pemerintah yang dinilai telah berhasil melaksanakan penyelenggaraan manajemen ASN di lingkungannya masing-masing.

Untuk kategori instansi pemerintah yang dinilai meliputi Instansi Pusat, yakni terdiri dari Kementerian dan Lembaga Negara/Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK), dan Instansi Daerah yang terdiri dari pemerintah provinsi, pemerintah kota, pemerintah kabupaten, serta pemerintah kabupaten/kota.

Adapun penilaian BKN Award 2023 dibagi menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu: Pertama, kategori utama berupa Implementasi Manajemen ASN Terbaik; Kedua, kategori elemen implementasi ASN dan pemanfaatan sistem informasi; Ketiga, kategori special mention, yakni Komitmen Peningkatan Pelayanan Kepegawaian BKN.

Ini merupakan tahun kesembilan sejak BKN Award diluncurkan pada tahun 2015 dengan tujuan untuk memacu kinerja K/L/D dalam melaksanakan implementasi manajemen ASN. Pemberian BKN Award ini diharapkan menjadi pemacu peningkatan kualitas pengelolaan ASN, khususnya dalam mendukung sistem manajemen ASN berbasis sistem merit. □



Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila

Bamsoet: Pancasila Layak Dijadikan Rujukan Peradaban Dunia

Kunci sukses Indonesia membangun pluralisme di tengah keragaman identitas budaya adalah berkat ideologi Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar mendapatkan amanah sebagai pembaca teks Pancasila dalam Upacara Hari Lahir Pancasila 2023, di Lapangan Monas, Jakarta, Kamis (1/6/23). Presiden Joko Widodo bertindak sebagai Inspektur Upacara, Direktur Lalu Lintas Polda Daerah DIY Kombes Alfian Nurrizal sebagai Komandan Upacara, Ketua DPR RI Puan Maharani sebagai pembaca naskah UUD NRI Tahun 1945, dan Ketua MK RI Anwar Usman

sebagai pembaca doa.

“Upacara Hari Lahir Pancasila bukan sekadar kegiatan seremonial. Melainkan menjadi tambahan daya semangat bagi kita untuk senantiasa mengamalkan Pancasila dalam setiap gerak gerak kehidupan. Baik di keluarga, masyarakat, hingga berbangsa dan bernegara. Kita harus bangga memiliki Pancasila yang diperkenalkan pertama kalinya oleh Presiden Soekarno pada 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI. Tidak hanya terbukti menyatukan dan menguatkan

berbagai kemajemukan bangsa, Pancasila juga telah diakui berbagai kalangan dunia sebagai ideologi terbesar pada abad ke-21,” ujar Bamsoet usai membacakan teks Pancasila dalam Upacara Hari Lahir Pancasila 2023, di Lapangan Monas, Jakarta, Kamis (1/6/23).

Turut hadir, antara lain Wakil Presiden RI Maruf Amin, Presiden RI ke-5 sekaligus Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri, Wakil Presiden RI ke-9 Hamzah Haz, Wakil Presiden RI ke-11 Boediono, Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti, Ketua MARI Prof Dr. H.M. Syarifuddin, Ketua KY RI Mukti Fajar Nur Dewata, serta Ketua BPK RI Isma Yatun.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, melalui Pancasila, Indonesia dipercaya menjadi pemimpin dalam berbagai organisasi dunia. Misalnya, Presidensi G-20 pada 2021-2022, Keketuaan ASEAN 2023, Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020, serta Anggota Dewan HAM PBB periode 2020-2022.

“Banyak entitas internasional yang mengagumi Pancasila. Pidato Presiden Soekarno saat memperkenalkan Pancasila di hadapan Kongres Amerika Serikat pada tahun 1956. Profesor Marco Impagliazzo Pimpinan Komunitas Sant Edigio, organisasi internasional yang berpusat di Roma, Italia, yang memiliki keanggotaan mencakup 73 negara, menyatakan bahwa Pancasila dengan nilai-nilai universal yang dikandungnya layak diangkat sebagai rujukan peradaban dunia,” jelas Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menambahkan, Profesor Thomas Meyer, akademisi dari Universitas Dortmund, Jerman, mengungkapkan bahwa Pancasila telah menjadi bahan kajian



akademisi di Eropa. Ideologi Pancasila dinilai lebih baik daripada paham neoliberalisme dan fundamentalisme keagamaan yang menjadi kekuatan politik terbesar pada abad 21.

“Sedangkan Donald K. Emmerson, profesor ilmu politik di University of Wisconsin-Madison, Amerika Serikat, menyatakan bahwa kunci sukses Indonesia membangun pluralisme di tengah keragaman identitas budaya, adalah berkat ideologi Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dengan keduanya, Indonesia juga dinilai dapat menjadi jembatan peradaban bagi dunia, dalam memaknai pluralisme,” pungkas Bamsuet. □



Ahmad Basarah: Peringatan Hari Lahir Pancasila adalah Kebijakan Negara Lintas Rezim

Basarah mengajak seluruh komponen bangsa memahami dan memperingati Hari Lahir Pancasila bukan sebagai kebijakan yang bersifat rezimental, tetapi menjadi kebijakan negara yang lintas rezim.

SETIAP tanggal 1 Juni, bangsa Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila. Peringatan ini didasarkan pada Keputusan Presiden No. 24/2016 tentang Hari Lahir Pancasila. Terkait dengan peringatan ini, Wakil Ketua MPR RI, Dr. Ahmad Basarah, mengajak bangsa Indonesia untuk memahami sejarah peringatan tersebut.

Menurut Basarah, peringatan Hari Lahir Pancasila bukan kebijakan yang khas di era Presiden Joko Widodo. Artinya, peringatan tersebut bukan kebijakan yang bersifat rezimental, tetapi merupakan kebijakan negara yang dibenarkan oleh para pendiri bangsa.

“Sejak pemerintahan Bung Karno dan awal Orde Baru, tanggal 1 Juni diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila dan hari libur nasional. Bahkan, Perpustakaan Nasional RI menyimpan data berita penerbitan Surat Keputusan Menteri Agama Melalui Menteri Koordinator Kesejahteraan atas Persetujuan Presiden Soekarno pada 1 Juni 1964, untuk menetapkan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila dan hari libur nasional. Oleh karenanya, sejak 1964 hingga 1968, terjadi peringatan Hari Lahir Pancasila setiap 1 Juni,” demikian penjelasan Basarah.

Menurut penulis buku Bung Karno, Islam

dan Pancasila (2017) ini, dalam peringatan Hari Lahir Pancasila yang diadakan di Istana Negara, baik Presiden Soekarno maupun Presiden Soeharto selalu menyampaikan pidato kenegaraan. Para pendiri bangsa, mantan anggota BPUPK-PPKI, juga menyampaikan pidato, memberikan kesaksian tentang kelahiran Pancasila.

“Misalnya, mantan Wakil Ketua BPUPK, RP Soeroso memberikan kesaksian tentang kelahiran Pancasila pada 1 Juni 1945 melalui

pidato Bung Karno. Kesaksian Soeroso disampaikan dalam peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 1964. Bahkan, peringatan Hari Lahir Pancasila secara insidental dilakukan pertama kali pada tahun 1958, meskipun belum didasarkan pada kebijakan Presiden. Dalam peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1958, Mr. Muhammad Yamin menyampaikan pidato dan memberikan kesaksian bahwa tanggal 1 Juni 1945 adalah hari di mana pertama kali ajaran



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Pancasila disampaikan oleh Bung Karno,” demikian penjelasan Basarah yang merupakan penerima Bintang Jasa Utama ini.

Menurut Basarah, peringatan Hari Lahir Pancasila lalu dihapuskan oleh pemerintah Orde Baru sejak tahun 1970. Alasannya, ditemukan data sejarah bahwa Mr. Yamin dan Mr. Soepomo telah mengusulkan Pancasila di sidang BPUPK lebih dahulu dari Bung Karno, yakni pada tanggal 29 Mei dan 31 Mei 1945. Berdasarkan konstruksi sejarah ini maka Bung Karno dinilai bukan merupakan satu-satunya tokoh yang mengusulkan Pancasila. Dengan demikian sejak itu, tanggal 1 Juni tidak dijadikan hari kelahiran Pancasila.

“Padahal baik melalui kesaksian pelaku sejarah seperti Bung Hatta, Panitia Lima maupun oleh kalangan intelektual dan

dalam fase kelahiran (1 Juni 1945), fase perumusan (22 Juni 1945) dan fase finalisasi (18 Agustus 1945). Ketiga fase ini, menurut Basarah, merupakan kesatuan proses kelahiran dan perumusan Pancasila. Kesepakatan MPR ini lalu diadopsi oleh Keppres No. 24/2016 tentang Hari Lahir Pancasila yang menjadi dasar bagi peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni sebagaimana kita rayakan saat ini.

Berdasarkan hal ini, Basarah mengajak seluruh komponen bangsa memahami dan memperingati Hari Lahir Pancasila bukan sebagai kebijakan yang bersifat rezimental, tetapi menjadi kebijakan negara yang lintas rezim. Hal tersebut disebabkan oleh fakta kelahiran Pancasila yang diamini oleh para pendiri bangsa perumus Pancasila.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

sejarawan dinyatakan bahwa Yamin dan Soepomo tidak mengusulkan Pancasila. Hanya Bung Karno yang mengusulkan Pancasila di sidang BPUPK. Yamin sendiri di berbagai pidato tahun 1950-an menegaskan bahwa Pancasila lahir pada 1 Juni 1945 melalui pidato Bung Karno, bukan melalui pidatonya pada 29 Mei 1945,” demikian penjelasan lanjutan Basarah.

Oleh karena itu, amanat Reformasi dalam bidang penguatan Pancasila adalah pelurusan sejarah kelahiran Pancasila. Hal tersebut, menurut Basarah, dilakukan oleh MPR RI yang membangun kesepakatan antar-fraksi MPR untuk menyusun konstruksi sejarah kelahiran Pancasila yang lurus. Hasilnya adalah kesepakatan fraksi-fraksi MPR bahwa pembentukan Pancasila terjadi

Syarief Hasan: Kita Perlu Meningkatkan Literasi Tentang Pancasila

Dengan Pancasila, kita harus menyatu dan tidak boleh ada dikotomi di antara anak bangsa. Yang mempersatukan kita adalah Pancasila. Inilah patut diresapi dan dipahami anak bangsa.

Bangsa Indonesia memperingati tanggal 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila. Wakil Ketua MPR Prof. Dr. Sjarifuddin Hasan, MM., MBA., menyebutkan, peringatan Hari Lahir Pancasila ini memberikan kesadaran kepada anak bangsa bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar dan dipersatukan dengan ideologi Pancasila.

“Pancasila merupakan satu kekuatan kita sebagai bangsa. Dengan Pancasila, kita harus menyatu dan tidak boleh ada dikotomi

di antara anak bangsa. Yang mempersatukan kita adalah Pancasila. Inilah yang patut diresapi dan dipahami anak bangsa,” kata Sjarifuddin Hasan di sela-sela kunjungan kerja di Pacitan, Jawa Timur, Kamis (1/6/2023).

Syarief Hasan, sapaan Sjarifuddin Hasan, melanjutkan, jika tidak punya Pancasila, bangsa Indonesia akan terpecah belah. Jadi Pancasila menjadi kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni harus dimaknai seperti itu,” ujarnya.

Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrat ini mengakui bahwa masih ada warga bangsa yang belum mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itulah Syarif Hasan menekankan pentingnya literasi Pancasila kepada masyarakat.

“Kita patut meningkatkan literasi Pancasila atau sosialisasi Pancasila. Mungkin banyak warga bangsa yang belum mendapat informasi yang utuh tentang Pancasila. Kita harus *positive thinking*, mungkin karena ketidaktahuan mereka sehingga mereka tidak mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari,” katanya.

Syarief Hasan menambahkan, menjadi kewajiban kita untuk meningkatkan literasi tentang Pancasila. “Selain itu jangan ada klaim bahwa saya Pancasila-lais, kamu tidak. Saya sudah mendatangi pondok-pondok pesantren, semuanya sangat paham dan taat pada Pancasila,” imbuhnya.

“Jika ada kelompok masyarakat yang tidak tahu dan tidak menjalankan Pancasila, jangan dikucilkan. Mestinya kelompok-kelompok itu dirangkul. Jangan *negative thinking* terhadap satu golongan,” sambungnya.

Sebenarnya, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan MPR melalui sosialisasi Empat Pilar MPR sudah mengupayakan literasi Pancasila. Namun, Syarief Hasan menilai, upaya itu perlu lebih ditingkatkan. “Memang tidak mudah untuk menyosialisasikan Pancasila kepada 275 juta rakyat Indonesia,” tuturnya.

“Kita semua bertanggung jawab untuk memberikan informasi tentang Pancasila yang utuh kepada rakyat. Sosialisasi Pancasila memang menjadi tugas BPIP dan MPR, tapi kita semua juga mempunyai tanggungjawab baik dalam bentuk sosialisasi maupun preventif,” tutupnya. □

Sarasehan Alumni/Alumni Connect Ketua

Dibuka Bamsoet Bersama Wakil Presiden RI Maruf Amin

Alumni Connect PPI Dunia harus bisa memanfaatkan bonus demografi yang sedang dicapai Indonesia agar bisa membawa keuntungan bagi pembangunan nasional bangsa.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, bersama Wakil Presiden RI, Prof. KH. Maruf Amin, membuka Sarasehan Alumni/Alumni Connect yang diselenggarakan Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia (PPI Dunia). Tidak hanya dimaknai sebagai media silaturahmi, event

ini juga berfungsi membangun jaringan, sekaligus merekonstruksi gagasan dan pemikiran mengenai berbagai isu penting. Khususnya, seputar penguatan ketahanan perekonomian nasional melalui pariwisata, ekonomi kreatif, dan inovasi teknologi.

Sektor pariwisata, misalnya, selama beberapa dekade menjadi salah satu

sumber utama penyumbang pendapatan devisa negara. Tercatat dari tahun 2015 hingga 2019, pendapatan devisa negara dari sektor pariwisata terus meningkat dari USD 10,8 miliar menjadi USD 17,76 miliar.

“Setelah pandemi Covid-19 merontokkan capaian devisa pada titik terendah hanya sebesar USD 0,49 miliar, sektor pariwisata kembali bangkit dengan sumbangan devisa sebesar USD 4,26 miliar atau naik hingga lebih dari 769% pada tahun 2022, dan diproyeksikan kembali naik menjadi USD 5,95 miliar pada tahun 2023,” ujar Bamsoet saat memberikan Public Lecture dalam Alumni Connect PPI Dunia, di Jakarta, Jumat (26/5/23).

Turut hadir, antara lain Wakil Presiden RI KH Maruf Amin, Direktur Utama BNI Royke Tumilaar, Koordinator PPI Dunia Achyar Al Rasyid, serta Sekretaris Jenderal PPI Dunia Zafran Akhmadery Arif.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, pertumbuhan ekonomi digital juga memiliki kontribusi tidak sedikit. Pada tahun 2022, ekonomi digital Indonesia tercatat mencapai USD 77 miliar, setara 40% dari total pangsa pasar digital ASEAN, sekaligus menjadi yang tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Nilai ekonomi digital Indonesia pada tahun 2025 diproyeksikan mencapai USD 130 miliar.

“Dunia akan semakin mengalami perubahan besar, khususnya terhadap kehidupan sosial dan ekonomi digital. Terlebih dengan booming teknologi baru, seperti metaverse, web 3, cryptocurrency, NFT, blockchain, dan artificial intelligence. Sebagai gambaran, volume penjualan NFT di dunia sudah menembus USD 24,9 miliar atau sekitar Rp 357 triliun pada. Sementara nilai aset kripto dunia sudah mencapai USD 3 triliun,” jelas Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI dan Kepala Badan Hubungan Penegakan



Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini mengingatkan, di tengah berbagai kemajuan, tidak bisa menutup mata bahwa masih ada berbagai tantangan dan persoalan lain yang harus dihadapi. Misalnya, perekonomian global saat ini yang sedang tidak baik-baik saja.

Forum Ekonomi Dunia tahun 2023 memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi dunia akan mengalami pelambatan pada tingkat 1,7%. Pelambatan ekonomi dunia diperkirakan dialami oleh 95% dari negara maju, dan 70% di negara berkembang.

“Kondisi ini diperburuk oleh kondisi geopolitik global yang diwarnai konflik dan ketegangan politik. Antara lain perang Rusia-Ukraina, eskalasi ketegangan Cina-Taiwan, potensi konflik di semenanjung Korea, memburuknya hubungan Turki dan Yunani, serta ketegangan di kawasan Laut Cina Selatan,” urai Bamsuet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPi ini menambahkan, PPI Dunia serta Alumni Connect PPI Dunia harus bisa memanfaatkan bonus demografi yang sedang dicapai Indonesia, agar bisa

membawa keuntungan bagi pembangunan nasional bangsa. Jangan sampai bonus demografi tersebut justru menjadi bencana, akibat ketidakmampuan mengelola sumber daya para pemuda.

“Titik puncak fase bonus demografi Indonesia diperkirakan terjadi hingga tahun 2030, di mana jumlah penduduk Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 285 juta hingga 300 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, sekitar 70%-nya, atau sekitar 199,5 juta hingga 210 juta jiwa adalah kelompok usia produktif usia 15-44 tahun,” pungkas Bamsuet. □

Menerima Pengusaha Muda Dunia (JCI)

Bamsuet Apresiasi Penyelenggaraan Konferensi ASPAC di Jakarta

JCI (Junior Chamber International) dapat menjadi kekuatan yang menginspirasi dan memotivasi semangat perubahan, semangat kemandirian, semangat persatuan, dan semangat kemajuan kepada seluruh warga dunia,

KETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, mengapresiasi kinerja Junior Chamber International (JCI) Jayakarta dan JCI Indonesia yang sukses menyelenggarakan Konferensi Asia Pasifik JCI 2023 pada Rabu, 10 Mei 2023, di Stadion Tenis Indoor, GBK, Jakarta. Dihadiri ribuan pemuda kreatif dan inovatif dari sekitar 30 negara dunia. Antara lain, Australia, Rusia, Jepang, Vietnam, Moldova, Hongkong, Mongolia, Thailand, Myanmar, Mongolia, Bangladesh, dan Nepal.

“Melalui event ini, para pemuda dari berbagai negara dunia bisa membangun jaringan yang kuat, untuk kemudian dikembangkan ke dalam dunia usaha maupun mempersiapkan diri menjadi pemimpin nasional di negaranya masing-masing. Pemuda selaku generator dan dinamisator pembangunan, sebagai agen perubahan, akan selalu meninggalkan torehan sejarah. Kemampuan generasi muda dalam menjawab tantangan pada masing-masing zaman akan sangat menentukan masa depan bangsa dan negara ke depan,” ujar Bamsuet



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

usari menerima delegasi Konferensi Asia Pasifik JCI 2023, di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara V MPR RI, Jakarta, Jumat (12/5/23).

Turut hadir, antara lain Presiden Nasional JCI Indonesia Felix Soesanto, Presiden Nasional JCI Rusia Oksana, Wakil Presiden JCI Jepang Marii Kitamura, Presiden Nasional JCI Vietnam Nguyen Khang, Presiden

Nasional JCI Moldova Alxandrina, Presiden Nasional JCI Hongkong Kenneth, Presiden Nasional JCI Mongolia Munkhdelger Sodnomrentsen, Deputi Presiden Nasional JCI Malaysia Bruce, Presiden Nasional JCI Monaco Marie, Presiden Nasional JCI Macau Jethro Pun, Presiden Nasional JCI Thailand Charm, Presiden Nasional JCI Myanmar Ta



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Ra, serta Presiden Nasional JCI Taiwan Thomas Lin

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan sekaligus Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) ini menjelaskan, kesuksesan penyelenggaraan Konferensi Asia Pasifik JCI 2023 melengkapikan kebanggaan Indonesia yang telah sukses menggelar berbagai event internasional, seperti KTT G-20 di Bali dan KTT ASEAN di Labuan Bajo. Sepanjang tahun 2023 ini, Indonesia juga sukses menjadi tuan rumah berbagai kejuaraan olahraga dunia. Di antaranya, Indonesian Masters (Badminton) pada 24-29 Januari; F1 PowerBoat Danau

Toba pada 24-26 Februari 2023; serta World Superbike Mandalika pada 4-5 Maret 2023.

“Masih di sisa tahun 2023, Indonesia menjadi tuan rumah bagi beberapa even internasional olahraga dunia lainnya. Di antaranya, Jakarta E-Prix (Formula E) pada 3-4 Juni di JIEC Ancol, Jakarta; Indonesia Open (Badminton) pada 13-18 Juni di Istora Senayan, GBK, Jakarta; World Beach Games pada 5-12 Agustus di Bali; FIBA World Cup (Basket) pada 25 Agustus - 10 September di Indoor Multifunction Stadium (IMS) GBK, Jakarta; Asia Pacific Rally Championship pada 23-25 September dan 24-26 November di kawasan Danau Toba; hingga MotoGP Mandalika pada 13-15 Oktober.

Dengan senang hati kita menerima kehadiran penonton dari berbagai negara dunia untuk menyaksikan secara langsung berbagai event olahraga dunia tersebut,” jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini juga mengingatkan, di tengah persaingan global dan dinamika tantangan zaman, generasi muda dituntut mampu bertransformasi menjadi kekuatan pendobrak yang mengubah tantangan menjadi peluang, menjadikan peluang sebagai keberhasilan. Selain menjadi katalisator yang mendorong lahirnya perubahan ke arah perbaikan.

Karena itu, keluarga besar JCI harus terus mengembangkan setiap potensi, saling mendorong, bersinergi dan berkolaborasi, sehingga segala prestasi, karya, kreasi dan kemajuan yang dicapai, juga memiliki dampak yang nyata bagi kemajuan masyarakat, bangsa, dan negara.

“Dengan karakteristik JCI sebagai wadah global yang terkoneksi dengan ratusan ribu generasi muda dunia, memiliki jaringan yang kuat ke berbagai organisasi kepemudaan dunia, JCI dapat menjadi kekuatan yang menginspirasi dan memotivasi semangat perubahan, semangat kemandirian, semangat persatuan, dan semangat kemajuan kepada seluruh warga dunia,” pungkas Bamsoet. □



Menelisik Kembali Konsepsi Gotong Royong Sebagai Perasan Pancasila

”Jikalau saya peras yang lima menjadi tiga, dan yang tiga menjadi satu, maka dapatlah saya satu perkataan Indonesia yang tulen, yaitu perkataan “gotong royong”. Negara Indonesia yang kita dirikan haruslah Negara gotong-royong.”
(Pidato 1 Juni 1945 Soekarno)

HISTORICAL PANCASILA, TRI SILA DAN EKA SILA

Sejak Dr. Radjiman Wedyodiningrat menanyakan konsepsi dasar apa yang hendak digunakan sebagai dasar Negara Indonesia merdeka pada sidang BPUPK, banyak tokoh bangsa yang telah mengemukakan konsepsi dan gagasannya. Puncaknya pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno mengemukakan gagasannya yang komprehensif terkait dengan *philosophische grondslag* atau *weltanschauung* dasar berdirinya Negara Indonesia merdeka. Dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menjelaskan perlunya mencari persetujuan paham (*modus vivendi*) guna mendirikan sebuah Negara. Dalam pidato ini pula, Soekarno kemudian mencetuskan gagasannya terkait Pancasila yang ia gali dari bumi Indonesia sendiri.

Pancasila digagas oleh Soekarno melalui perenungan yang mendalam yang didasarkan pada petunjuk yang didapatkan atas doa-doanya dalam mencari jawaban tentang konsepsi Indonesia merdeka. Soekarno memilih angka lima karena pada dasarnya banyak aspek filosofis kehidupan yang bisa kita dapatkan dari angka lima. Angka lima memiliki nilai antropologis yang sangat kuat dalam masyarakat Indonesia. Bagi orang Islam, rukun Islam lima jumlahnya, shalat dilakukan lima waktu sehari. Di samping itu, secara inderawi kita mempunyai lima jari dalam satu tangan serta mempunyai Panca (lima) Indera. Dalam tradisi adat istiadat Jawa, terdapat pula lima larangan atau mo-limo yang juga menggunakan angka lima sebagai simbol. Bahkan dalam tradisi nenek moyang kita sebagai seorang pelaut, simbol bintang yang memandu para pelaut di lautan pun (*leitstar*) digambarkan dengan lima sudut.

Di samping menjabarkan gagasannya terkait Pancasila, Soekarno juga mengemukakan alternatif lain jikalau gagasannya terkait dasar

negara ada yang kurang menyukai simbol bilangan lima. Dari sinilah muncul gagasan terkait Tri Sila yang terdiri atas Sosio Nasionalisme, Sosio Demokrasi, serta Ketuhanan. Bahkan jika memang masih terdapat ketidaksetujuan terkait konsep Tri Sila ini, Soekarno pun memberikan sebuah Konsepsi lainnya dalam bentuk Eka Sila yang kita kenal dengan “gotong royong”. Terlihat dari runtutan sejarah ini, Konsepsi Pancasila, Tri Sila, dan Eka Sila merupakan alternatif penamaan bagi dasar Negara yang hendak bangun. Meski demikian, konsep Pancasila lah yang pada akhirnya digunakan dengan berbagai macam penyempurnaan dimulai pada tanggal 1 Juni 1945, 22 Juni 1945, sampai pada tahap final pada tanggal 18 Agustus 1945 yang disahkan oleh PPKI.

KONSEPSI GOTONG ROYONG

Secara terminologi “gotong royong” merupakan suatu kata beribu makna yang mampu menggambarkan kekayaan bangsa Indonesia sebagai bangsa majemuk. Suatu kata pengungguh asa yang di dalamnya terselip jutaan maknawi akan pentingnya berbangsa dan bernegara. Satu konsepsi yang di dalamnya terpendam nilai-nilai transendental dan humanisme yang saling melekat satu sama lain tanpa dapat dipisahkan. Dimensi gotong royong mencakup pula makna persatuan dalam balutan konsepsi Bhineka Tunggal Ika demi tegaknya kedaulatan rakyat dan keadilan sosial.

Konsepsi Transendental dalam ajaran *Ar-rahman/Ar-Rahim* dalam Al-quran, Konsep Kasih dalam Alkitab, Konsep Dharma dalam ajaran Veda maupun Budha, sejatinya tergambar secara nyata dalam faham gotong royong. Prinsip Ketuhanan Pancasila ialah prinsip Ketuhanan Gotong-Royong yang saling menjaga persaudaraan dan toleransi di antara pemeluk-pemeluk agamanya. Prinsip Ketuhanan Pancasila menurut faham gotong royong selalu mengedepankan cinta kasih serta kasih sayang kepada sesama. Hormat-menghormati dan saling menghargai antara ajaran agama yang satu dengan yang lain merupakan pondasi dasar keber-AGAMA-an bangsa Indonesia. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam Bahasa Al-Quran disebutkan dalam QS. Al-Kafirun 109: Ayat 6 “lakum diinukum wa liya diin” (Untukmu

Eko Ibnu Hayyan, S.H.

(Analisis Hasil Penelitian Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI)



agamamu, dan untukku agamaku).

Konsepsi Transendental yang ada dalam faham gotong-royong bersifat inheren dengan prinsip-prinsip dasar humanisme. Bahwa sesungguhnya antara konsep transendental (*Habblum Minallah*) dan konsepsi humanisme (*Hablum Minannas*) selalu seiring sejalan. Dalam agama tidak ada perbedaan berdasarkan kesukuan, Ras, maupun berdasarkan derajat sosial dalam masyarakat. Tak ada diskriminasi dalam hal menjalankan syariat-syariat agama. Yang membedakan hanyalah ketaqwaan masing-masing individu di hadapan Tuhannya. Dalam konsepsi gotong-royong, proses memanusiakan manusia merupakan pra syarat awal dalam mewujudkan tujuan berbangsa dan bernegara.

Prinsip gotong-royong merupakan wadah pemersatu seluruh elemen bangsa. Bahkan Soekarno mengatakan “prinsip gotong-royong di antara yang kaya dan yang tidak kaya, antara yang Islam dan yang Kristen, antara yang bukan Indonesia tulen dengan yang peranakan menjadi satu bangsa Indonesia”. Semua melebur menjadi satu melakukan pembantingan tulang bersama, pemerasan keringat bersama, perjuangan bantu-binantu bersama. Sebab, amal dan perbuatan semua untuk kepentingan semua, keringat semua untuk kebahagiaan semua, *Holopis Kuntul Baris* untuk kepentingan bersama. Itulah gotong royong!

Puncaknya, paham gotong-royong merupakan proses legitimasi daulat rakyat dalam mewujudkan prinsip keadilan sosial. Dalam paham gotong-royong, tidak ada satupun elemen bangsa yang merasa tertinggal atau ditinggalkan. Segala proses pengambilan kebijakan benar-benar dilakukan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kebijakan ditempuh melalui mekanisme permusyawaratan dengan prinsip-prinsip kebijaksanaan (*wise*) yang senantiasa diilhami oleh akal pikiran dan

hati nurani sebagai makhluk Tuhan. Dengan gotong-royong, keadilan sosial yang menjadi cita-cita dan tujuan nasional akan dapat dengan mudah untuk dicapai karena adanya perasaan senasib sepenanggungan. Akhirnya, gotong-royong dan kebersamaan merupakan kunci dalam mengarungi samudra kehidupan berbangsa dan bernegara.

PANCASILA THE COMMON DENOMINATOR

Pancasila merupakan konsep prismatic yang meramu berbagai macam aliran/isme yang ada di Indonesia. Pancasila bukanlah penganut negara agama yang mendasarkan konsep sosial dan hukumnya hanya pada satu ajaran agama saja, namun bukan pula penganut paham sekulerisme yang memisahkan antara negara dan agama. Dalam Pancasila tidak ada paham maupun aliran apapun yang tertinggal/atau merasa ditinggalkan. Konsep prismatic yang dianut mengambil segi-segi terbaik dari berbagai paham/isme yang berbeda atau bahkan bertentangan yang diracik kedalam konsep Pancasila. Pancasila merupakan titik persetujuan (*common denominator*) para pendiri bangsa yang perdebatannya sudah final. Sedangkan Eka Sila merupakan suatu keniscayaan nilai yang bernaung dalam diri masyarakat Indonesia. Kenyataannya antara Pancasila, Tri Sila, dan bahkan Eka Sila tidak saling menafikan antara satu dengan lainnya. Justru antara ketiga merupakan satu tarikan nafas yang seyogyannya berasal dari saripati tanah nusantara itu sendiri. Pancasila sebagai suatu titik persetujuan yang berkarakter prismatic perlu diaktualisasikan dan diselaraskan dalam sistem sosial masyarakat Indonesia di setiap perkembangannya. Aktualisasi Pancasila dengan kelima sila yang terkandung di dalamnya pada akhirnya perlu diinternalisasikan dalam kehidupan sehari-hari melalui prinsip “gotong royong”. □

Sosialisasi Empat Pilar MPR RI BMIWI

HNW: Lanjutkan Peran Ibu Bangsa untuk Wujudkan Cita-Cita Indonesia Merdeka



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

WAKIL Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, MA mengatakan bahwa Indonesia tidak hanya didirikan oleh para kaum laki-laki (*founding fathers*), tetapi juga ada banyak keterlibatan wanita (*founding mothers*). Sehingga sangat penting untuk organisasi kewanitaan, termasuk yang Islam di Indonesia, untuk menghayati hal tersebut agar bisa melanjutkan peran dan berkontribusi mewujudkan cita-cita Indonesia Merdeka. Yaitu, dengan mengawal agar arah bangsa sesuai dengan Pancasila dan cita-cita para Bapak dan Ibu Pendiri Bangsa.

Hal tersebut disampaikan oleh Hidayat Nur Wahid saat memaparkan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI yang digelar bersama dengan Badan Musyawarah Islam Wanita Indonesia (BMIWI) di Jakarta, Kamis (18/5).

HNW, sapaan akrabnya, mengatakan bahwa selain para pahlawan wanita yang ikut berperang melawan Belanda, jauh sebelum Indonesia Merdeka sesungguhnya ada pula beberapa wanita pejuang yang menjadi anggota dan ikut rapat dalam Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK). "Mereka adalah para Ibu Bangsa atau *Founding Mothers* karena terlibat dalam pembahasan

ideologi negara dan cita-cita Indonesia merdeka, serta terlibat aktif dalam penyusunan UUD 1945 yang kemudian dijadikan sebagai konstitusi kita," ujarnya.

Beberapa wanita yang dimaksud adalah Maria Ulfah dan Roro Sukaptinah. HNW mengatakan bahwa kontribusi *Founding Mothers* ini tidak kalah dengan para *Founding Fathers*, terutama di antaranya terkait isu-isu hak asasi manusia yang disampaikan oleh Maria Ulfah, seorang perempuan Indonesia pertama yang meraih gelar sarjana hukum (*meester in de rechten*) dari Universitas Leiden, Belanda. Para wanita ini sangat aktif berkontribusi dan berorganisasi sejak muda. Bahkan, memiliki kedekatan dengan organisasi ke-Islaman. Maria Ulfah pernah mengajar di AMS Muhammadiyah dan RR Sukaptinah merupakan pengurus organisasi Aisyiah Muhammadiyah. "Jadi, dua tokoh inspiratif ini sangat cocok menjadi rujukan organisasi BMIWI," tukasnya.

Ke depan, HNW berharap agar para wanita yang aktif di BMIWI juga dapat berperan meneruskan perjuangan para wanita lainnya dalam menciptakan Indonesia yang makmur dan sentosa berdasarkan Pancasila, sesuai cita-cita yang disepakati para *Founding Fathers and Mothers*. "Sehingga sangat penting untuk memahami



Pancasila dengan baik dan benar, secara historis maupun substansinya. Karena belakangan ada saja oknum yang teriakannya: Saya Pancasila, tapi perilakunya justru tidak sesuai dengan Pancasila. Mereka menyelewengkan Pancasila,” tegas HNW.

“Mereka bilang, Saya Pancasila, tapi malah narasi dan kebijakannya nyinyir terhadap agama atau bahkan membela-bela LGBT atau laku ateistis. Padahal, keduanya jelas tidak sesuai dengan sila pertama dari Pancasila. Ada juga yang bilang Saya Pancasila, tapi memecah belah bangsa. Atau berlaku tidak adil dengan membiarkan terus terjadinya kesenjangan sosial dan ekonomi. Itu jelas bertentangan dengan sila ketiga dan kelima, begitu seterusnya,” tuturnya.

Selain Pancasila, lanjut HNW, ada pula tiga pilar lainnya yang perlu dipahami, yakni NKRI, UUD NRI Tahun 1945 dan Bhinneka Tunggal



lka. “Sangat penting untuk memaksimalkan peran organisasi, termasuk organisasinya para Perempuan Muslimah seperti BMIWI, agar bisa aktif menjaga dan melaksanakan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, juga untuk meluruskan arah kiblat bangsa, apabila ada kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Ini sangat bisa dilakukan, misalnya melalui mekanisme judicial review, baik di Mahkamah Konstitusi (MK) atau Mahkamah Agung (MA),” ungkapnya.

Hadir dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR RI ini pimpinan BMIWI, yaitu Dewan Penasihat dan Pendiri BMIWI, Dra. Hj. Zubaidah Muchtar; Ketua Presidium BMIWI, Dr. Hartini Salama, M.M.; Sekretaris Jenderal BMIWI, Dr. Yossy Nurul H., M.Si., bersama pimpinan dari 35 Ormas Perempuan Muslimah tingkat Nasional. □

Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Kebumen

Bamsoet: Keberagaman adalah Fitrah Kebangsaan Harus Dijaga Bersama

KETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengingatkan, bagi bangsa Indonesia yang memiliki tingkat heterogenitas yang sangat tinggi, merawat persatuan dan kesatuan bangsa adalah sebuah keniscayaan. “Dengan jumlah penduduk lebih dari 273 juta jiwa, terdiri dari 1.340 suku yang memiliki 733 bahasa, serta menganut 6 agama serta puluhan aliran kepercayaan, adalah fakta sosiologis yang menempatkan bangsa Indonesia pada posisi yang rentan dari ancaman perpecahan,” ungkap Bamsoet yang juga Ketua Dewan Pembina SOKSI.

“Kebhinekaan dalam negara yang kaya akan keberagaman hanya bisa wujudkan dengan komitmen kuat untuk mengelola kemajemukan dengan baik dan benar. Kegagalan dalam mengelola kemajemukan akan berpotensi mengakibatkan terjadinya gejolak sosial yang dapat mereduksi semangat persatuan dan kesatuan bangsa, menumbuhkan radikalisme, dan menumbuhkan konflik horisontal,” ujar Bamsoet saat memberikan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI dan Halal Bihalal Kader di DPD II Partai Golkar Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Ahad (21/5/23).

Hadir antara lain Sekda Kabupaten Kebumen Ahmad Ujang Sugiono, Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Kebumen Halimah Nurhayati, pengurus serta kader Partai Golkar Kabupaten Kebumen.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, dalam kehidupan demokrasi, persatuan tidak seharusnya dimaknai sebagai keseragaman yang bersifat simbolis dan atributif, tetapi pada kesatuan paradigma dan visi kebangsaan. Gagasan ini mengedepankan konsep wawasan kebangsaan sebagai cara pandang yang bersifat holistik, mampu melihat setiap persoalan dari berbagai sudut pandang, dengan tetap menjadikan persatuan dan kesatuan bangsa sebagai



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

dasar pijakan.

“Kita dapat belajar dari referensi global bahwa pada masanya Uni Soviet dan Yugoslavia adalah representasi negara besar dan maju di kawasan Eropa Timur. Namun, kegagalan dalam membangun semangat kebersamaan, dan kelalaian dalam merawat soliditas ikatan kebangsaan telah menyebabkan kedua negara besar tersebut terpecah-belah dan tercerai-berai,” kata Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila, Wakil Ketua Umum FKPPi serta Kepala Badan

Polhukam KADIN Indonesia ini juga mengingatkan, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini kita sedang dihadapkan pada berbagai tantangan, baik yang muncul dari faktor internal maupun eksternal, antara lain : (1) melemahnya pemahaman terhadap Pancasila sebagai ideologi bangsa; (2) kesenjangan sosial-ekonomi di tengah masyarakat; (3) demoralisasi generasi muda bangsa; (4) potensi konflik horisontal di tengah kontestasi politik; dan (5) ancaman krisis dan hegemoni ekonomi-politik global.



Tantangan kebangsaan yang paling rawan hari ini adalah, masih adanya kesenjangan sosial-ekonomi di tengah masyarakat. Hingga September 2022, tingkat kemiskinan di negara kita tercatat sebesar 9,57%. Artinya, masih ada sekitar 26,36 juta orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Pada periode yang sama, angka ketimpangan distribusi pendapatan atau dikenal dengan istilah rasio gini, tercatat sebesar 0,381, atau masih di bawah target yang ditetapkan pada RPJMN 2020-2024 sebesar 0,374.

Sebagai data pembanding, World Inequality Report tahun 2022 mencatat bahwa meskipun tingkat kekayaan masyarakat Indonesia meningkat signifikan sejak tahun 1999, namun tingkat ketimpangan kekayaan masih cenderung stagnan. Rasio kesenjangan pendapatan pada tahun 2021 berada di level 1 banding 19. Artinya, jumlah

penduduk terkaya memiliki pendapatan rata-rata 19 kali lipat lebih tinggi dari jumlah penduduk termiskin.

"Kesenjangan ekonomi ini tidak boleh kita abaikan begitu saja, karena jika merujuk pada survei Litbang KOMPAS, bahwa 19,2% terjadinya aksi radikalisme di Indonesia dipicu oleh faktor ekonomi," jelas Bamsuet.

Terkait kebhinnekaan, Bamsuet menjelaskan, upaya merawat kemajemukan Indonesia harus dilandasi oleh kesadaran bahwa keberagaman adalah fitrah kebangsaan yang harus dijaga bersama. Di sisi lain, kebersamaan sebagai sebuah bangsa juga harus ditopang oleh pondasi yang mengakar kuat, agar tidak mudah goyah oleh berbagai potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan.

Dalam konteks ke-Indonesiaan, pondasi tersebut mewujudkan pada sikap tenggang

rasa dan semangat gotong royong. Sikap tenggang rasa adalah upaya menjaga perasaan, menempatkan situasi dan kondisi diri pada situasi dan kondisi yang dialami orang lain, sebagai cerminan sikap penghargaan dan penghormatan terhadap orang lain.

"Sedangkan gotong-royong adalah warisan kearifan lokal yang telah membudaya dalam kehidupan masyarakat Indonesia dengan mengedepankan kerjasama, tolong-menolong, bahu-membahu, serta menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Namun, kita juga menyadari, bahwa kedua pondasi tersebut hanya akan benar-benar bermakna ketika dimanifestasikan dalam tindakan nyata, dan tidak hanya berhenti pada sebatas ide dan gagasan," pungkas Bamsuet. □

Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di UNPERBA

Bamsuet Ajak Optimalkan Bonus Demografi Indonesia

KETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua Dewan Pembina Universitas Perwira Purbalingga (UNPERBA) Bambang Soesatyo menuturkan, bangsa Indonesia dalam 22 tahun ke depan akan mencapai usia emas. Di mana salah satu pilar yang ingin diwujudkan dalam visi Indonesia Emas 2045 adalah Pembangunan Manusia serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Mimpi besar yang ingin diwujudkan, sebagaimana digagas oleh Presiden Jokowi, adalah menjadikan Indonesia sebagai pusat pendidikan, teknologi, dan peradaban dunia.

"Kita bersyukur bahwa Konstitusi Indonesia memberikan mandat kepada negara untuk memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN serta APBD, untuk memenuhi anggaran pendidikan nasional. Alokasi anggaran tersebut berhasil meningkatkan akses pendidikan bagi rakyat. Berdasarkan data Organisation for Economic Co-operation and Development, pada tahun 2000 penduduk usia 15 tahun yang bersekolah pada jenjang SMP atau SMA hanya 39%. Pada tahun 2018 angka tersebut meningkat pesat menjadi 85%," ujar Bamsuet



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

saat memberikan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Kampus Merah Putih Universitas Perwira Purbalingga (UNPERBA) Senin (22/5/23).

Hadir, antara lain Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi, Rektor UNPERBA Eming Sudiana, Ketua Yayasan Perguruan Karya Bhakti Purbalingga Wisnudi Bargowo, Ketua Umum Yayasan Harfin Gosari Gresik Deddy Harnoko Sucahyo, Ketua Yayasan Ali Network Indonesia Ali Sun Geun, Wakil Ketua DPRD Purbalingga Tenny Juliawaty, serta

Kapolres Purbalingga AKBP Hendra Irawan.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI ini mengingatkan, tantangan kebangsaan yang perlu diperhatikan para mahasiswa UNPERBA adalah de-moralisasi generasi muda bangsa. Ini tergambar dari maraknya keterlibatan generasi muda dalam berbagai aksi kriminalitas, anarkisme dan vandalisme, perilaku seks bebas, hingga penyalahgunaan narkoba. BNN (Badan Narkotika Nasional) mencatat, selama periode 2022-2023 saja

ada sekitar 4,8 juta penduduk usia produktif yang tercatat sebagai pengguna narkoba.

Berkelindan dengan fenomena demoralisasi tersebut, kita juga merasakan mulai mudarnya identitas dan jatidiri ke-Indonesiaan, khususnya di kalangan generasi muda bangsa. Nilai-nilai kearifan lokal seperti sopan santun, keberadaban sikap dan perilaku, mulai tergerus dan terpinggirkan oleh gaya hidup hedonis, individualis, egois, dan pragmatis.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, bangsa Indonesia sudah memasuki periode bonus demografi. Di mana komposisi demografi Indonesia didominasi oleh penduduk usia produktif. Diperkirakan jumlah penduduk In-

donesia pada tahun 2045 akan mencapai 319 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, sekitar 70%-nya, atau sebanyak 223 juta jiwa adalah kelompok usia produktif.

“Merujuk pada komposisi penduduk usia produktif tersebut, peran pelajar dan pemuda menjadi penting, strategis, dan sekaligus krusial. Kesuksesan kita dalam memanfaatkan fase bonus demografi, akan sangat bergantung pada seberapa optimal generasi muda mampu berkontribusi secara nyata sebagai sumberdaya pembangunan,” kata Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini memaparkan, Yayasan Indonesia Forum dalam Visi Indonesia 2030 memproyeksikan kekuatan ekonomi Indonesia mencapai posisi

lima besar dunia pada tahun 2030. Saat itu bangsa Indonesia berada pada posisi puncak bonus demografi, di mana tingkat pendapatan perkapita mencapai USD 18.000 per tahun, terbesar kelima setelah Cina, India, Amerika Serikat, dan Uni Eropa.

“Sementara dalam laporan ‘Essential 2007’ yang diterbitkan United Bank of Switzerland (UBS), diprediksi pada tahun 2025 Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi terbesar ke-7 di dunia, dan pada tahun 2050, posisi Indonesia akan menempati urutan ke-5. Berbagai proyeksi tersebut menggambarkan besarnya potensi kekuatan perekonomian nasional dan kontribusi bonus demografi. Karena itu, momentum tersebut tidak boleh dilewatkan secara sia-sia,” urai Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Yayasan Perguruan Karya Bhakti Purbalingga dan Wakil Ketua Umum FKPPi ini menambahkan, bangsa Indonesia perlu belajar dari pengalaman negara-negara yang telah mengoptimalkan periode bonus demografi. Beberapa di antaranya, seperti Korea Selatan, Tiongkok, dan Jepang.

“Kunci keberhasilan negara-negara tersebut dalam memanfaatkan bonus demografi adalah dengan mempersiapkan sumber daya manusia. Sehingga ketika berada pada fase bonus demografi keberlimpahan penduduk usia produktif bertransformasi menjadi sumberdaya pembangunan yang tidak hanya memiliki daya saing, kreatif dan inovatif, namun juga memiliki karakter dan wawasan kebangsaan,” pungkas Bamsoet. □



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Banjarnegara

Bamsoet Ingatkan Bahaya Demokrasi Transaksional

KETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI, Bambang Soesatyo, menilai, sistem Pemilu dengan sistem terbuka telah mendorong lahirnya demokrasi transaksional. Akibatnya, persaingan para calon legislatif (caleg) banyak didominasi oleh kekuatan finansial. Sedangkan pemilih tidak lagi mengutamakan kualitas dan kapabilitas para Caleg. Mereka sibuk menghitung uang yang diterima dari para Caleg, sehingga muncul istilah *nomer piro wani piro* (NPWP).

“Maraknya politik transaksional mengikis

idealisme dan komitmen politik sebagai sarana perjuangan mewujudkan aspirasi rakyat. Model transisi demokrasi ini tidak menjanjikan melembaganya demokrasi substansial yang terkonsolidasi. Berkembangnya kecenderungan politik identitas dan sentimen primordial dalam kontestasi Pemilu merupakan ancaman bagi masa depan demokrasi dan kebhinnekaan bangsa,” ujar Bamsoet dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di DPP Partai Golkar Banjarnegara, Selasa (23/5/23).

Hadir, antara lain Penjabat Bupati Banjarnegara, Tri Harso Widirahmanto, Ketua

DPD Partai Golkar Kabupaten Banjarnegara Agus Junaidi, anggota Fraksi DPRD, para Caleg, ketua-ketua Pengurus Kecamatan, pengurus serta kader Partai Golkar Kabupaten Banjarnegara, unsur pemerintah daerah, kepolisian dan kejaksaan Banjarnegara,

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan menuturkan, dari tiga kali Pemilu dengan sistem terbuka, politik transaksional sangat luar biasa. Sehingga hal itu merusak, dan mendorong meningkatkan korupsi di tanah air. Untuk mendapatkan kursi legislatif, caleg harus mengeluarkan uang hingga



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

miliaran, di antaranya untuk biaya kampanye atau biaya saksi.

“Yang menjadi pertanyaan adalah uang itu berasal dari mana dan bagaimana bisa mengembalikan. Ini pertanyaan sederhana dan mudah, apakah begitu banyak orang merelakan uangnya dihamburkan, lalu bekerja untuk rakyat meski uang tidak kembali? Saya tidak yakin,” kata Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini memaparkan, di tengah kenyataan tersebut, wajar apabila ada sebagian pihak menilai, demokrasi Indonesia di era reformasi justru sedang mengalami stagnasi. Demokrasi hanya memanjakan para elit politik, sehingga rakyat belum merasakan dampak dari demokrasi secara signifikan. Terutama terhadap kesejahteraan dan kemakmurannya.

“Berdasarkan kenyataan tersebut, secara

umum pasca reformasi, demokrasi tidak bertambah baik. Hal ini dikarenakan demokrasi yang berkembang cenderung liberal, karena tidak diikuti oleh penegakan hukum yang kuat. Kita sudah terjebak pada demokrasi angka-angka. Angka transaksi bukan lagi aspirasi. Kedaulatan rakyat berkembang tidak sejalan dengan kedaulatan hukum,” tandas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPi ini juga memaparkan, tugas pokok lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif, tidaklah sama. Masing-masing cabang kekuasaan itu memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Lembaga eksekutif atau pemerintah bertugas menjalankan roda kekuasaan, mulai dari tingkat pusat, yaitu presiden, provinsi oleh gubernur, hingga kabupaten/kotamadya. Sedangkan lembaga yudikatif memegang kewenangan di bidang hukum.

Sementara lembaga legislatif memiliki tupoksi pengawasan, pembuatan UU dan anggaran.

Karena itu tidak pada tempatnya bila anggota dewan mencari-cari anggaran menggunakan relasinya di tingkat pusat. Anggota dewan juga tidak semestinya mencari-cari proyek, sekalipun dengan dalih dibutuhkan oleh dapilnya. Karena, yang memiliki tupoksi mencari anggaran dan proyek pembangunan adalah eksekutif, yaitu presiden, gubernur maupun bupati dan walikota bagi daerah tingkat dua.

“Anggota dewan yang mencari proyek dan anggaran malah bisa berurusan dengan pihak berwajib. Lebih baik, tetap dengan tupoksinya, menyusun anggaran dan peraturan bersama eksekutif, mengawasi serta mendorong agar anggaran yang tersedia digunakan secara baik dan benar. Jangan melompat, karena bisa mengundang masalah hukum. Jangan ikuti penetapan pembangunan jembatan padahal jembatannya masih baik. Atau melakukan pengaspalan, tetapi jalannya masih mulus,” ujar Bamsoet.

Pada kesempatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI tersebut, Bamsoet juga mengingatkan Tantangan serius bangsa-bangsa adalah ancaman krisis dan hegemoni ekonomi-politik global. Di satu sisi, kita dihadapkan pada ancaman krisis ekonomi-politik global. IMF memperkirakan sepertiga ekonomi dunia akan mengalami penyusutan. Bank Dunia memprediksi terjadinya resesi ekonomi global. Kondisi ini diperburuk oleh belum kondusifnya iklim geo-politik global yang masih dijejali oleh perang Rusia-Ukraina, eskalasi ketegangan Cina-Taiwan, potensi konflik di semenanjung Korea, memburuknya hubungan Turki dan Yunani, serta ketegangan di kawasan Laut Cina Selatan. Di sisi lain, hegemoni ekonomi politik oleh negara-negara juga menjadi ancaman tersendiri, khususnya bagi negara seperti Indonesia.

“Dengan kekayaan sumberdaya yang kita miliki, letak geografis yang strategis di antara dua benua (Benua Asia dan Benua Australia) dan dua samudera (Samudera Pasifik dan Samudera Hindia) yang perairannya dilintasi 40% jalur perdagangan laut dunia, menempatkan kita sebagai “center of gravity” dan sekaligus menjadikan kita dalam posisi rentan terhadap pengaruh dan infiltrasi asing, serta ancaman keamanan maritim,” pungkas Bamsoet. □



Diskusi Empat Pilar MPR

Arsul Sani: Kontestasi 2024 Hendaknya Berjalan dengan Semangat Halal Bihalal



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

WAKIL Ketua MPR RI, H. Arsul Sani, SH., M.Si., mengungkapkan bahwa halal bihalal merupakan kegiatan silaturahmi masyarakat Islam Indonesia selepas bulan suci Ramadan ternyata memiliki makna yang sangat kuat untuk menyatukan dan mempererat hubungan sosial masyarakat secara luas.

Halal bihalal sebagai sebuah tradisi, lanjut

Arsul Sani, dalam sejarahnya ternyata diciptakan oleh salah seorang ulama pendiri NU, KH Abdul Wahab Chasbullah. Latar belakangnya sangat menarik dan sangat terkait dengan politik. Dikatakan Arsul, awalnya adalah upaya KH. Abdul Wahab Chasbullah untuk mengumpulkan alim ulama, para kiai yang berikhtilaf atau sedang berbeda pendapat yang susah dipertemukan.

“Akibatnya, perbedaan pendapat itu terus terpelihara dan berpengaruh kepada masing-masing pengikutnya. Untuk mengakhiri ini, KH. Abdul Wahab Chasbullah menciptakan suatu bentuk silaturahmi dengan istilah baru, yakni Halal Bihalal. Dengan itu, mereka para ulama dan kiai bisa duduk bersama dan saling mengerti, memahami, dan saling menghalalkan,” ujarnya.



Hal tersebut disampaikan Pimpinan MPR dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini saat menjadi salah satu narasumber utama acara Diskusi Empat Pilar MPR, bertema: 'Halal bihalal Mampu Memperkuat Rasa Kebangsaan.' Diskusi itu diselenggarakan Biro Humas dan Sistem Informasi Setjen MPR RI bekerjasama dengan Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP), di Media Center Parlemen, Lobi Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/5/2023).

Hadir dalam acara, Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Politik - Badan Riset dan Inovasi Nasional (PRP-BRIN) Prof. Dr. R. Siti Zuhro, MA., Ph.D., serta para wartawan nasional, baik cetak, elektronik dan online sebagai peserta.

Lebih jauh, Arsul Sani mengatakan, dalam konteks saat ini, apalagi menuju tahun politik

2024, makna halal bihalal sebagai pemersatu perbedaan yang ada semestinya bisa terimplementasi. "Hal tersebut sangat saya tekankan, sebab makin mendekati Pemilu 2024 nuansa 'haram biharam' sangat kental, terutama di media social, seperti What's App Group (WAG)," tambahnya.

Pada intinya, lanjut Arsul, sudah saatnya semangat halal bihalal diterapkan untuk menjaga keutuhan bangsa, terutama di akar rumput. "Inilah tugas para elit politik agar makna halal bihalal menyentuh akar rumput. Namun, agar lebih kuat memang harus dibantu oleh media, terutama media arus utama," imbuhnya.

Arsul Sani mengingatkan, dalam kontestasi 2024, kompetisi keras itu pasti ada dan hal itu sesuatu yang wajar. Tapi, dengan semangat halal bihalal, diharapkan seluruh

anak bangsa bisa menjaga situasi kompetisi itu, tidak akan terjadi di luar batas atau over dosis.

Dalam kesempatan yang sama, Prof. Siti Zuhro mengatakan, hal yang sangat penting untuk dipahami, yakni halal bihalal harus mampu diwujudkan sebagai satu sarana dan wahana bersama untuk merealisasikan atau paling kurang mengekspresikan, memupuk, mempertahankan, dan bahkan meningkatkan rasa kebangsaan seluruh anak bangsa.

"Halal bihalal ini akan sangat bermakna, bila dilakukan sebagai arena silaturahmi yang tidak hanya sekedar menjadi ajang saling memaafkan, tapi lebih dari itu merupakan refleksi konkret, rasa persatuan nasional dan kesadaran saling membutuhkan sebagai makhluk sosial," pungkasnya. □

Terima Alumni SMA Taruna Nusantara

Bamsoet Dorong Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Platform Media Sosial



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, bersama Ikatan Alumni SMA Taruna Nusantara akan bekerjasama menyosialisasikan Empat Pilar MPR RI di dunia digital. Khususnya di berbagai platform media social, seperti

Youtube, Instagram, Twitter, hingga Facebook. Sekaligus mendorong pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk melakukan intervensi agar berbagai platform media sosial tersebut turut memuat iklan layanan masyarakat yang berisi berbagai narasi kebangsaan.

"Memiliki jumlah penduduk lebih dari 272,2 juta jiwa, dan tingkat penetrasi internet sebesar 76,8%, Indonesia menjadi salah satu pasar digital terbesar di Asia, bahkan dunia. Sudah sepatutnya berbagai platform media sosial kita dorong untuk turut memberikan kontribusi bagi kemajuan

kehidupan sosial kebangsaan di Indonesia,” ujar Bamsuet usai menerima perwakilan Alumni SMA Taruna Nusantara, di Ruang Delegasi Gedung Nusantara V MPR RI, Jakarta, Jumat (12/5/23).

Perwakilan Alumni SMA Nusantara yang hadir, antara lain Hafif Assaf, Elia Nelson, Abi Alamsjah, Andhika Awaluddin, Monang Sidabutar, dan Rasendrya Hafiz.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, sikap menolak ataupun memutuskan hubungan dengan platform digital global merupakan sikap yang tidak realistis. Karena itu, sangat penting bagi negara untuk mendomestikasi berbagai platform digital global, serta melakukan penataan atas kedudukan dan operasi

mereka di Indonesia.

“Domestikasi dimaknai bahwa eksistensi perusahaan platform digital global harus menjadi obyek hukum yang dapat diatur dan patuh terhadap implementasi hukum nasional, dan harus beroperasi di dalam jangkauan hukum nasional. Sekaligus dimaksudkan sebagai transformasi regulasi yang mampu menjangkau keberadaan perusahaan global penyedia layanan konten atau data via jaringan atau dikenal dengan perusahaan over the top,” jelas Bamsuet.

Wakil Ketua Umum FKPPi dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, domestikasi platform digital sangat penting mengingat bisa saja

berbagai platform digital tersebut menyalahgunakan kemampuan rekayasa algoritma dan analisis big data yang dimiliki untuk merekam perilaku digital hingga menganalisis preferensi dan pandangan politik masyarakat. Dalam beberapa aspek, tindakan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai operasi intelijen dalam merongrong kedaulatan negara.

“Kebijakan domestikasi bukan ditujukan untuk melawan platform digital global. Melainkan untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat, untuk mewujudkan keseimbangan dalam relasi kekuasaan, menegakkan prinsip persamaan di depan hukum, serta kesetaraan level kedudukan pada area bisnis yang sebidang,” pungkash Bamsuet. □

Bersama BEM Mahasiswa NU Se-Nusantara

Bamsuet Ingatkan Ancaman Dekadensi Moral Generasi Muda Bangsa

KETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, mengingatkan, derasnya arus globalisasi dan pesatnya kemajuan teknologi, khususnya teknologi informasi, telah menjejali benak dan pemikiran anak bangsa dengan berbagai nilai-nilai baru. Sayangnya, tidak semua nilai-nilai baru tersebut selaras dengan nilai-nilai kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang di masyarakat Indonesia. Tidak semua penerima informasi tersebut juga memiliki literasi dan keadaban digital yang memadai untuk memilah, memilih, dan menyaring informasi yang masuk.

Di saat bersamaan, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia mengungkapkan bahwa tingkat penetrasi internet di Indonesia tergolong tinggi. Sepanjang tahun 2022-2023, tingkat penetrasi internet di Indonesia telah mencapai 78,19%, atau sekitar 215,6 juta jiwa.

“Berpadunya dua variabel, antara rendahnya literasi dan keadaban digital dengan tingginya tingkat penetrasi internet inilah yang kemudian berpotensi memicu



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

lahirnya berbagai persoalan. Misalnya, pada triwulan I tahun 2023 saja, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah mengidentifikasi sebanyak 425 isu hoaks yang beredar di website dan platform digital. Di sinilah pentingnya kehadiran institusi yang mengajarkan pendidikan

akhlak, seperti halnya Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Aqidah Al-Hasyimiah Jakarta,” ujar Bamsuet saat memberikan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI bersama Badan Eksekutif Mahasiswa NU se-Nusantara di STAI Al-Aqidah Al-Hasyimiah Jakarta, Selasa (16/5/23).



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Hadir, antara lain Rektor STAI Al-Aqidah Al-Hasyimiah Jakarta Muslihan Habib, Presidium Nasional BEM Perguruan Tinggi NU Se-Nusantara, Wahyu Al Fajri, Ketua Yayasan YADAI Jamaluddin F. Hasyim, serta Pembina Yayasan Da'wah Syiarul Islam Sulaiman Haikal.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, memudarnya identitas dan karakter kebangsaan dapat dirasakan ketika peradaban dan nilai-nilai

kearifan lokal, seperti gotong royong, adab sopan santun, kian tergeser oleh gaya hidup hedonis, individualis, egois dan pragmatis. Tradisi dan nilai luhur budaya bangsa dianggap kuno dan membosankan. Pada saat yang bersamaan, nilai-nilai budaya asing justru dianggap lebih maju dan modern.

"Tumbuhnya paham radikalisme sebagai konsekuensi dari pemaknaan sempit dan tidak kontekstual terhadap ajaran agama juga mulai merasuk pada generasi muda bangsa. Dalam perspektif yang lebih luas, tindakan

radikal dan teror kepada rakyat, juga dilakukan oleh kelompok kekerasan bersenjata dalam bentuk gerakan separatisme," kata Bamsuet.

Wakil Ketua Umum FKPPi dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini memaparkan, dekadensi moral generasi muda bangsa dapat

dilihat dari beberapa kasus kejahatan yang melibatkan pelaku anak. Semisal, ketika anak-anak melakukan penganiayaan di luar batas perikemanusiaan hingga menyebabkan korban merengang nyawa.

Sementara, sikap intoleransi dalam kehidupan beragama dapat dirujuk dari data SETARA Institute. Terungkap sepanjang tahun 2022, terdapat 175 peristiwa dan 333 tindakan pelanggaran kebebasan beragama yang terjadi di masyarakat.

"Dalam rangka mewujudkan harmoni dan menjaga keserasian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, setiap elemen masyarakat harus memiliki wawasan kebangsaan yang memandang diri dan lingkungannya sebagai satu ekosistem lingkungan. Saling menghormati dan saling bekerjasama. Karena sebagai makhluk sosial, hidup berdampingan adalah fitrah kemanusiaan," pungkas Bamsuet. □



Sosialisasi Empat Pilar MPR di Cianjur

Syarief Hasan: Rajut Persamaan Persepsi untuk Membangun Bangsa

WAKIL Ketua MPR RI, Prof. Dr. Sjarifuddin Hasan, MM., MBA., yang biasa disapa Syarief Hasan, menegaskan bahwa sebagai bangsa yang besar, dari sisi geografis dan jumlah penduduknya, Indonesia memerlukan perekat untuk menyatukan semuanya dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Apalagi, penduduk Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa yang berbeda-beda, sehingga alat pemersatu menjadi sebuah keniscayaan.

“Bersyukurlah bangsa kita dianugerahi alat pemersatu untuk merajut persamaan persepsi kebangsaan untuk membangun bangsa, yakni Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika atau dikenal Empat Pilar MPR,” ujarnya, saat menjadi narasumber utama Sosialisasi Empat Pilar MPR yang diselenggarakan MPR bekerjasama dengan Pemerintah Desa Sukanagalih, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Kamis (25/5/2023).

Acara yang digelar di aula pertemuan Alam Asri Hotel & Resort Puncak Cianjur ini, dihadiri anggota DPRD Fraksi Partai Demokrat Kabupaten Cianjur Hj. Lika Nurhayati, Ketua MUI Kecamatan Pacet H. Ade Muchlis mewakili Kepala Desa, serta tokoh agama dan sekitar 200 masyarakat setempat sebagai peserta sosialisasi.

Dalam Empat Pilar, lanjut Pimpinan MPR dari Partai Demokrat ini, ada Pancasila. Pancasila



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

adalah nilai yang tidak asing lagi buat seluruh anak bangsa. Sebab, Pancasila merupakan ideologi dan dasar negara yang harus dijunjung tinggi. Sehingga, jika masih ada yang berpikir dan berucap ‘saya paling Pancasila-lais yang lain tidak’, itu sama saja mencederai hati dan jiwa seluruh rakyat Indonesia.

Lalu, ada NKRI. NKRI juga sudah sangat melekat dengan kehidupan bermasyarakat. Walaupun berbeda-beda, tetap menjunjung tinggi negara Indonesia sebagai tempat bernaung. “Saya beri contoh, di partai saya Demokrat. NKRI sudah harga mati. Kita tidak lagi melihat dari suku mana dia berasal. Tidak peduli dari suku Batak, Jawa, Sunda atau lainnya, yang penting kita adalah satu NKRI,” tambahnya.

Di lembaga tinggi negara MPR RI, lanjut mantan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI di era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini, juga sama. Seluruh Pimpinan MPR yang berjumlah 10 orang, 9 orang berbeda partai politik dan satu perwakilan Kelompok DPD, tapi menjadi satu untuk urusan NKRI.

“Jadi saya mengajak, mari kita semua pegang teguh Empat Pilar sebagai panduan kita dalam bermasyarakat dan bernegara. Untuk itu, kita harus terus kita saling mengingatkan. Apalagi, sebentar lagi kita akan menghadapi kontestasi penuh kompetisi di Pemilu 2024. Empat Pilar sebagai perekat kesatuan bangsa menjadi sangat penting,” pungkasnya. □



Resmikan Masjid Harfin Baitus Salam UNPERBA

Bamsoet: Semoga Masjid ini Menjadi Rumah Keselamatan



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua Dewan Pembina Yayasan Perguruan Karya Bhakti Universitas Perwira Purbalingga (UNPERBA), Bambang Soesatyo, meresmikan Masjid Harfin Baitus Salam di Universitas Perwira Purbalingga (UNPERBA). Masjid Harfin Baitus Salam

merupakan masjid bantuan Yayasan Harfin Gosari Gresik. Bangunannya terdiri dari dua lantai, dengan menara dan kubah yang penuh nilai estetika. Masjid dengan luas sekitar 10 m x 12m itu didominasi warna putih dan dipadukan dengan lantai keramik berwarna krem.

Peresmian Masjid Harfin Baitussalam

ditandai penandatanganan berita acara serah terima masjid dari Ketua Umum Yayasan Harfin Gosari Gresik, Deddy Harnoko Suchafo, kepada Bambang Soesatyo selaku Pembina Yayasan Perguruan Karya Bhakti UNPERBA. Dilanjutkan penandatanganan prasasti dan pengguntingan pita menuju ke dalam masjid.

“Saya mengapresiasi setinggi-tingginya kepada Ketua Umum Yayasan Harfin Gosari Gresik, Bapak Deddy Harnoko Suchafo, atas bantuan dan dukungan yang diberikan, sehingga kampus UNPERBA saat ini memiliki Masjid Harfin Baitus Salam. Semoga sesuai nama yang disematkan, masjid ini menjadi ‘rumah keselamatan,’ baik bagi segenap sivitas akademika dan keluarga besar Kampus UNPERBA maupun bagi masyarakat umum yang memanfaatkannya,” ujar Bamsoet usai meresmikan Masjid Harfin Baitus Salam di Universitas Perwira Purbalingga, Senin (22/5/23).

Hadir, antara lain Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi, Rektor UNPERBA Eming Sudiana, Ketua Yayasan Perguruan Karya Bhakti Purbalingga Wisnudi Bargowo, Ketua Umum Yayasan Harfin Gosari Gresik Deddy Harnoko Suchafo, Ketua Yayasan Ali Network Indonesia Ali Sun Geun, Wakil Ketua DPRD Purbalingga Tenny Juliawaty, serta Kapolres Purbalingga AKBP Hendra Irawan.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, menghadirkan masjid di kampus UNPERBA sejatinya juga merupakan bagian dari implementasi amanat Konstitusi. Pasal 31 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan bahwa dalam kerangka mencerdaskan kehidupan bangsa, sistem pendidikan nasional diselenggarakan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta akhlak mulia.

“Amanat Konstitusi tersebut dimaknai bahwa tujuan penyelenggaraan pendidikan tidak hanya sekedar untuk melahirkan sumber daya manusia yang cerdas dan terampil saja, tetapi juga berkarakter dan





FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

berakhlak mulia, Semoga Masjid Harfin Baitussalam dapat membuat aman dan nyaman suasana di sini. Dan, bisa

berkontribusi besar terhadap peningkatan iman dan takwa keluarga besar civitas akademika UNPERBA," harap Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menambahkan, dewasa ini pembangunan karakter bangsa semakin terasa penting dan krusial, khususnya bagi generasi muda. Derasnya arus globalisasi, di satu sisi mendorong beberapa kemajuan material, namun di sisi lain juga menghadirkan berbagai dampak dan tantangan.

"Salah satunya adalah demoralisasi generasi muda bangsa. Ini tergambar dari maraknya keterlibatan generasi muda dalam berbagai aksi kriminalitas, anarkisme, dan vandalisme, perilaku seks bebas, hingga penyalahgunaan narkoba. Kita juga merasakan mulai memudarnya identitas dan jati diri ke-Indonesiaan. Nilai-nilai kearifan lokal seperti sopan santun, keberadaban sikap dan perilaku, mulai tergerus dan terpinggirkan oleh gaya hidup hedonis, individualis, egois, dan pragmatis," pungkas Bamsoet. □

Pelantikan BPN Generasi Emas Indonesia

Yandri Susanto: Kembangkan Potensi Desa, Mandiri Bangsa



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

WAKIL Ketua MPR, H. Yandri Susanto S.Pt., mengucapkan selamat datang kepada generasi muda yang memenuhi Gedung Nusantara V, Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, 31 Mei 2023. Kehadiran

300 anak muda dari berbagai kota di Indonesia itu untuk mengikuti Sosialisasi Empat Pilar MPR sekaligus pelantikan Badan Pimpinan Nasional GESID (Generasi Emas Indonesia).

Hadir dalam pelantikan yang diliput oleh banyak media itu, President Executive GESID

Viviana Hanifa, Sekretaris Jenderal GESID Lesna Purnawan, Bendahara Umum GESID Chairunnisa, serta perwakilan dari berbagai organisasi kepemudaan dan pemerintahan.

"Selamat datang di gedung rakyat," ujar Yandri Susanto mengawali sambutan



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

sebagai pembicara utama dalam kegiatan itu. Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu merasa bangga bisa berada di antara anak-anak muda atau yang sekarang disebut kaum milineal itu.

Dikatakan bangsa ini menyongsong Indonesia Emas pada tahun 2045. Menjelang tahun emas, ada modal yang disebut dengan bonus demografi. Meski demikian, bonus itu bisa membawa masalah bila tidak dikelola dengan baik. Agar tidak terjadi yang demikian, Yandri Susanto menegaskan, agar

GESID menjadi garda terdepan dalam menyongsong masa depan. "Mari kita bersama dan bersatu untuk mempersiapkan masa depan," tegasnya.

Kepada organisasi yang peduli pada pembangunan desa itu, Yandri mengungkapkan, ada tantangan yang perlu dijawab oleh GESID. Seperti problem anak-anak muda yang memiliki ketergantungan pada media social, di mana isi dari media tersebut tidak selamanya positif. "Problem minuman keras dan narkoba juga banyak

yang menjerat anak muda," jelas Anggota DPR dari Dapil II Banten yang meliputi Kota dan Kabupaten Serang serta Kota Cilegon.

Tantangan lainnya adalah masih melimpahnya barang impor yang masuk ke Indonesia. "Bila dibiarkan akan menjadikan bangsa ini tergantung pada bangsa lain," paparnya. Yandri sepakat dan setuju bila GESID ingin memberdayakan Indonesia dari desa. Bila masing-masing desa memiliki badan usaha maka kita patut optimis segala kebutuhan yang ada bisa dipenuhi dari dalam negeri. "Jadi, kita tak perlu impor," ujarnya.

Tantangan-tantangan di atas, menurut Yandri Susanto, perlu dijawab dan dituntaskan oleh GESID. "Bisa tidak menjawab tantangan ini?," tanyanya. Pertanyaan tersebut direspon serentak oleh anggota dan pimpinan GESID dengan mengatakan, "bisa."

Dalam kesempatan tersebut, alumni Universitas Bengkulu itu, menegaskan agar generasi muda tidak alergi berorganisasi, termasuk berpolitik. Perbedaan disebut sebagai suatu hal yang biasa. Justru dengan adanya perbedaan maka ada dinamika dan muncul ide serta gagasan baru.

Dengan berorganisasi dan berpolitik, papar Yandri, membuat anak-anak muda tidak hidup dalam 'menara gading'. "Jangan elitis, harus melebur dengan seluruh komponen yang ada," ucapnya. □



Halal Bihalal Pimpinan MPR dengan Pegawai Setjen MPR

BERTEMPAT di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/5/2023) Setjen MPR menggelar acara 'Halal Bihalal Pimpinan MPR Bersama Keluarga Besar Setjen MPR RI'. Hadir dalam momen itu, Ketua MPR Bambang Soesatyo beserta para Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah, Jazilul Fawaid, Arsul Sani, Syarifuddin Hasan, dan Fadel Muhammad.

Hadir juga, beberapa Pimpinan Fraksi MPR, diantaranya TB. Hasanuddin dari F-PDIP, Elnino M. Husein Mohi dari Fraksi-Gerindra, Aliyah Mustika dari F-Demokrat, Muhammad Iqbal dari F-PPP, Fahira Idris dari Kelompok DPD, Neng Eem Marhamah dari Badan Penganggaran, para Pimpinan Komisi Kajian Ketatanegaraan (K3)

termasuk hubungan dalam lingkungan kerja, tidak ada yang sempurna. Selalu ada celah-celah kekhilafan, baik yang terlahir dalam ucapan, terlihat dalam sikap, maupun terlaksana dalam perbuatan.

"Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan Halal Bihalal ini, mari kita lapangkan dada untuk saling memaafkan. Kita eratkan kembali tali silaturahmi yang mungkin mulai mengendur selama beberapa waktu kemarin. Kita himpun kembali yang terserak, untuk membangun semangat kebersamaan. Walaupun ke depan kita mungkin akan berlainan jalan untuk sementara waktu, karena kita akan menjalani Pilpres dan Pileg 2024, tapi itu tidak akan



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

MPR, dan Sekretaris Jenderal MPR Ma'ruf Cahyono, beserta para pejabat eselon dan para pegawai di lingkungan Setjen MPR.

Mewakili dan atas nama Pimpinan MPR, Ketua MPR Bamsuet menyampaikan Minal Aidin wal Faizin, Mohon Maaf Lahir Batin kepada seluruh yang hadir dalam halal bihalal itu. "Tentu diantara kita sepanjang tahun kemarin, ada hal-hal baik ucapan dan tindakan yang membuat tersinggung dan menimbulkan salah paham, maka momen di bulan Syawal ini adalah tepat kiranya kita saling memaafkan," katanya.

Halal bihalal, jelas Bamsuet, adalah momen bersejarah bagi semua sebagai umat manusia untuk memulai kembali hidup dalam 'kilometer 0'. Halal bihalal juga momen yang sakral bagi semua untuk melakukan refleksi, kontemplasi dan mawas diri, serta menyadari sepenuhnya dalam konsepsi hubungan kemanusiaan, hubungan antarmanusia,

menyurutkan hubungan kita sebagai teman, sahabat, dan saudara," tandas Bamsuet.

Semoga disaat yang mulia ini, lanjut Bamsuet, semua yang hadir dalam acara halal bihalal ini menjadi orang-orang yang 'kembali' dan orang-orang yang 'menang'. Yaitu, kembali kepada kebaikan, pada kesucian dan fitrah kemanusiaan, serta menjadi pemenang dalam memerangi sifat-sifat buruk dan mampu mengendalikan hawa nafsu.

Usai pemaparan dari Ketua MPR RI, acara dilanjutkan dengan ramah tamah, saling mengucapkan Minal 'Aidin wal-Faizin, dan saling bermaafan antar Pimpinan MPR, Pimpinan Fraksi, Pimpinan Badan Pengkajian, Pimpinan Badan Anggaran, Badan Sosialisasi, para pejabat teras Setjen MPR dengan seluruh pegawai di lingkungan Setjen MPR RI. □

DER

Dialog dengan Guru PPKn Kota Bengkulu

Indro Gutomo: Peran Besar Guru Menciptakan Agen Perubahan

RUMAH Kebangsaan MPR RI, pada hari Rabu (17/5/2023) kedatangan tamu sekitar 18 orang guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), yang tergabung dalam Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) PPKn Kota Bengkulu.

Rombongan guru dari Bengkulu merupakan tamu delegasi Pimpinan MPR RI, yang sengaja datang untuk dapat beraudensi dan mendapatkan wawasan ketatanegaraan, khususnya tentang kelembagaan MPR RI.

Dalam acara tersebut, Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antarlembaga Biro Humas dan Sistem Informasi Setjen MPR RI, Indro Gutomo, SH., MH., beserta staf menerima delegasi dan langsung mengarahkan mereka ke Ruang Samithi, Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, untuk melakukan dialog dan

juga memiliki efek negatif yang justru bisa menjadi hambatan dan kendala bagi seorang guru dalam fungsinya memberikan pendidikan bagi siswanya. “Smartphone saat ini juga menjadi sarana penyebaran ajaran radikal yang dapat membahayakan wawasan kebangsaan dan keutuhan NKRI”, imbuhnya.

Selain itu guru harus senantiasa melakukan upgrading atau terus meningkatkan skill dan kualitas dirinya agar senantiasa mampu menyesuaikan perkembangan zaman.

Untuk menciptakan siswa yang matang, guru harus selalu mengasah karakter pribadinya. Inilah pentingnya pembangunan karakter. Pribadi guru yang baik akan menciptakan generasi penerus yang baik pula. Bapak ibu guru adalah garda terdepan dalam mengimplementasikan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila. Bila nilai-nilai tersebut senantiasa



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

serap aspirasi.

Dalam dialog, Indro Gutomo mengungkapkan bahwa peran dan kiprah seorang pendidik atau guru itu sangat penting, karena perannya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Melihat fakta itu, sudah semestinya seorang guru harus bangga dengan peran dan fungsinya itu. Apalagi yang dididik dan dibina seorang guru itu adalah anak-anak generasi penerus bangsa, mulai dari tingkat pendidikan usia dini atau TK, sekolah dasar, sekolah menengah, sampai pendidikan tinggi.

“Tidak mudah memang, tapi peran guru itu langsung atau tidak langsung, ikut menciptakan sosok seorang anak sebagai agen pembangunan dan pembaharuan/perubahan untuk dipersiapkan menghadapi era Indonesia emas di tahun 2045. Di mana pada saat itu, Indonesia genap berusia 100 tahun alias satu abad. Pada masa itu, Indonesia ditargetkan sudah menjadi negara yang sejajar dengan negara-negara maju lainnya,” ujarnya.

Tapi, lanjutnya, guru itu jangan sampai terlena. Sebab, era modernisasi dan kecanggihan teknologi digital, selain efek positif

diimplementasikan, kami yakin Profile Pancasila akan terlihat dalam setiap pribadi seorang guru.

Dialog yang dimoderatori pegawai Humas Setjen MPR Try Syilvani yang berlangsung penuh keakraban itu, juga diisi pemaparan materi oleh pemateri Ahmad Faroby. Pemateri memaparkan tentang tugas serta wewenang lembaga MPR dan profil para Pimpinan MPR RI, serta Program Sosialisasi Empat Pilar yang sedang gencar diselenggarakan MPR di berbagai daerah di Indonesia.

Di penghujung acara, dibuka sesi tanya jawab dan serap aspirasi dari delegasi kepada MPR RI. Di momen itu, banyak pertanyaan, masukan, ide, serta gagasan dari delegasi guru. Di antaranya, seputar keinginan agar kesejahteraan para guru, terutama guru honorer, lebih diperhatikan. Lalu, tentang keinginan para guru untuk ikut berpartisipasi aktif dalam melakukan Sosialisasi Empat Pilar bersama MPR RI, untuk menambah wawasan kebangsaan guru dan siswa.

Acara kemudian ditutup dengan sesi foto bersama. □

DER



FOTO-FOTO: ISTMIEWA

Luluk Nur Hamidah, Anggota MPR Fraksi PKB

Kesejahteraan Bagi Ibu dan Anak Adalah Hak Konstitusional

RANCANGAN Undang-Undang (RUU) tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) sedang berproses di parlemen. DPR telah menetapkan RUU KIA ini sebagai usul inisiatif DPR. RUU ini dilatarbelakangi kondisi angka kematian ibu dan anak yang masih cukup tinggi. Pada tahun 2021, angka kematian ibu dan anak, yaitu 300/1000 angka kelahiran. Pemerintah telah menargetkan penurunan angka kematian ibu dan anak menjadi 183/1000 angka kelahiran.

RUU inisiatif DPR ini mengatur beberapa pasal, antara lain soal ibu bekerja mendapatkan hak cuti melahirkan hingga enam bulan dan hak cuti 40 hari bagi karyawan laki-laki untuk membantu istrinya merawat anak yang baru lahir. Peran ibu amatlah penting dalam peningkatan kualitas hidup bagi anak dalam sebuah keluarga. Kualitas hidup dipandang sebagai determinan dari kesejahteraan.

Namun tak urung, RUU KIA ini menimbulkan pro dan kontra. Bagi pihak

Kontra, sejumlah pihak mengkhawatirkan jika RUU KIA ini disahkan akan menjadi kabar buruk bagi iklim bisnis di Indonesia, karena dapat mengurangi produktivitas tenaga kerja. Saat ini saja, dari sisi produktivitas, tenaga kerja Indonesia masih kalah bersaing dengan tenaga kerja negara-negara tetangga. Singkatnya, RUU ini dikhawatirkan akan membebani para pengusaha dan investor.

Untuk mengetahui lebih jauh tentang RUU ini, berikut penuturan anggota MPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), **Luluk Nur Hamidah**. Sebagai anggota Badan Legislasi DPR RI dan Sekjen Kaukus Perempuan, Luluk Nur Hamidah adalah juga inisiator dari RUU KIA. Berikut petikannya.

Apa yang melatarbelakangi usul inisiatif RUU KIA ini?

RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak ini diawali oleh satu kenyataan atau realitas kondisi dan fakta yang dialami baik ibu atau

anak yang ada di Indonesia. Di satu sisi, Indonesia harus menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul atau generasi emas tahun 2045 nanti, tapi di sisi lain, kita melihat begitu banyak tantangan dan situasi tidak baik yang umumnya dihadapi para ibu.

Kita menemukan satu fakta yang memang agak mengejutkan, misalnya perempuan kekurangan nutrisi dan gizi ketika mengandung anak. Kesehatan perempuan ketika mengandung atau pada saat melahirkan dalam kondisi yang sebenarnya sangat membahayakan. Perempuan yang mengalami anemia, ketika mengandung maka kondisi anemia semakin parah. Kondisi anemia ini akan berbahaya. Maka, tidak jarang banyak kasus kematian ibu karena kehabisan darah pada saat melahirkan.

Ini terbukti dari angka kematian ibu dan anak yang masih sangat tinggi di Indonesia. Kalau kita lihat, dari rata-rata 100.000 kelahiran hidup, angka kematian ibu melahirkan masih di atas 300. Begitu juga dengan anak-anak. Kematian anak-anak

pasca kelahiran masih sangat tinggi. Bayangkan, tingkat kematian ibu dan anak di Indonesia merupakan salah satu yang tertinggi di Asia Tenggara.

Selain kematian ibu dan anak, stunting (kekurangan asupan gizi kronis pada anak yang mengganggu pertumbuhan) juga menjadi beban bagi pemerintah. Stunting kita rata-rata masih 24%. Kalau dilihat data stunting by provinsi, kabupaten, kecamatan, apalagi desa, maka angkanya lebih tinggi lagi. Misalnya, di dapil saya di Sragen, pada tahun 2018 stunting di Kabupaten Sragen hampir 39%. Bahkan data stunting di desa-desa ada yang mencapai 50%. Tapi pemerintah mengklaim angka stunting turun menjadi 22%. Saya katakan angka nasional tidak selalu mencerminkan angka sesungguhnya di level bawah.

Apa yang diatur dalam RUU KIA ini?

Kesejahteraan, khususnya bagi ibu dan juga anak, adalah hak konstitusional. Kesejahteraan ibu dan anak merupakan pengejawantahan dari hak konstitusi yang memang dijamin oleh undang-undang kita dan berbagai aturan perundang-undangan yang lain. Tujuan kita bernegara, antara lain melindungi seluruh rakyat Indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini menjadi tugas negara atau pemerintah untuk memastikan semua warga negara dalam kondisi sejahtera, baik fisik, non fisik, emosional, lahir batin. Secara ekonomi berkecukupan, sandang dan pangan juga berkecukupan, dan terhindar dari berbagai tindak kekerasan, termasuk prinsip lain seperti adanya kesetaraan, tidak ada diskriminasi dan seterusnya.

RUU ini penting karena kesejahteraan ibu dan anak tersebar di berbagai bidang, tersebar di beberapa undang-undang, dan banyak lembaga atau instansi yang terlibat, begitu juga anggaran, sehingga tidak terintegrasi. Ini upaya untuk mendidik masyarakat dan menyiapkan peradaban baru terkait nilai-nilai baru dalam hal perkawinan, hubungan suami – istri, memaknai peran keluarga, tanggung jawab pengasuhan, dan seterusnya.

Soal ibu bekerja mendapatkan hak cuti hanya salah satu yang diatur dalam RUU ini. Dalam RUU ini, ibu bekerja mendapatkan hak cuti melahirkan hingga enam bulan dan hak

cuti 40 hari bagi suami untuk membantu istrinya merawat anak yang baru lahir.

Bagaimana dengan anggapan bahwa RUU ini akan mengurangi produktivitas tenaga kerja?

Anggapan bahwa cuti hamil bagi ibu identik dengan menghambat produktivitas atau cuti yang panjang itu berarti akan mengganggu produksi ekonomi adalah anggapan yang salah. Justru kalau, misalnya, cuti diperpanjang akan mempersiapkan kondisi ibu untuk kembali masuk dalam dunia kerja. Maka, ibu bekerja akan berkontribusi bagi peningkatan produktivitas. Itu sudah dibuktikan berbagai studi.

Bagaimana cuti hamil di Indonesia



dibandingkan dengan cuti hamil di negara-negara lain?

Kita mencoba mengambil jalan tengah. Cina memberikan cuti hamil hanya 14 minggu. Tetapi ada juga negara yang memberikan cuti hamil kepada ibu bekerja sampai dua tahun. Kita mengambil garis moderat. Cuti hamil selama 6 bulan banyak diadopsi oleh negara-negara seperti Vietnam. Sebagai negara komunis, Vietnam mengatur cuti hamil bagi ibu bekerja selama 6 bulan.

Vietnam sudah bisa menghitung bahwa level kesejahteraan menjadi penentu manakala sebuah negara sedang membangun. Negara itu masih mempunyai harapan ketiks nanti si anak berusia 20 tahun maka akan menjadi tenaga kerja yang terbaik. Jangan kebalikannya. Di Indonesia, angkatan kerja kita cukup, secara demografis juga bagus,

tapi angka stunting masih tinggi. Ini akan menjadi beban untuk semuanya.

Jadi, masa cuti hamil selama 6 bulan sudah cukup moderat. Kalau mau fair, cuti 6 bulan untuk ibu, kemudian 6 bulan berikutnya untuk ayah sehingga bisa bergantian ketika istri kembali bekerja, kemudian ayah mengasuh anak. Ini sudah mulai dilakukan beberapa negara maju.

Harapan ibu dengan RUU KIA ini?

RUU ini merupakan RUU inisiatif dan ikhtiar yang sangat serius untuk bisa menyelenggarakan kesejahteraan ibu dan anak secara komprehensif, terintegrasi dan menyeluruh. Oleh karena itu, isu kesejahteraan ibu dan anak tidak bisa dilihat ketika perempuan menjadi ibu, tetapi sejak

awal saat remaja, menikah, kemudian hamil, melahirkan, pasca melahirkan, dan seterusnya, sehingga penyelenggaraan kesejahteraan ibu dan anak bisa memastikan tidak adanya perkawinan anak (di bawah umur), tidak ada risiko bagi perempuan pada saat hamil, dan yang paling penting bisa mencegah risiko kematian ibu.

Bagaimana kelanjutan dari pembahasan RUU ini?

Sekarang sedang dibahas bersama pemerintah di Komisi VIII. Kita mengingatkan pasal-pasal yang sangat penting, misalnya hak cuti bagi ibu bekerja bisa tetap dikawal. Dari kajian mendalam, cuti hamil merupakan investasi masa depan yang baik juga bagi Indonesia untuk menyiapkan SDM yang bagus, angkatan kerja yang sangat kompetitif. □

Lembaga MPR RI adalah *Rumah Rakyat*

MENTERI BUMN RI, **Erick Thohir**, mengaku terkesan dengan sebutan Gedung MPR RI sebagai Rumah Rakyat. "Sebutan rumah bagi rakyat itu sangat merepresentasikan kedaulatan rakyat," ungkap Erick Thohir saat menghadiri acara Harlah dan Rapat Kerja Nasional PBAI-Khairiyah, di Gedung Nusantara IV, Kompleks MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta, Sabtu (6/5/2023).

"Apalah artinya sebuah gedung negara yang megah, namun rakyat merasa terasing. Hanya sebuah menara gading yang rakyat tak mampu menembusnya," ujarnya.

Menteri kelahiran Jakarta, 52 tahun silam ini, menyaksikan bahwa sebutan Rumah Rakyat itu bukan sekedar gimmick. Tapi, direalisasikan secara nyata. "Buktinya, MPR mempersilahkan para pengurus PBAI-Khairiyah dari seluruh Indonesia datang dan menikmati gedung ini," ujar Ketua Umum PSSI ini. □

DER



Erick Thohir

Saya Orang Betawi Lebaran Nikmati Sepinya Jakarta

SEBAGAI keturunan Betawi asli, artis, model, penyanyi cantik **Dewi Sandra Killick** atau Dewi Sandra mengaku tidak pulang kampung ketika momen lebaran atau Idul Fitri 1444 lalu. Puteri pasangan John Killick (Inggris) dan Hajjah Prihartini (Betawi) ini lebih memilih merayakan lebaran di Jakarta bersama keluarga besarnya.

“Ya, di Jakarta aja. Saya kan asli Betawi, ya melihat dan menikmati sepinya kota Jakarta yang biasanya hingar bingar. Kumpul aja, sungkeman, bagi-bagi THR buat keponakan,” ujar penerima Actress of the Year Indonesian Choice Awards 2018 menceritakan aktivitas selama lebaran lalu.

Dewi Sandra berharap, seluruh amal ibadahnya selama Ramadan diterima Allah SWT., dan ke depannya menjadi lebih baik lagi. □

DER



Dewi Sandra



Sheikha Jawaher

Kagumi Ramahnya Orang Indonesia

PUTERI Kerajaan Bahrain, **Sheikha Jawaher** Bint Khalifa Al Khalifa, berkunjung ke Indonesia, 8 Mei 2023. Kunjungannya ke Indonesia dalam rangka menghadiri The Timeless Diamond & Legacy of Stemcell.

Sebagai penggerak dan motivator kaum wanita yang terkenal di dunia, Sheikha sangat kagum dengan keramahan orang Indonesia.

“Saya sangat terkesan dengan ramahnya orang Indonesia,” ujar Duta Khusus PBB untuk Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim ini. Selain keramahan orang Indonesia, dia juga menyukai batu Bacan Indonesia, dan nasi goreng.

Dalam kunjungannya di Indonesia, Sheikha juga sempat menyambangi Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (12 Mei 2023). □

DER



FOTO-FOTO. ISTIMEWA

Menikmati Senja di Sky Deck Halte Bundaran Hotel Indonesia

DI SELURUH kota besar dunia, denyut pembangunan tak pernah berhenti. Tigapuluh hari dalam sebulan, tujuh hari dalam seminggu, dan 24 jam sehari, pembangunan terus berlangsung. Berbagai fasilitas, mulai dari ruang bisnis hingga ruang publik selalu bermunculan. Di Jakarta misalnya, Ibukota Indonesia itu tak pernah sepi dari pembangunan fasilitas umum. Tidak butuh waktu yang lama, satu persatu bangunan monumental terus bertebaran. Salah satu yang kini tengah viral dan terus dibanjiri warga Jakarta adalah anjungan atau sky deck di halte Bundaran Hotel Indonesia.

Sejak diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Sabtu petang (15/10/2022), halte yang terletak di Jalan MH. Thamrin, Jakarta Pusat, ini selalu dipadati pengunjung. Bahkan saat libur panjang, beberapa waktu lalu, pengunjung anjungan Halte Bundaran HI ini sempat membludak. Mereka terpaksa mengantri untuk mendapat kesempatan naik dan menjajal sensasi yang disediakan Sky Deck Halte Bundaran HI.

Majalah *Majelis* yang mencoba mencicipi suasana anjungan juga tak luput dari keharusan mengantri. Sejak dari tangga naik

ke anjungan, Majalah *Majelis* sudah harus berdiri menunggu giliran ke anjungan. Saat itu sangat ramai, ratusan pengunjung sudah mengular berdiri di tangga menuju ke atas. Tak peduli laki-laki juga perempuan, tak urusan dengan usia, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, semua bernasib sama, harus mengantri.

Kondisi tak jauh berbeda terjadi saat sudah berada di anjungan. Bahkan lebih

parah lagi, karena semua pengunjung hanya diberi kesempatan sangat minim untuk bisa bereksresi tepat di ujung anjungan yang menghadap langsung ke arah patung selamat datang. Sebanyak 20 orang dipersilakan maju secara bersama-sama, setelah ber-selfie, mengabadikan momen keberadaannya selama dua menit, mereka harus segera meninggalkan tempat untuk digantikan oleh 20 orang berikutnya, begitu





FOTO-FOTO: ISTIMEWA

FOTO-FOTO: ISTIMEWA



seterusnya.

Meski jatah waktu yang disediakan sangat sedikit, tidak ada satu pengunjung pun yang menggerutu. Sebaliknya, seluruh pengunjung terlihat puas dengan kesempatan yang mereka dapatkan. Sekalipun masih ada beberapa pengunjung yang terlihat memperlambat langkahnya menuju pintu keluar.

“Cukuplah, karena yang mengantri juga tidak sedikit. Yang penting dapat sisi pemotretan yang bagus, untuk dipasang di medsos,” kata seorang pengunjung sembari bergegas meninggalkan tempat.

Tingkat kepadatan pengunjung di Sky Deck Halte Bundaran Hotel Indonesia

memang tidak terjadi setiap saat. Pada jam-jam kerja, tempat tersebut relatif sepi. Tetapi pada hari libur, jumlah pengunjung akan membludak.

Senja di Bundaran HI

Hadirnya anjungan di Halte Bundaran HI adalah sesuatu yang relatif baru bagi masyarakat Jakarta. Sebagaimana pesan Anies Baswedan saat peresmian, Sky Deck Halte Bundaran Hotel Indonesia, bertujuan untuk memberi kesempatan bagi semua warga menikmati keindahan bundaran HI, tanpa memandang kelas ekonomi. Saat ini tujuan tersebut sudah dirasakan warga

Jakarta. Sebelumnya, pemandangan Bundaran HI beserta gedung pencakar langit, dari ketinggian hanya bisa dinikmati oleh segelintir orang. Yaitu, mereka yang mampu membayar untuk duduk-duduk di rooftop beberapa gedung di sekitar tempat tersebut.

Salah satu momen terindah yang bisa dinikmati dari anjungan tersebut adalah saat senja datang, hingga sesaat sebelum malam benar-benar tiba. Pada saat itu, lampu di gedung-gedung pencakar langit yang mengelilingi bundaran Hotel Indonesia menyapa datangnya malam. Keindahan pemandangan ini akan semakin terasa saat kegelapan merayap semakin dalam.

Pada saat serupa, lampu kendaraan yang menyala di tengah kemacetan menghadirkan pemandangan nan indah. Seolah jutaan bintang dari langit turun ke bumi, berjalan hingga merayap pelan.

Perubahan suhu dari panas di siang hari menjadi sejuk dan dingin di malam hari menyajikan kenyamanan tersendiri. Terlebih bila angin bertiup sepoi-sepoi, sebuah kombinasi alam yang menandakan kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Terlebih lagi jika suasana tersebut dinikmati sembari menyeruput beberapa jenis minuman yang dijajakan di kawasan tersebut, semua benar-benar akan terasa syahdu dan tak ingin cepat-cepat ditinggalkan. Selamat mencoba. □

MBO

Dr. H. Mardani Ali Sera, M.Eng.

Doktor Mesin Tertantang Terjun *Kepusaran Politik Praktis*



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

BAGI para pemerhati dunia politik, yang satu ini bukanlah sosok yang asing. Wajahnya sering wara-wiri di layar kaca, menyuarakan ide perjuangan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Pandangan dan gagasannya terkait tema-tema mutakhir juga sering dikutip media cetak dan online. Yang menarik, kritik yang disampaikan tidak sampai memekakkan telinga lawan politik, juga tidak membuat mereka marah. Karena bahasa yang dipakai masih memerhatikan tatakrma dan kepatutan. Dia adalah Dr. H. Mardani Ali Sera M.Eng.

Mardani adalah sosok yang disegani baik kawan maupun lawan politik. Pembawaannya yang supel membuat lawan yang semula berseberangan kembali berkawan. Sementara teman-temannya, apalagi yang sering bersinggungan, semakin akrab dalam berkomunikasi.

Dalam kiprahnya sebagai politisi, Ustad Mardani—begitu sapaan akrabnya—tidak membabi buta menyampaikan kritik. Acapkali, pria kelahiran Jakarta 9 April 1968, ini memberi apresiasi dan juga sanjungan, terutama saat lawan politiknya memiliki kebijakan yang baik, demi kepentingan bangsa dan negara. Salah satunya, ketika dengan sadar Ia mengakui kelebihan Basuki Cahaya Purnama alias Ahok, mantan Gubernur DKI Jakarta.

“Ahok adalah sosok yang lugas, pekerjaannya selesai dengan tuntas. Beliau berhasil membereskan masalah lurah, memberi tunjangan yang layak sesuai kinerja berbasis Aplikasi Qlue. Kalau ada jalan rusak tinggal difoto, dan dilaporkan ke atasannya. Tetapi, Ahok juga saya kalahkan dengan pasangan Anies-Sandi,” kata Ustad Mardani pada Majalah *Majelis*, di ruang kerjanya, beberapa waktu lalu.

Sebagai anggota Komisi II DPR, Mardani tak pernah luput perhatiannya terhadap perkembangan seputar pelaksanaan Pemilu, 14 Februari 2024. Tak terkecuali kabar yang berhembus belakangan terkait statemen Presiden Joko Widodo yang hendak ikut cawacaw pada pelaksanaan Pilpres 2024.

Menurut Mardani, memang tidak ada yang dilanggar, baik politis maupun yuridis, kalau Presiden ke-7 itu benar-benar mau campur tangan dalam kontestasi Pilpres, termasuk jika menggunakan kacamata Tap MPR No. VI Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Karena, untuk menghindari tuduhan melanggar Ketetapan MPR, Jokowi bisa mendatangkan saksi yang bisa mengatakan bahwa keterlibatannya dalam Pilpres tidak bertentangan dengan Tap MPR.

“Untuk mengurangi potensi penyelewengan kekuasaan, kita hanya



bisa meminta bantuan sentimen publik. Dan, kalau dikelola dengan baik, sentimen publik ini punya kekuatan sangat besar untuk menekan presiden agar bersikap netral,” ungkap Mardani lagi.

Ini penting, ungkap suami dari Siti Oniah, ini seraya mengingatkan bahwa DPR semestinya melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah, yang saat ini terkesan lumpuh. Tidak ada tekanan apapun atas rencana Presiden yang akan melakukan cawe-cawe. Ketidakterdayaan DPR tersebut bermula dari dukungan dan kedekatan tujuh ketua umum partai koalisi terhadap Presiden Jokowi. Akibatnya, tugas pengawasan yang mestinya dilakukan DPR tidak berjalan sebagaimana seharusnya.

Keberuntungan

Sebagai anggota Komisi II, Anggota DPR RI Dapil DKI Jakarta I ini menolak dikatakan bahwa anggota komisi yang mem-

bidangi Pemerintahan, Otonomi Daerah, dan Pelayanan Publik, ini lebih mudah untuk kembali berkiprah di Senayan. Pasalnya, keterbukaan yang terjadi sekarang semakin mempersempit peluang KKN anggota Komisi II, baik dengan KPU maupun Bawaslu.

Apalagi, masing-masing pihak (anggota Komisi II, KPU maupun Bawaslu), menunjukkan sikap kedewasaan untuk belaku jurdil dan luber. Bahkan otak-atik perolehan suara yang dulu sering terdengar serta dituduhkan menjadi obyek kong-kalikong antara anggota Komisi II dengan KPU dan Bawaslu pun semakin sulit dilakukan.

“Kecuali jika dilakukan sebelum pencoblosan, menggunakan uang dalam jumlah banyak dan itu tidak diketahui pihak-pihak lain yang berseberangan. Terbukti, dari 52 anggota Komisi II hanya 16 orang yang bisa terpilih kembali menjadi anggota Legislatif. Itu adalah bukti bahwa tuduhan anggota Komisi II lebih mudah jadi anggota DPR lagi



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

tidaklah benar,” ungkapnya.

Menyinggung soal proyek pemindahan IKN, Mardani mengakui, program tersebut didukung niat yang baik. Agar pembangunan dan kemajuan bangsa Indonesia tidak hanya dirasakan oleh masyarakat Indonesia bagian barat saja, tapi juga dirasakan bagian timur dan tengah. Hanya saja cara dan waktunya tidak tepat, anggaran tidak ada dan prioritasnya salah.

Untuk memajukan seluruh Indonesia, kata alumni program magister dan doktor Universitas Teknologi Malaysia, ini yang dibutuhkan adalah universitas terbaik untuk wilayah Indonesia timur. Setidaknya, anggaran IKN sebesar Rp 600 triliun bisa digunakan untuk membangun 10 perguruan tinggi terbaik, yang mampu melahirkan cendekiawan. Apalagi, di era digitalisasi sekarang ini, yang dibutuhkan adalah manusia-manusia cerdas, terhubung dengan jejaring intelektual dan spiritualitas yang baik.

Meski namanya sudah melekat erat dengan dunia politik nasional, Mardani Ali Sera terbilang gagal melakukan pendaratan yang sempurna saat memulai kiprahnya dalam dunia politik praktis. Terbukti, ikhtiarnya untuk melangkah ke Senayan sempat gagal hingga dua kali. Tahun 2009 dan 2014 Mardani gagal mendapat mandat untuk menjadi anggota dewan. Meski dua kali gagal, belakangan ia tetap menjadi anggota MPR dengan mekanisme Pengganti Antar Waktu (PAW). Masing-masing menggantikan Arifinto yang mengundurkan diri pada 2011. Dan, pada 2017, Mardani mengisi kekosongan yang ditinggalkan Saduddin.

Berkaca pada keagalannya di medio 2009 dan 2014, Mardani sadar bahwa mengunjungi dan bertemu dengan konsituen adalah tuntutan yang harus dipenuhi. Hanya dengan cara itu pemilih bisa mengetahui calon yang akan mewakili mereka. Sekaligus juga untuk lebih mengenal, menjaring aspirasi, serta keinginan masyarakat.

“Saya bersyukur mendapat dapil di Jakarta, lebih melek terhadap teknologi informasi dan cakupan wilayah relatif kecil, dibanding saat nyaleg di dapil Jabar VII. Bukan tidak mungkin, kalau di luar Jakarta, saya bisa gagal lagi seperti pada 2009 dan 2014,” ungkapnya.

Bagi Mardani, mendapat dapil Jakarta bukan hanya telah membuatnya sukses merambah dunia politik. Betawi adalah tempat ia lahir dan dibesarkan. Sebagaimana lazimnya, sebagai anak Betawi, mengaji adalah keharusannya sejak kecil. Ibaratnya, nakal boleh tapi mengaji tidak boleh ditinggalkan.

“Ayah saya veteran, kalau saya bolos ngaji maka siap-siap kena





FOTO-FOTO: ISTIMEWA

pukul, dan itu membuat saya jera. Ibaratnya, kita boleh pergi ke mana saja, asal tidak lupa jalan pulang.

Mobil Nasional

Bagi sebagian orang, keterlibatan Mardani dalam dunia politik dianggap istimewa. Bagaimana tidak, seorang doktor mesin, alumni Universitas Teknologi Malaysia, penemu mesin pencacah sampah dan mesin bakar, memilih terjun ke dunia politik dibanding terus menekuni teknologi mesin.

Tetapi, bagi Mardani sendiri, keterlibatannya dalam dunia politik merupakan tantangan. Ia menganggap, kerumitan dunia politik lebih susah dibanding *engineering science* yang semuanya lebih pasti. Sementara *social engineering* dianggapnya lebih berantakan, dan



Ia mengambil tantangan lebih besar.

Sayangnya, Mardani sendiri belum sempat menjadikan mesin ciptaannya sebagai sarana kampanye, sebagaimana Presiden Jokowi menjadikan Mobil Nasional sebagai salah satu kampanye andalannya.

“Menjadikan temuan teknologi sebagai metode kampanye sangat bagus, bisa menurunkan biaya politik. Tetapi, saya sempat mengalami kesulitan untuk menerapkan mesin pencacah di sini. Sementara mesin pembakar yang saya buat, patennya dimiliki perusahaan asal Malaysia,” kata anak dari pasangan M. Ali Sera dan Rohati lagi.

Menggunakan mesin ciptaan tangan sendiri untuk kepentingan kampanye, kata Mardani, juga tidak sederhana. Karena, cakupannya terbatas, hanya kepada masyarakat yang bersentuhan langsung dengan mesin tersebut. Sementara kelompok lain belum tentu nyambung, atau malah tidak tersentuh.

Selain itu, waktu kampanye yang relatif pendek menjadi tantangan tersendiri. Belum tentu teknologi yang akan diberikan memiliki waktu yang cukup untuk disosialisasikan. Ditambah, ada faktor lain yang lebih digandrungi masyarakat luas, yaitu masalah ekonomi. Pembagian sembako, uang transport hingga kaos kampanye.

“Masyarakat lebih memilih sesuatu yang pasti. Mau tidak mau kita pun harus mengikuti cara tersebut, sembari secara perlahan memberikan pemahaman yang baik terkait politik dan kekuasaan,” pungkasnya. □

MBO



Menjadi Perempuan dalam Pusaran Modernitas

PEREMPUAN dalam sejarah pemikiran yang mengubah suatu peradaban identik dengan pengalaman. Pengalaman sebagaimana digambarkan Joan Scott melalui *Women's Experience of Modernity* merujuk pada kebiasaan menulis, baik surat maupun tulisan formal lain yang menciptakan efek emosi partikular. Kebiasaan menulis sebelum abad XX adalah ekspresi seni melalui deskripsi narasi atas fenomena tertentu. Narasi melalui ragam cerita menjadi sejarah kolektif sekaligus teks modernitas berbasis gender dalam wujud antologi untuk memperjuangkan sebuah ideologi.

Raden Ajeng Kartini, aktivis perempuan asal Jepara yang hidup pada periode 1879 – 1904 merupakan salah satu tokoh yang mengalami perubahan melalui narasi. Kumpulan narasi dituangkan dalam seperangkat surat yang dikirimkan kepada beberapa sahabat penanya asal Belanda. Pengalaman dan literasi merupakan pilar penting dalam perjuangan perempuan. Salah satu buah perjuangan Kartini adalah kesetaraan.

Perjuangan Kartini mewujudkan kesetaraan di masa lalu harus mampu menginspirasi kaum perempuan dalam mewujudkannya cita-citanya di masa kini dan mendatang.

Teks Perjuangan Perempuan

Dalam perkembangan dunia kontemporer, kesetaraan masih menjadi perjuangan perempuan dalam segala bidang kehidupan. Bertolak dari semangat Kartini, saya dalam berbagai kesempatan terus menggaungkan kesetaraan perempuan. Perempuan saat ini bagaikan menghadapi tembok kaca untuk mewujudkan kesetaraan karena tiadanya niat politik serta kesempatan yang sama dalam bidang ekonomi bagi semua untuk berusaha.

Persoalan perempuan diketahui, dipahami, tetapi sulit dijangkau karena berada di balik sebuah tembok transparan. Ungkapan ini bukan tanpa alasan, Barbara Marshall dalam *Engendering Mo-*

ernity, Feminism, Social Theory and Social Change mengungkapkan bahwa perempuan berada dalam situasi pengecualian dari kesadaran politik dan ekonomi. Narasi atas perempuan berbeda dengan narasi dari perempuan dalam lingkup modernitas.

Narasi atas perempuan masih menciptakan sekat dan melanggengkan ketimpangan. Maka, narasi perempuan modern mesti kembali ditulis oleh perempuan, yakni para perempuan pada kenyataannya mampu melihat peluang dan tantangan di depan, tetapi seperti tidak mampu menggapainya akibat berbagai tantangan domestik dan budaya.

Domestifikasi dan kultur memiliki narasi atas perempuan dengan plot berbeda sehingga dalam pemahaman atas masalah perempuan, solusi setara jauh dari kesimpulan. Menyikapi kondisi itu, saya tidak kenal lelah berupaya membuka mata setiap anak bangsa bahwa mewujudkan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki adalah keniscayaan di negeri yang berdiri di atas keberagaman.

Upaya meletakkan pemaknaan dimulai dengan penggalian sejarah atas Ratu Kalinyamat. Penggalian sejarah diikuti dengan pelurusan narasi lisan atas sosok perempuan peletak gagasan anti-kolonialisme dalam peradaban Nusantara. Kemudian diikuti dengan usulan kepada pemerintah untuk menjadikan Ratu Kalinyamat sebagai pahlawan nasional. Kepahlawanan Ratu Kalinyamat tidak melulu sebatas gelar, tetapi lebih dari itu merupakan pembelajaran bagi perempuan modern untuk memaknai narasi perjuangan dan warisan nilai dari Sang Ratu sebagai sejarah kolektif.

Hal terpenting bahwa melalui pembelajaran menyeluruh, setiap individu menyadari tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan dengan peran berimbang dalam ruang publik. Meski, hingga saat ini Ratu Kalinyamat belum disahkan sebagai Pahlawan Nasional, namun berbagai riset yang telah saya inisiasi terkait kepahlawanan Sang Ratu Jepara yang mengungkap delapan bukti primer baru itu, membuka mata setiap anak bangsa bahwa perempuan di masa

Oleh:
Dr. Lestari Moerdijat, S.S, MM
Wakil Ketua MPR RI



kejayaan kerajaan-kerajaan nusantara, cikal bakal negeri Indonesia, berperan sangat penting dalam meletakkan model pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi, mencerdaskan masyarakat dari surau-surau, sampai pada perjuangan mengusir penjajah, serta mampu membangun dan mengubah peradaban di zamannya.

Di setiap periode peradaban, kebaruan pemikiran memiliki teks dan konteks. Perubahan atau stagnasi pemikiran dipandang sebagai post-teks yang mengikuti. Upaya membarui pemikiran telah saya lakukan melalui gagasan lahirnya *Forum Diskusi Denpasar 12*, yang merupakan forum rutin setiap pekan untuk membahas berbagai masalah kebangsaan, termasuk sejumlah isu terkait perempuan dan sampai saat ini sudah dilakukan sebanyak 144 kali.

Pada forum dimaksud berbagai isu perempuan, antara lain terkait kesetaraan gender, perlindungan perempuan, dan pemberdayaan perempuan di negeri ini dibahas melibatkan para pemangku kepentingan dan para pakar, untuk kemudian menjadi rekomendasi perumusan kebijakan sekaligus disosialisasikan ke masyarakat.

Melalui forum diskusi yang digelar rutin setiap Rabu itu, saya berupaya memberi pemahaman kepada masyarakat betapa banyak pekerjaan rumah yang harus dituntaskan untuk mewujudkan kesetaraan gender di negeri ini. Selain gigih memberi pemahaman kepada masyarakat terkait pentingnya peran perempuan dalam setiap proses pembangunan, kita juga sangat peduli dengan aspek kesehatan anak dengan mendorong upaya peningkatan nutrisi dan gizi serta kesehatan perempuan. Terkait kesehatan perempuan, sebagai survivor kanker payudara, dengan tidak kenal lelah telah menyosialisasikan pentingnya deteksi dini dalam penanganan kanker, melalui program periksa payudara sendiri (SADARI) dan periksa payudara secara klinis (SADANIS).

Narasi yang selalu digaungkan bahwa anak yang sehat merupakan kunci menciptakan generasi cerdas dan perempuan sehat mampu melahirkan dan mendidik generasi yang berkualitas.

Epilog

Setiap tahun, Hari Kartini diperingati sebagai pengingat bagi perempuan untuk terus berjuang atau sebagai rutinitas semata tentang emansipasi perempuan. Tetapi, lebih dari itu, perempuan mesti secara radikal menyelidik jiwa perjuangan dan peran para tokoh yang diperingati. R.A Kartini, Ratu Kalinyamat, merupakan cermin untuk kembali pada pilar perjuangan perempuan, yakni pengalaman dan narasi. Pengalaman perjumpaan dengan persoalan perempuan, pengalaman menangkap ragam kisah ketidaksetaraan mesti menjadi narasi yang ditulis dan digaungkan dalam tindakan praktis di semua kanal, khususnya politik dan ekonomi.

Dalam bidang politik, keterlibatan perempuan mesti mengembalikan politik pada cita-cita menuju kesejahteraan bersama, karena politik pada dasarnya terikat erat dengan elemen pengetahuan, keterampilan, dan fondasi etis untuk kebaikan bersama. Politik mesti dilekatkan dengan kultur dan nilai kebangsaan bahwa sebagai bangsa yang berbudaya kemanusiaan mesti mendapatkan tempat tertinggi dalam setiap dinamika kehidupan.

Perempuan dalam politik mesti menuliskan narasi berbasis kognitif, afektif, dan konatif untuk manusia Indonesia. Di bidang ekonomi, perempuan mesti menjadi peletak tata kelola sumber daya, menjangkau setiap ketimpangan dalam masyarakat, memastikan terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Dan, yang paling penting bahwa kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi jangan sampai menanggalkan martabat manusia. Gagasan bernas pemikiran perempuan mampu membarui pembangunan nasional. Dengan demikian peringatan Hari Kartini dalam himpitan modernitas melampaui narasi tentang emansipasi menuju partisipasi dan transformasi kehidupan berbangsa. □

Sampaikan Kinerja Lewat Buku

Buku merupakan media yang tepat untuk mempublikasikan berbagai hal. Ini dilakukan oleh Syarief Hasan untuk mengabarkan aktivitasnya sebagai politisi. Berbagai tema di MPR, Komisi I DPR, dan Partai Demokrat, dikupas dan diberi solusi.

PERMASALAHAN Indonesia terlalu banyak untuk diurus oleh satu orang. Butuh peran semua kalangan yang peduli terhadap masa depan bangsa ini. Salah satunya dari kalangan politisi di gedung MPR/DPR, Senayan, yang suara lantanganya selalu ditunggu publik.

Kalimat di atas terurai di sampul belakang buku yang berjudul *Melukis Indonesia Dari Senayan*. Buku tersebut merupakan kumpulan tulisan gagasan dan pemikiran dari Wakil Ketua MPR Syarief Hasan (Prof. Dr. H. Sjarifuddin Hasan MM., MBA). Dalam buku setebal ix + 298 halaman dan terbagi VI Bab, Politisi Partai Demokrat itu ingin memberi solusi bagi permasalahan kalimat di atas.

Dalam pengantarnya, pria asal Palopo, Sulawesi Selatan, itu mengatakan, sebagai anggota MPR/DPR yang dipilih oleh rakyat melalui pemilu, maka amanah ini perlu untuk dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Salah satu bentuk pertanggungjawaban itu adalah melalui pemaparan langkah, pemikiran, dan tindakan yang sudah, sedang, dan yang akan dilakukan. Lalu disampaikan kepada rakyat, termasuk dalam bentuk tulisan.

Dalam bab-bab yang ada, Menteri Koperasi dan UMKM di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu menguraikan dan menjelaskan kinerja yang telah dilakukan selama dirinya menjadi Wakil Ketua MPR, anggota Komisi I DPR, dan sebagai anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat.

Dalam Bab I, di dalam sub bab-sub bab yang ada berjudul tentang masalah-masalah yang saat ini dibahas atau ditekuni MPR, seperti soal keinginan kembali menghidupkan GBHN, Empat Pilar MPR, amandemen UUD NRI Tahun 1945, dan Pancasila.

Dalam soal Empat Pilar MPR, sesuatu kegiatan yang biasa dilakukan, terutama di daerah pemilihannya, Kabupaten Cianjur dan Kota Bogor, Jawa Barat, dia mengatakan, bisalah dikatakan bahwa Empat Pilar MPR ibarat vaksin bagi mental bangsa Indonesia sehingga jika sudah memahaminya, mental akan aman dari berbagai macam ancaman yang mengganggu keutuhan bangsa dan negara ini.

Terkait keinginan menghidupkan kembali GBHN, yang tema itu saat ini merupakan fokus bahasan MPR, pria yang meraih gelar profesor di Universitas Negeri Makassar itu menyebut, sejak awal MPR telah bergerak cepat mengadakan kajian-kajian yang mendalam tentang wacana menghidupkan kembali GBHN dengan selalu mengedepankan keterlibatan berbagai elemen masyarakat, khususnya akademisi di perguruan tinggi. Dengan berbagai bentuk,

seperti *focus group discussion* dengan menghadirkan berbagai tokoh.

Sebagai salah satu pimpinan MPR, suami dari Ingrid Kansil itu tetap aktif menjalankan fungsinya sebagai anggota DPR di Komisi I. Hal demikian terlihat dari tulisan yang ada di buku itu, di Bab VI. Di bab terakhir itu, berbagai permasalahan yang ada di Komisi I dikupas, dibahas, dan dicari solusinya.

Dalam bab itu ada permasalahan yang saat-saat ini belum tuntas dalam penanganan, yakni keberadaan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Kelompok ini merupakan kumpulan orang yang menuntut Papua merdeka. Menyikapi keberadaan KKB, Syarief Hasan menuturkan, setelah resmi disematkan sebagai kelompok teroris, dirinya mendesak kepada pemerintah untuk melakukan tindakan tegas terhadap gerombolan KKB. TNI dan Polri tidak perlu ragu menumpas kelompok ini sampai ke akar-akarnya. Sebab, KKB telah melakukan berbagai aksi teror terhadap masyarakat sipil dan aparaturnya keamanan. Maka, TNI dan Polri tidak perlu ragu melakukan tindakan penanggulangan secara tuntas.

Di era kekuasaan Presiden Joko Widodo, Partai Demokrat menempatkan dirinya sebagai kelompok oposisi atau berada di luar kekuasaan. Akibatnya, kecuali Syarief Hasan, tidak ada politisi atau kader Partai Demokrat yang berada dalam kekuasaan (legislatif). Penempatan sebagai Wakil Ketua MPR, pastinya atas mandat dari Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, SBY.

Sebagai orang yang dipercaya oleh presiden kelahiran Pacitan, Jawa Timur, itu tentu Syarief Hasan harus menunjukkan loyalitasnya. Dan,

loyalitasnya diunggah di Bab V. Dalam bab ini bertema besar soal kudeta terhadap Partai Demokrat. Di halaman bab ini, dirinya menyebut sikap Presiden Jokowi yang menentang dengan tegas terjadinya kudeta di Myanmar harus kita apresiasi, namun sikap menjunjung tinggi demokrasi itu setidaknya juga harus konsisten diterapkan pada kasus kudeta yang dilakukan pembantunya, Moeldoko, terhadap Partai Demokrat.

Di halaman lain di bab yang sama, lebih lanjut ia mengatakan, saya selaku anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat menyambut baik keputusan Pemerintah, dalam hal ini Kemenkumham, yang menolak pengesahan kepengurusan KLB Deli Serdang yang abal-abal. Dalam KLB, Moeldoko diangkat oleh para oknum mengatasnamakan kader Demokrat untuk menjadi ketua umum. □



AWG



MPR
RUMAH KEBANGSAAN
PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA
DAN KEDAULATAN RAKYAT





MEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI KONSTITUSI



MPR
RUMAH KEBANGSAAN
PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA
DAN KEDAULATAN RAKYAT



Buku Digital MPR RI
SETJEN MPR RI